PERAN UPK PNPM MANDIRI PEDESAAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENYALURAN PEMBIAYAAN PINJAMAN BERGULIR
(Studi Kasus Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:
ASIATUL MUNGAWANAH
NIM. 1817202137

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Asiatul Mungawanah
NIM	: 1817202137
Jenjang	: S1
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Jurusan	: Ekonomi dan Keuangan Syariah
Judul	: Peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Penyaluran Pembiayaan Pinjaman Bergulir (Studi Kasus Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas) .

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 16 Februari 2023
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
24AKX257757954

Asiatul Mungawanah
NIM. 1817202137

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PERAN UPK PNPM MANDIRI PEDESAAN DALAM PENGEMBANGANEKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENYALURAN PEMBIAYAAN PINJAMAN BERGULIR (Studi Kasus Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh Saudara **Asiatul Mungawanah NIM. 1817202137** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **15 Februari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji	Sekretaris Sidang/Penguji
Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I	Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.
NIP. 19731014 200312 1 0002	NIDN. 2021088901

Pembimbing/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.S.I.
NIDN. 2111027901

Purwokerto, 01 Maret 2023
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Asiatul Mungawanah NIM. 1817202137 yang berjudul :

PERAN UPK PNPM MANDIRI PEDESAAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENYALURAN PEMBIAYAAN PINJAMAN BERGULIR

(Studi Kasus Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Januari 2023
Pembimbing,

H. Slamet Akhmadi, M.S.I

NIDN. 2111027901

PERAN UPK PNPM MANDIRI PEDESAAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENYALURAN PEMBIAYAAN PINJAMAN BERGULIR
(Studi Kasus Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)

Asiatul Mungawanah
NIM. 1817202137
Email : asiiatulmungawanah14@gmail.com
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

UPK PNPM Mandiri merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai tanggung jawab dalam menurunkan kemiskinan dan memperluas kesemppatan kerja serta dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat. UPK PNPM-MP juga merupakan salah satu lembaga keuangan program pemberdayaan yang terbesar di indonesia. UPK PNPM Mandiri Pedesaan berfokus kepada penyediaan pinjaman modal bagi masyarakat untuk pengembangan ekonomi yang diterimanya secara bergulir dan berkelompok.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung atau penilitian lapangan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang di dikumpulkan oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak UPK PNPM Mandiri Pedesaan dan anggota kelompok SPP, sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya lembaga UPK PNPM Mandiri Pedesaan di tiap Kecamatan, telah banyak membantu masyarakat mencukupi beban ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan UPK PNPM Mandiri secara tidak langsung telah membuka kesempatan kerja dan mengurangi penganguran. Dengan pinjaman modal yang diberikan membuat masyarakat lebih terpacu untuk membuka dan menjalankan usahanya. Dalam fiqh klasik al-qardh di kelompokkan dalam akad ta'awuni atau yang biasa disebut dengan tolong menolong, sebab dalam UPK PNPM Mandiri Pedesaan dana yang diberikan untuk menolong warga yang membutuhkan atau warga yang miskin.

Kata Kunci : Peran, UPK PNPM, Pinjaman Bergulir, Pengembangan Ekonomi

THE ROLE OF UPK PNPM MANDIRI PEDESAAN IN COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH DISTRIBUTION OF ROLLING LOAN FINANCING

(Case Study of the Karanggintung Village Community, Kemranjen District, Banyumas Regency)

Asiatul Mungawanah
NIM. 1817202137
Email : asiiatulmungawanah14@gmail.com
Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

UPK PNPM Mandiri is a financial institution that has the responsibility of reducing poverty and expanding employment opportunities as well as being able to prosper the people's economy. UPK PNPM-MP is also one of the largest empowerment program financial institutions in Indonesia. UPK PNPM Mandiri Rural focuses on providing capital loans to the community for economic development which they receive on a revolving and group basis.

The research used is direct research or field research. From this it can be concluded that the data collected by researchers by way of observation, interviews and documentation with UPK PNPM Mandiri Rural and members of the SPP group, while data analysis was carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data validation technique uses triangulation.

The results of this study state that the existence of the UPK PNPM Mandiri Rural in each sub-district has helped the community to meet the economic burden in everyday life. Even the PNPM Mandiri UPK has indirectly opened up job opportunities and reduced unemployment. With the capital loans provided, people are more motivated to open and run their businesses. In classical fiqh, al-qardh is grouped in the ta'awuni contract or what is commonly called mutual help, because in the PNPM Mandiri Rural UPK funds are given to help people in need or poor people.

Keywords : Role, UPK PNPM, Revolving Loans, Economic Development

MOTTO

"Mulailah segala sesuatu dengan niat agar tercapai

Semua yang diinginkan"

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Pembiayaan Pinjaman Bergulir (Studi Kasus Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)". Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, rahmat, hidayah, serta rezeki kepada saya, sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai sesuai harapan. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT.
2. Untuk orang tua tercinta, Ayahanda Wasiman, dan Ibu saya tercinta Kamiyah, Kakak dan Adik-Adik saya yang telah memberikan perhatian, pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian.
3. Untuk keluarga besar saya yang selalu memberi dukungan dan doa.
4. Semua guru dan dosen terkhusus dosen pembimbing saya Bapak H. Slamet Akhmadi M.S.I., yang telah meluangkan waktu dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan saran selama penyusunan skripsi.
5. Segenap jajaran pihak UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen dan para anggota Kelompok SPP Desa Karangggintung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan izin penelitian dan bantuan.
6. Teman-teman dari semester awal Nuri, Lutfi, Triswati, Heni, terimakasih selalu menjadi support sistem selama kuliah.
7. Sahabat saya Arum Rakhmawati dan yang satu lagi yang selalu ada disaat suka maupun duka.
8. Untuk semua teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah D Angkatan 2018 atas kebersamaan dan kenangannya.
9. Semua yang turut mendukung dan membantu dalam mengerjakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ىَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla

- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rasa syukur atas segala rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan tabi'in.

Penyusunan skripsi yang berjudul "Peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Pembiayaan Pinjaman Bergulir (Studi Kasus Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)" disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr, Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak. selaku ketua prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. H. Slamet Akhmadi, M.S.I., selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan saran selama penyusunan skripi.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kepada UPK PNPM Mandiri Kecamatan Kemranjen dan anggota kelompok SPP yang telah memberikan izin untuk penelitian dan kepada pihak pihak yang telah membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti
11. Kedua orang tua penulis Bapak Wasiman dan Ibu Kamiyah serta kakak dan adik-adik saya yang memberika dukungan dan doa kepada penulis
12. Teman-teman seperjuangan Kelas Perbankan syariah D 2018. Terimakasihuntuk kebersamaanya selama ini
13. Seluruh Pihak yang telah membantu penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
14. Terimakasih untuk diriku sendiri.

Dalam Penyusunan skripsi ini tanpa adanya bantuan dari kalian semua tentu tidak berjalan dengan lancar. Meskipun penulis sudah sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, tentu masih banyak kekurangan yang ada. Untuk itu saran dan kritik sangat diterima untuk memperbaiki karya tulis ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Purwokerto, 19 Januari 2023

Penulis

Asiatul Mungawanah
NIM. 1817202137

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

NOTA DINAS PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xvi

DAFTAR ISI xviii

DAFTAR TABEL xx

DAFTAR GAMBAR xx

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 9
C. Rumusan Masalah 13
D. Tujuan Penelitian 14
E. Manfaat Penelitian 14
F. Kajian Pustaka 15

BAB II : LANDASAN TEORI 26

A. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 26
B. PNPM Mandiri 32

C. Pembiayaan Pinjaman Bergulir 50
D. Pengembangan Ekonomi Dalam Islam 59
E. Landasan Teologis 69

BAB III : METODE PENELITIAN 74

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 74
B. Lokasi Penelitian 75
C. Jenis dan Sumber Data 76
D. Teknik Pengumpulan Data 77
E. Metode Analisis Data 78
F. Pengujian Keabsahan Data 80

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 82

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 82
B. Sejarah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri 83
C. Standar Operasional Prosedur Dana Bergulir 84
D. Struktur Organisasi UPK PNPM Mandiri 92
E. Fungsi Pengurus-pengurus UPK Secara Umum 93
F. Tugas-tugas Pokok Pengurus UPK 97
G. Pembahasan Penelitian 98

BAB V : PENUTUP 123

A. Kesimpulan 123
B. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA 127

LAMPIRAN 130

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 142

DAFTAR TABEL

Tabel 1 perbandingan penelitian terdahulu 18

Tabel 2 kepengurusan UPK PNPM Kemranjen 92

Tabel 3 kelompok SPP Karanggintung 108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 prosedur pembentukan kelompok 107

Gambar 2 skema mekanisme perguliran pinjaman 114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Bank merupakan lembaga perantara dalam lembaga keuangan negara yang sangat berperan penting dalam suatu perekonomian negara. Undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang menejelaskan tentang pengertian bank sebagai berikut "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Sedangkan pengertian bank yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 dalam perubahan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan dimana dalam badan yang menghimpun dana dari masyarakat kedalam sebuah bentuk simpanan dan memberikannya kedalam bentuk kredit atau lainnya dan disalurkan kepada masyarakat agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada era sekarang sistem keuangan pada setiap masing-masing negara terdapat dalam perbankan khususnya bank umum. Adapun fungsinya adalah mencari serta menghimpun dana kedalam bentuk simpanan. Fungsi dari bank mempunyai pengaruh serta peranan penting baik dari kalangan atas, menengah maupun kebawah. Terjadinya kebutuhan dalam bank berguna sebagai penyimpanan modal dan penguatan uang di dalam masyarakat. Ketika menangani keperluan masyarakat bank memberikan rasa nyaman dan terjaminnya keamanan dalam melakukan transaksi perbankan. Kehadiran bank syariah memberikan solusi kepada masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan terhadap kegiatan perbankan.

Bank yang menggunakan perspektif islam didalam sistem ekonominya disebut juga dengan bank syariah yang merupakan salah satu produk perbankan. Menurut para pendiri dan pendukungnya nuansa yang religius yang berpacu pada dunia dan akhirat harus di bangun dalam

ekonomi islam, karena dengan begitu maka perbankan syariah tidak ada yang namanya riba atau bunga dalam pinjaman. Dalam islam riba merupakan perbuatan yang berdosa karena mengambil keuntungan dari pinjaman. Bank syariah sendiri mempunyai sistem yang disebut dengan "nisbah" atau sistem bagi hasil dimana di dalam proses tersebut pihak bank dan pihak nasabah mengetahui dan menyetujuinya. Prinsip yang digunakan dalam kegiatan bank syariah salah satunya adalah prinsip bagi hasil (mudharabah) yang sesuai dengan perspektif islam.

Di indonesia terdapat dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan adalah badan yang memiliki aktivitas atau kegiatan di bidang keuangan yang berperan untuk menarik uang serta menyalurkannya ke masyarakat. Meskipun sama-sama memiliki kegiatan untuk mengelola keuangan, lembaga keuangan bank dan non bank memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Secara umum lembaga keuangan bank memiliki peran untuk menerima dana danmemberi pinjaman untuk masyarakat. Sementara lembaga keuangan non bank memiliki peran dalam mengumpukan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahan yang butuh pinjaman. Jadi, UPK PNPM Mandiri Pedesaan merupakan lembaga keuangan bank karena UPK memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya .

Melihat kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditargetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan & memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di perdesaan, maka program ini telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan. Melalui PPK dan PNPM PPK (hingga 2007), PNPM Mandiri Perdesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 dolar AS dalam bentuk trust funds dan hibah dari berbagai negara/ lembaga penyandang dana. Hibah/ trust funds tersebut merupakan wujud dukungan dan kepercayaan atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini.

Sedangkan pengertian dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan merupakan lembaga keuangan yang menampung sarana kebutuhan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. UPK PNPM Mandiri Pedesaan berupaya dalam mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat pedesaan dan menjadi salah satu program pemberdayaan terbesar di indonesia.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) saling membantu dalam mengelola kegiatan usaha di kecamatan dan mengkoordinasi kegiatannya. Masyarakat yang terpilih atau diusulkan dalam musyawarah tingkat desa berhak menjadi anggota pengurus dalam Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK sendiri merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai tanggung jawab dalam menurunkan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja serta mensejahterakan perekonomian masyarakat. *(Pratama, 2018).*

PNPM Mandiri juga dikembangkan lagi menjadi Unit Pengelola Kegiatan, PNPM Mandiri sendiri merupakan program nasional yang berbasis dalam pemberdayaan yang memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan. Tujuan dari PNPM Mandiri Pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat. Produk dari PNPM Mandiri Pedesaan menyediakan program simpan pinjam untuk masyarakat. Dibentuknya lembaga keuangan PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan dapat mempercepat pengelolaan kegiatan yang lebih terintegrasi dan terus berkelanjutan. *(Jayadi, 2017:8).*

Dengan perkembangan lembaga keuangan PNPM Mandiri Pedesaan yang pesat dari tahun ke tahun dan tanpa adanya keluhan masalah dari masyarakat. Lembaga PNPM Mandiri Pedesaan berdiri sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 yang bergerak sekitar empat tahun. Karena adanya permintaan dari pemerintah untuk PNPM Mandiri Pedesaan dalam membentuk lembaga yang lebih khusus di setiap kecamatan dengan tujuan untuk menangani kemiskinan. PNPM Mandiri Pedesaan juga membuat lembaga khusus yang melanjutkan program kegiatannya yang disebut

dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Seluruh tugas dari PNPM Mandiri Pedesaan di pindahkan kepada UPK termasuk penyelesaian pembiayaan dan pengalokasian dana masyarakat yang berjalan sejak tahun 2014.

Kelanjutan dari program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) yaitu PNPM Mandiri Pedesaan yang dibangun sejak tahun 1999. PNPM Mandiri Pedesaan sendiri termasuk dalam program penanggulangan kemiskinan yang cepat dan aman serta memperluas kesempatan kerja di desa. *(Nasrin, dkk, 2019).* Pengembangan PNPM Mandiri Pedesaan sendiri dikukuhkan pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah oleh Presiden RI. *(Aprilliana, 2007).*

Dalam menjalankan tugasnya Unit Pengelola Kegiatan juga berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk lembaga keungan dimana UPK berkewajiban untuk berinovasi supaya tetap menjadi pilihan yang paling utama untuk masyarakat yang akan memanfaatkan dananya dalam kegiatan UPK. Dalam melaksanakan tugasnya hal yang paling penting untuk dilakukan UPK adalah menjaga komunikasi dengan pihak desa untuk melaporkan semua kegiatan yang dijalankan secara terbuka. Karena, jika ada salah satu masalah dengan komunikasi yang di jalin maka akan terjadi masalah baik terkait penyalahgunaan pihak yang merasa dirugikan. UPK berfokus kepada penyediaan pinjaman modal bagi masyarakat untu pengembangan ekonomi yang diterimanya secara bergulir dan berkelompok. Untuk menghindari penyalahgunaan dana dan meminimalkan resiko pembiayaan oleh ketua kelompok yang terjadi maka, disetujui delapan atura yang jelas dan harus dicapai dalam musyawarah antar desa. *(Pahruroji, 2019).*

Salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat adalah dibentuknya PNPM Mandiri Pedesaan untuk mengentas kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di pedesaan. Yang pada intinya program PNPM Mandiri bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan membuka lapangan pekerjaan di desa dan meningkatkan kemandirian dalam mengambil sebuah keputusan dan mengelolanya. Melalui program khusus

PNPM Mandiri beban masyarakat akan berkurang dengan perjanjian pinjaman untuk modal masyarakat tanpa jaminan atau agunan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari PNPM Mandiri adalah membangun kemandirian masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan untuk mensejahterakan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berikut ini beberapa pembiayaan yang di danai oleh PNPM Mandiri Pedesaan yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat yang kurang mampu, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan termasuk pelatihan ketrampilan masyarakat yang bersifat nonformal, mengembangkan kegiatan masyarakat yang memiliki usaha ekonomi khususnya kegiatan produksi yang bersumber dari daya lokal, penambahan modal bagi pelaku usaha anggota simpan pinjam perempuan.*(Rahayu, 2017 hal 3).*

Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian “Pinjaman” diistilahkan dengan kredit. Kredit merupakan peminjaman uang yang dilakukan oleh seseorang baik kepada individu maupun lembaga dengan suatu kesepakatan dan pengembaliannya dilakukan dengan cara mengangsur. Sedangkan “Pinjaman Bergulir”, menurut konteks PNPM Mandiri Perkotaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk memberikan modal kepada warga miskin melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran.

Masyarakat Di desa Karanggitung mayoritas bekerja sebagai penderes atau pencari legen yang kemudian diolah menjadi gula jawa, karena letak desa Karanggintung yang berada di dataran tinggi dan banyak ditumbuhi pohon kelapa menjadi sarana mata pencaharian warganya. Selain

pembuatan gula jawa banyak dari mereka juga yang bekerja dengan membuka usaha warung sembako dan ada juga yang membuat kerupuk dari bahan dari alam seperti singkong. Tetapi di daerah pedesaan seperti di Desa Karanggintung masih banyak sekali keterbatasan dalam mengembangkan bisnisnya antara lain adalah masalah permodalan. Keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat terkadang masih belum bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya hal tersebut pemerintahan desa bekerja sama dengan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha masyarakat. Program pembiayaan pinjaman bergulir ini sangat membantu dalam menambah modal usaha dan mengembangkan usaha masyarakatnya. Sehingga perekonomian di Desa Karanggintung mengalami perkembangan yang cukup baik daripada sebelumnya.

UPK PNPM Mandiri Pedesaan memiliki peran yang penting terhadap pembiayaan pinjaman bergulir dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Dari permasalahan ekonomi yang ada di desa Karanggintung yaitu kurangnya modal usaha untuk masyarakat dalam mengembangkan ekonominya UPK PNPM Mandiri Pedesaan memberikan solusi dengan cara mengadakan program pinjaman bergulir tanpa agunan. Dengan adanya pinjaman bergulir tanpa agunan meringankan masyarakat yang tidak mempunyai jaminan untuk melakukan pinjaman. Peran UPK PNPM Mandiri juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Dari pinjaman modal tersebut usaha yang dijalankan oleh masyarakat mampu berkembang, sebagai contoh usaha gula jawa dan warung sembako. Dengan adanya hal tersebut penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dari masalah yang ada di desa Karanggintung. Sehingga penulis tertarik membuat skripsi dengan judul "Peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Pembiayaan Pinjaman Bergulir (Studi

Kasus Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”

UPK PNPM Mandiri Pedesaan merupakan kegiatan yang didalam praktek simpan pinjamnya dapat diartikan sebagai al-qardh atau mengambil keuntungan. Didalam hadits juga disebutkan bahwa transaksi simpan pinjam atau utang piutang merupakan salah satu akad yang melibatkan dua orang atau lebih yang megarah pada prinsip pinjam meminjam yang didalamnya bukan bertujuan mendapat laba dari orang yang dipinjami. Karena pada dasarnya orang yang meminjami pahalanya lebih besar daripada shadaqah karena sudah membantu orang yang lebih membutuhkan. Sejak zaman Rasulullah SAW juga sudah ada akad Al-qardh bahkan Rasallullah SAW melakukan transaksi tersebut. Dalam fiqh klasik Al-qardh di kelompokkan dalam akad ta’awuni atau yang biasa disebut dengan tolong menolong, sebab dalam UPK PNPM Mandiri dana yang diberikan untuk menolong warga yang membutukan atau warga yang miskin.

Desa Karanggintung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, sedangkan letak geografis Desa Karanggintung berada di dataran tinggi atau pegunungan. Dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Karanggintung UPK PNPM Mandiri Pedesaan juga ikut berperan penting dalam menawarkan produk pembiayaan (pinjaman bergulir) tanpa agunan atau jaminan.

Di Desa Karanggintung sendiri terdapat 7 kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) atau anggota pinjaman tanpa agunan (jaminan). Mekanisme untuk melakukan transaksi pinjaman bergulir untuk anggota SPP adalah pinjaman modal awal sebagai anggota di beri dana sebesar Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu cicilan 12 bulan atau 1 tahun dan setoran per bulan sebesar Rp. 200.000, jika sudah melewati satu tahun dengan baik maka anggota kelompok dapat mengajukan modal pinjaman dengan jumlah kelipatannya secara bertahap. Misalnya pada satu tahun lalu sudah meminjam sebesar Rp. 2.000.000 maka tahun berikutnya bisa mengajukan

dana pinjaman sebesar Rp. 4.000.000. di dalam dana tersebut juga terdapat tabungan renteng dan tabungan pokok yang dimiliki oleh setiap anggota. Syarat awal pembentukan kelompok ini minimal 7 orang, syarat lainnya yang dibutuhkan adalah KK (Kartu Keluarga), KTP si suami (ahli waris) dan istri serta tanda tangan yang bersangkutan.

Pinjaman ini diberikan kepada masyarakat untuk modal usaha tanpa adanya agunan atau pinjaman yang memberatkan peminjam. Sebagai salah satu contoh satu anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang bernama kelompok manggis yang di ketuai oleh ibu Kamiyah yang beranggotakan 11 orang yang berbeda jumlah pinjamannya. Dari 11 anggota tersebut modal yang dipinjamkan oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Penyaluran modal tersebut kebanyakan digunakan untuk modal usaha warung sembako, usaha dagang dan pengolahan gula jawa. Dengan adanya pinjaman modal tersebut memudahkan anggota kelompok untuk lebih mengembangkan usahanya lagi guna mensejahterakan perekonomian masyarakat Desa Karanggintung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran UPK terhadap perekonomian masyarakat dan mekanisme pembiayaan (pinjaman bergulir) untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, oleh karena itu dengan adanya masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Pembiayaan Pinjaman Bergulir (Studi Kasus Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)".

B. Definisi Operasional

Dalam menghindari perbedaan berpendapat pembaca untuk memahami maknanya dari judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang penting yang terdapat dalam judul "Peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui

Penyaluran Pembiayaan Pinjaman Bergulir (Studi Kasus Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)". Maka ditegaskan istilah penting yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM.

   Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan merupakan lembaga keuangan yang menampung sarana kebutuhan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. UPK PNPM Mandiri Pedesaan berupaya dalam mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat pedesaan dan menjadi salah satu program pemberdayaan terbesar di indonesia.

   Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) saling membantu dalam mengelola kegiatan usaha di kecamatan dan mengkoordinasi kegiatannya. Masyarakat yang terpilih atau diusulkan dalam musyawarah tingkat desa berhak menjadi anggota pengurus dalam Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK sendiri merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai tanggung jawab dalam menurunkan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja serta mensejahterakan perekonomian masyarakat. *(Pratama, 2018).*

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

   PNPM Mandiri juga dikembangkan lagi menjadi Unit Pengelola Kegiatan, PNPM Mandiri sendiri merupakan program nasional yang berbasis dalam pemberdayaan yang memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan. Tujuan dari PNPM Mandiri Pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat. Produk dari PNPM Mandiri Pedesaan menyediakan program simpan pinjam untuk masyarakat. Dibentuknya lembaga keuangan PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan dapat mempercepat pengelolaan kegiatan yang lebih terintegrasi dan terus berkelanjutan. *(Jayadi, 2017:8).*

   Dengan perkembangan lembaga keuangan PNPM Mandiri Pedesaan yang pesat dari tahun ke tahun dan tanpa adanya keluhan masalah dari

masyarakat. Lembaga PNPM Mandiri Pedesaan berdiri sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 yang bergerak sekitar empat tahun. Karena adanya permintaan dari pemerintah untuk PNPM Mandiri Pedesaan dalam membentuk lembaga yang lebih khusus di setiap kecamatan dengan tujuan untuk menangani kemiskinan. PNPM Mandiri Pedesaan juga membuat lembaga khusus yang melanjutkan program kegiatannya yang disebut dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Seluruh tugas dari PNPM Mandiri Pedesaan di pindahkan kepada UPK termasuk penyelesaian pembiayaan dan pengalokasian dana masyarakat yang berjalan sejak tahun 2014.

Kelanjutan dari program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) yaitu PNPM Mandiri Pedesaan yang dibangun sejak tahun 1999. PNPM Mandiri Pedesaan sendiri termasuk dalam program penanggulangan kemiskinan yang cepat dan aman serta memperluas kesempatan kerja di desa. *(Nasrin, dkk, 2019).* Pengembangan PNPM Mandiri Pedesaan sendiri dikukuhkan pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah oleh Presiden RI. *(Aprilliana, 2007).*

3. Pembiayaan (pinjaman bergulir).

Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian “Pinjaman” diistilahkan dengan kredit. Kredit merupakan peminjaman uang yang dilakukan oleh seseorang baik kepada individu maupun lembaga dengan suatu kesepakatan dan pengembaliannya dilakukan dengan cara mengangsur. Sedangkan “Pinjaman Bergulir”, menurut konteks PNPM Mandiri Perkotaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk memberikan modal kepada warga

miskin melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran.

Dalam menjalankan tugasnya Unit Pengelola Kegiatan juga berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk lembaga keungan dimana UPK berkewajiban untuk berinovasi supaya tetap menjadi pilihan yang paling utama untuk masyarakat yang akan memanfaatkan dananya dalam kegiatan UPK. Dalam melaksanakan tugasnya hal yang paling penting untuk dilakukan UPK adalah menjaga komunikasi dengan pihak desa untuk melaporkan semua kegiatan yang dijalankan secara terbuka. Karena, jika ada salah satu masalah dengan komunikasi yang di jalin maka akan terjadi masalah baik terkait penyalahgunaan pihak yang merasa dirugikan. UPK berfokus kepada penyediaan pinjaman modal bagi masyarakat untu pengembangan ekonomi yang diterimanya secara bergulir dan berkelompok. Untuk menghindari penyalahgunaan dana dan meminimalkan resiko pembiayaan oleh ketua kelompok yang terjadi maka, disetujui delapan atura yang jelas dan harus dicapai dalam musyawarah antar desa. *(Pahruroji, 2019).*

Salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat adalah dibentuknya PNPM Mandiri Pedesaan untuk mengentas kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di pedesaan. Yang pada intinya program PNPM Mandiri bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan membuka lapangan pekerjaan di desa dan meningkatkan kemandirian dalam mengambil sebuah keputusan dan mengelolanya. Melalui program khusus PNPM Mandiri beban masyarakat akan berkurang dengan perjanjian pinjaman untuk modal masyarakat tanpa jaminan atau agunan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari PNPM Mandiri adalah membangun kemandirian masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan untuk mensejahterakan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berikut ini beberapa pembiayaan yang di

danai oleh PNPM Mandiri Pedesaan yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat yang kurang mampu, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan termasuk pelatihan ketrampilan masyarakat yang bersifat nonformal, mengembangkan kegiatan masyarakat yang memiliki usaha ekonomi khususnya kegiatan produksi yang bersumber dari daya lokal, penambahan modal bagi pelaku usaha anggota simpan pinjam perempuan.*(Rahayu, 2017 hal 3).*

4. Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

   Program Simpan Pinjam kelompok Perempuan ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan secara khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan *(Dirjenpemdes, 2014).*

   Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu pemberdayaan perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, yaitu melalui pemberdayaan kelompok dalam mengelola dana pinjaman bergulir, yang bertujuan untuk mempermudah akses dengan pinjaman tanpa jaminan, mempunyai aturan sendiri, berpihak kepada orang miskin, masyarakat langsung dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan tersebut.

5. Dalam islam.

kegiatan UPK PNPM Mandiri Pedesaan merupakan kegiatan yang didalam praktek simpan pinjamnya dapat diartikan sebagai al-qardh mengambil keuntungan. Didalam hadits juga disebutkan bahwa transaksi simpan pinjam atau utang piutang merupakan salah satu akad yang melibatkan dua orang atau lebih yang megarah pada prinsip pinjam meminjam yang didalamnya bukan bertujuan mendapat laba dari orang yang dipinjami. Karena pada dasarnya orang yang meminjami pahalanya lebih besar daripada shadaqah karena sudah membantu orang yang lebih membutuhkan. Sejak zaman Rasulullah SAW juga sudah ada akad Al-qardh bahkan Rasallullah SAW melakukan transaksi tersebut. Dalam fiqh klasik Al-qardh di kelompokkan dalam akad ta'awuni atau yang biasa disebut dengan tolong menolong, sebab dalam UPK PNPM Mandiri dana yang diberikan untuk menolong warga yang membutukan atau warga yang miskin.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan pinjaman bergulir?
2. Bagaimana analisis ekonomi islam terhadap mekanisme penyaluran pembiayaan pinjaman bergulir pada UPK PNPM Mandiri Pedesaan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan pinjaman bergulir.
2. Untuk mengetahui analisis ekonomi islam terhadap mekanisme pembiayaan pinjaman bergulir UPK PNPM Mandiri Pedesaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendapat informasi dan memberikan pemahaman terhadap peran dan pengelolaan pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan. Selain itu Penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk peneliti yang lain dalam meneliti permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis/Aplikatif

   a. Bagi penulis

      Diharapkan penulis bisa menambah pengetahuan tentang topik yang diteliti serta menambah wawasan tentang materi peran UPK terhadap pinjaman bergulir untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.

   b. Bagi FEBI

      Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan tambahan berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan sebagai rujukan peneliti selanjutnya.

   c. Bagi UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen

      Penelitin ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi UPK PNPM Mandiri Pedesaan mengenai peran terhadap pinjaman bergulir untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Skripsi ini tentunya berkaitan dari penelitian terdahulu yang akan di jadikan pedoman dan referensi untuk penulis, yang dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Jurnal oleh Siti Nurhaliza pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul "Peran Pengelola Kegiatan (UPK) Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dalam Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa". Berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah UPK PNPM Mandiri berperan dalam usaha mengembangkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan bantuan modal usaha melalui pembiayaan untuk meningkatkan penghasilan. Ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa pinjaman modal usaha yang diberikan oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan dan juga kredit macet serta pencairan dana yang terlambat. *(Nurhalizah, 2019).* Dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengembangkan beberapa kasus yang ada di dalam penelitian tersebut. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan.

Kedua, Jurnal oleh Siti Aisyah pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul "Peran Unit Pemgelola Kegiatan (UPK) Syariah pada Penyaluran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya" Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pinjaman modal usaha yang diberikan oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan dapat memacu masyarakat untuk membuka usahanya dengan baik sesuai dengan program yang direncanakan. Adapun tujuan lain adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat serta mengatasi kemiskinan. *(Aisyah, 2019).* Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mebahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang tujuannya yaitu pemberdayaan masyarakatnya, sedangkan penulis sendiri memembahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam pembiayaan (pinjaman bergulir) terhadap pengembangan perekonomian masyarakat desa karanggintung kecamatan kemranjen kabupaten banyumas.

Ketiga, Jurnal oleh Miftahul Khairi pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul "Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Mengembangkan Perekonomian di Desa Pembuang Hulu" Hasil dari

penelitian ini adalah dalam melaksanakan kegiatan UPK anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga ikut berperan, laki-laki dan perempuan juga mempunyai perannya masing-masing dalam menikmati manfaatnya. UPK juga dikelola secara mandiri dan program UPK mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan menciptakan banyak kesempatan kerja di desa Pembuang Hulu. *(Khairi, 2019).* Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas peranan dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan. Sedangkan untuk perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang dampak dari program pembangunan perekonomian sedangkan penulis membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam pembiayaan (pinjaman bergulir) terhadap pengembangan perekonomian masyarakat desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Keempat, Jurnal oleh Marina sinaga pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul "Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir" hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya program UPK PNPM Mandiri Pedesaan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dalam ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan berbagai potensi yang berada di alam yang dimiliki Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Pemerintah dan masyarakat tentunya harus bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan memajukannya. *(Sinaga, 2018)*. Penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama mebahas peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan. Sedangkan untuk perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan ini membahas tentang dampak dari program UPK PNPM Mandiri Pedesaan untuk membangun kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, sedangkan penulis membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam pembiayaan (pinjaman bergulir) terhadap pengembangan perekonomian

masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Kelima, Jurnal oleh Ratna Wati pada tahun 2021 yang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus UPK PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan" berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat Kluet Utara UPK PNPM Mandiri Pedesaan memiliki program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam menjalankan programnya juga tidak terlepas dari hambatan yang dialami tetapi UPK juga memberikan solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut yang terpenting adalah hambatan yang dialami oleh nasabah yang macet atau bermasalah *(Wati, 2021).* Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan, sedangkan perbedaannya adalah hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan perekonomian masyarakat Kluet Utara UPK PNPM Mandiri Pedesaan, sedangkan penulis membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam pembiayaan (pinjaman bergulir) terhadap pengembangan perekonomian masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Keenam, Jurnal oleh Lusna Wati pada tahun 2019 yang melakukan penelitian berjudul "Peran PNPM-MP terhadap Perekonomian Masyarakat Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat" Berdasarkan hasil penelitian ini adalah dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi program PNPM-MP memanfaatkannya dengan memberikan energi positif untuk masyarakat dalam membangun desa yang produktif. Dengan adanya teknologi ini maka desa mampu bersaing melalui kemampuan yang dapat mendorong perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera *(Wati L, 2019).* Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih

menitikberatkan kepada teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program dari PNPM-MP dalam membangun desa yang lebih produktif dan sejahtera, sedangkan penulis membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam pembiayaan (pinjaman bergulir) terhadap pengembangan perekonomian masyarakat desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Tabel 1.

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nurhalizah	Peran Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dalam Meningkatkan Ekonomi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Tahun 2019)	hasil penelitian ini adalah UPK PNPM Mandiri berperan dalam usaha mengembangkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan bantuan modal usaha melalui pembiayaan untuk meningkatkan penghasilan. Ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran	Sama-sama mebahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan	-lokasi -pengembangan beberap topik kasus penelitian sebelumnya

			masyarakat untuk menggunakan jasa pinjaman modal usaha yang diberikan oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan dan juga kredit macet serta pencairan dana yang terlambat.		
2.	Siti Aisyah	Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah pada Penyaluran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya (Tahun 2019)	hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pinjaman modal usaha yang diberikan oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan dapat memacu masyarakat untuk membuka usahanya dengan baik sesuai dengan program yang direncanakan. Adapun tujuan lain adalah untuk	Sama-sama membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan	-Lokasi -penelitian ini membahas tentang tujuannya yaitu pemberdayaan masyarakatnya, -penulis sendiri memembahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam pembiayaan (pinjaman bergulir) terhadap pengembangan perekonomian masyarakat

			mensejahterakan kehidupan masyarakat serta mengatasi kemiskinan.		desa karanggintung kecamatan kemranjen kabupaten banyumas.
3.	Miftahul Khairi	Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Mengembangkan perekonomian di Desa Pembuang Hulu (2019)	Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan kegiatan UPK anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga ikut berperan, laki-laki dan perempuan juga mempunyai perannya masing-masing dalam menikmati manfaatnya. UPK juga dikelola secara mandiri dan program UPK mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan	Sama-sama membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan	-Lokasi -penelitian ini membahas tentang dampak dari program pembangunan perekonomian - penulis membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam pembiayaan (pinjaman bergulir) terhadap pengembangan perekonomian masyarakat desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen

			menciptakan banyak kesempatan kerja di desa Pembuang Hulu.		Kabupaten Banyumas.
4.	Marlina Sinaga	Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir (Tahun 2018)	hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya program UPK PNPM Mandiri Pedesaan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dalam ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan berbagai potensi yang berada di alam yang dimiliki Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Pemerintah dan masyarakat tentunya harus bekerja sama	Sama-sama membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan	-Lokasi -penelitian yang dilakukan ini membahas tentang dampak dari program UPK PNPM Mandiri Pedesaan untuk membangun kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, -penulis membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam pembiayaan (pinjaman bergulir)

			dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan memajukannya.		terhadap pengembangan perekonomian masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
5.	Ratna Wati	Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus UPK PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan) (Tahun 2021)	hasil penelitian ini adalah dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat Kluet Utara UPK PNPM Mandiri Pedesaan memiliki program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam menjalankan programnya juga tidak terlepas dari hambatan yang dialami tetapi UPK juga memberikan solusi untuk menyelesaikan	Sama-sama membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan	-Lokasi - perbedaannya adalah hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan perekonomian masyarakat Kluet Utara UPK PNPM Mandiri Pedesaan, -penulis membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam pembiayaan (pinjaman

			hambatan tersebut yang terpenting adalah hambatan yang dialami oleh nasabah yang macet atau bermasalah		bergulir) terhadap pengembangan perekonomian masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
6.	Lusna Wati	Peran PNPM-MP terhadap Perekonomian Masyarakat Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tahun 2019)	hasil penelitian ini adalah dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi program PNPM-MP memanfaatkannya dengan memberikan energi positif untuk masyarakat dalam membangun desa yang produktif. Dengan adanya teknologi ini maka desa mampu	Sama-sama membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan	-Lokasi -perbedaannya adalah penelitian ini lebih menitikberatkan kepada teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program dari PNPM-MP dalam membangun desa yang lebih produktif dan sejahtera,

			bersaing melalui kemampuan yang dapat mendorong perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera.		-penulis membahas tentang peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam pembiayaan (pinjaman bergulir) terhadap pengembangan perekonomian masyarakat desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Dalam sebuah upaya untuk melakukan penelitian maka dibutuhkan sebuah panduan serta dukungan untuk setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang akan berkaitan dengan sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan posisi peneliti dengan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhalizah tahun 2019 bahwa peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan dapat memacu masyarakat untuk membuka usahanya dengan baik sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupa masyarakat. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan memberikan bantuan modal usaha melalui pembiayaan untuk meningkatkan penghasilan. Dengan adanya hal tersebut menegaskan bahwa penulis menyetujui tentang penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhalizah, hal tersebut tidak terlepas dari sejarah terbentuknya UPK PNPM Mandiri dan beberapa jurnal yang ada.

Jadi, pembaharuan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu membahas tentang peranan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap perkembangan ekonomi, dan beberapa ada yang membahas tentang pinjaman bergulir kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sedangkan dengan penelitian ini penulis dapat mengembangkan beberapa kasus yang ada di dalam penelitian tersebut. Seperti contoh pengembangan tentang mekanisme pinjaman bergulir, syarat-syarat pengajuan pinjaman bergulir, dan peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

1. Pengertian Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Unit Pengelola Kegiatan atau singkatan dari UPK merupakan unit yang membantu BKAD dalam mengoordinasi kegiatan yang ada di kecamatan dan mengoperasionalkan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di kecamatan. Pengelola/Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terbentuk dari hasil musyawarah desa yang dipilih/di ajukan oleh anggota masyarakat yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara. UPK PNPM-MP merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang dijadikan sebagai wadah sarana kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri memiliki tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi dan mengatasi kemiskinan dalam masyarakat, UPK PNPM-MP juga merupakan salah satu lembaga keuangan program pemberdayaan yang terbesar di indonesia.

UPK PNPM-MP dan Badan Kerjasama Antar Desa atau yang biasa disebut (BKAD) juga saling membantu dalam mengelola kegiatan usaha di kecamatan dan mengkoordinasi kegiatannya. Masyarakat yang terpilih atau diusulkan dalam musyawarah tingkat desa berhak menjadi anggota pengurus dari UPK PNPM-MP. UPK sendiri merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai tanggung jawab dalam menurunkan kemiskinan dan memperluas kesemppatan kerja serta dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat *(Pratama, 2018).*

2. Tugas dan Unit Pengelola Kegiatan.

Lembaga UPK secara umum memiliki tugas sebagai berikut:

a. Bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap setiap anggota kelompok peminjam.
b. Bertugas untuk melakukan sosialisasi dan penerapan terhadap prinsip-prinsip PNPM-MP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM-MP bersama dengan anggota pelaku lainnya.
c. Bertugas untuk membuat perencanaan keuangan dan membuat rencana kerja yang selaras dengan kepentingn program yang disampaikan oleh BKAD/MAD.
d. Bertugas untuk melakukan pelaporan dan administrasi setiap ada transaksi baik berupa transaksi keuangan maupun transaksi non-keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan program yang dijalankan.
e. Bertugas untuk membuat peraturan pinjaman bergulir yang sesuai dengan mekanisme dan prinsip dari PNPM Mandiri Pedesaan oleh BKAD/MAD untuk kemudian di sahkan dan menegakkan peraturan tersebut dalam setiap pelaksanaan yang bertujuan untuk melestarikan dan bergulir.
f. Bertugas untuk melakukan fasilitasi dengan anggota lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-MP.
g. Bertugas untuk menyiapkan dukungan secara teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak lain dengan pengembangan potensi yang ada di wilayah.
h. Bertugas untuk melakukan pengokohan kelompok peminjam dalam berbagai proses seperti kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, serta untuk memfasilitasi pengembanga usaha masyarakat atau kelompok.

i. Bertugas untuk membantu dalah hal pengembangan jumlah anggota program melalui beberapa cara yaitu dengan pelatihan, bimbingan di lapangan, dan pendampingan setiap ada kegiatan PNPM-MP.

j. Bertugas untuk mendorong transparansi dalam pengolahan keuangan, pengolahan pinjaman, pengembangan program dan informasi-informasi terkait lainnya melalui sarana papan informasi dan penyampaian secara langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

k. Bertugas untuk membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada anggota di desa yang terkait langsung satu minggu sebelum dilakukan pelaksanaan.

l. Bertugas untuk melakukan bimbingan secara teknis dan pemerksiaan administrasi secara langsung dan yang terakhir pelaporan anggota desa.

m. Bertugas untuk melakukan evaluasi serta pemeriksaan yang dilakukan secara langsung Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penggunaan Dana yang dibuat oleh pihak desa yang dilakukan setiap tahun dalam proses PNPM-MP yang sesuai dengan ketetapan yang ada.

3. Tanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara umum memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memiliki tanggung jawab terhadap pengelolan kegiatan dana bergulir.

b. Memiliki tanggung jawab pada semua kegiatan pengolahan dana pada PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di kecamatan.

c. Memiliki tanggung jawab pada kegiatan pengolahan administrasi serta semua laporan transaksi kegiatan pada PNPM Mandiri Pedesaan.
d. Memiliki tanggung jawab pada kegiatan pengolahan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik kegiatan pengelolaan dalam bidang keuangan ataupun kegiatan pengelolaan yang bersifat non-keuangan.

4. Keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Keberadaan UPK PNPM-MP adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut menjadi acuan terhadap berakhirnya kegiatan PNPM-MP yang ditetapkan pada tahun 2015, UPK PNPM-MP yang bertugas sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang memiliki rintangan dalam mempertahankan keberadaannya agar tetap eksis ditengah-tengah masyarakat, yang selama ini telah menjadi pemberi manfaat dari pinjaman bergulir yang dikelola oleh UPK. Dengan adanya hal tersebut menjadi tolak ukur bagi UPK bagaimana cara agar UPK nantinya mampu mengembangkan modal atau bahkan menambah surplus bagi UPK itu sendiri. Pada tahun 2015 dengan dibentuknya UPK maka muncul rencana supaya UPK beralih menjadi BUM Des, Koperasi, atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal tersebut berdasarkan dengan adanya pasal yang berada pada beberapa pasal pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,yang telah memberikan wewenang penuh bagi pihak desa dalam kegiatan pengelolaan dana yang bersumber pada APBN secara langsung.

Jadi, apapun nama lembaga keuangan nantinya, Unit Pengelola Kegiatan tetap harus memiliki eksistensinya yang asli sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbeda dari lembaga keuangan lainnya. Di dalam hal ini wajib hukumnya bagi Unit Pengelola Kegiatan supaya bisa membuat ide baru agar tetap bisa menjadi penarik para anggota yang

akan menggunakan jasanya yang sudah ikut serta dalam pelaksanaan program dana bergulir yang ada di UPK PNPM-MP. Sedangkan untuk kedepannya Unit Pengelola Kegiatan harus selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak/pemerintah desa, supaya apabila pemerintahan desa di masa yang akan datang akan membangun badan usaha yang tidak jauh berbeda dengan program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) maka dari sinilah tidak akn ada perseteruan terkait dengan memanfaatkan programnya dan tidak ada yang dirugikan dalam hal ini.

Hal tersebut yang mampu memberi energi dengan UPK PNPM-MP dimana salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan perekonomian yang ada di pedesaan dengan cara memberikan pinjaman bergulir untuk modal usaha untuk diberikan dengan sistem kelompok dengan tanpa adanya jaminan/agunan. Adanya sistem tanpa jaminan ini, maka lebih banyak pengurus kelompok yang menyalahgunakan wewenang dengan cara menggelapkan dana Simpan Pinjam Perempuan hingga ratusan juta rupiah. Maka dari itu perlu untuk membuat dan menyepakati aturan-aturan yang dibuat secara tegas dan jelas dalam Musyawarah Antar Desa (MAD), bahwa anggota kelompok harus memberikan jaminan berupa barang maupun harta walaupun hanya dalam surat pernyataan yang bermaterai, hal ini berlaku untuk semua anggota kelompok maupung pengurus dari kelompok tersebut. Dengan demikian maka dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dana anggota SPP ataupun program pinjaman yang dilaksanakan oleh ketua kelompok dan anggota kelompok.

Adanya fasilitas pinjaman bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menjadi bukti bahwa banyak ekonomi maupun usaha masyarakat yang berkembang dan selalu naik. Dengan sistem kelompok memberi keistimewaan dari segi perencanaan usaha, pengendalian keuangan, pengembangan usaha serta pembinaan terhadap kapasitas kelompok yang lebih intensif dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) maupun lembaga keuangan yang lain.

Disamping menjalin hubungan dengan pihak desa, sebagai pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) juga harus berasal dari orang-orang yang memang fokus bekerja di Unit Pengelola Kegiatan (UPK), bukan hanya untuk pekerjaan sampingan saja.

Dalam menjalankan tugasnya Unit Pengelola Kegiatan juga berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk lembaga keuangan dimana UPK berkewajiban untuk berinovasi supaya tetap menjadi pilihan yang paling utama untuk masyarakat yang akan memanfaatkan dananya dalam kegiatan UPK. Dalam melaksanakan tugasnya hal yang paling penting untuk dilakukan UPK adalah menjaga komunikasi dengan pihak desa untuk melaporkan semua kegiatan yang dijalankan secara terbuka. Karena, jika ada salah satu masalah dengan komunikasi yang di jalin maka akan terjadi masalah baik terkait penyalahgunaan pihak yang merasa dirugikan. UPK berfokus kepada penyediaan pinjaman modal bagi masyarakat untuk pengembangan ekonomi yang diterimanya secara bergulir dan berkelompok. Untuk menghindari penyalahgunaan dana dan meminimalkan resiko pembiayaan oleh ketua kelompok yang yang terjadi maka, disetujui delapan aturan yang jelas dan harus dicapai dalam musyawarah antar desa. *(Pahruroji, 2019).*

5. Kegiatan yang ada dalam Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK PNPM-MP adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat sebagai contoh adalah perbaikan jalan.
b. Kegiatan Ekonomi untuk ibu-ibu atau yang biasa disebut dengan anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dalam bidang sosial, pendidikan dan kesehatan.
c. Dalam kegitan ekonomi yaitu salah satunya adalah untuk membantu menciptakan usaha.

B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

1. Pengertian PNPM Mandiri

PNPM-MP merupakan singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang maknanya merupakan kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat yang kemudian dilakukan oleh PNPM-MP dalam berusaha agar percepatan penanganan warga miskin yang terlah terjadi dan untuk memperluas kesempatan kerja di pedesaan.

PNPM Mandiri pedesaan telah berlangsung sejak tahun 2007, yang awal mulanya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), PPK Dan P2KP berhasil menjadi contoh model dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat di pedesaan maupun perkotaan pada PNPM Mandiri. PNPM-MP ditujukan agar menjadi pengayom program penanganan kemiskinan dengan cara pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

PNPM-MP merupakan salah satu cara dari program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya untuk lebih mempercepat penanganan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di pedesaan. PNPM-MP menjalankan penuh cara dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah berdiri sejak tahun 1998. PNPM-MP secara resmi di kukuhkan pada 30 April 2007 di kota palu, Sulawesi Tengah oleh Presiden RI.

Secara umum Program Nasional Pemberdayaan masyarakat ini dapat disebut dengan program pemberdayaan yang paling besar di indonesia. Di dalam pelaksanaannya, program kegiatan ini mengarahkan kepada masyarakat miskin di indonesia pada wilayah pedesaan. Program ini juga memberikan sarana pemberdayaan masyarakat, pendampingan, pelatihan, serta dana bantuan langsung untuk masyarakat atau yang biasa di sebut dengan BLM. Besar kecilnya

dana BLM yang diberikan sebesar Rp 750 juta- Rp 3 miliar setiap kecamatan, berdasarkan jumlah penduduknya.

Pada PNPM-MP seluruh anggota yang ikut serta terlibat maka semua harus ikut berpartisipasi dalam kegiatannya, yang awalnya dimulai dari proses merencanakan, mengambil keputusan dalam pemanfaatannya dan mengelola dana sesuai dengan kebutuhan yang utama di desa, serta sampai akhir proses dari pelaksanaan seluruh kegiatannya.

Dalam menjalankan PNPM-MP diawasi dan dibina oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementrian dalam negeri. Program kegiatan ini berasal dari pembiayaan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau biasa yang disebut dengan APBN, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang biasa disebut dengan APBD, dana bantuan dari luar negara dari beberapa lembaga yang dinaungi oleh Bank Dunia.

PNPM-MP juga secara sukarela bersedia untuk menyediakan dana langsung yang berasal dari APBN dan APBD yang kemudian di kirimkan ke rekening secara bersama desa di kecamatan. Dengan dana tersebut desa dapat menggunakannya untuk membangun sarana dan prasarana penopang kegiatan di desa, menyalurkan sebagai dana bergulir bagi kelompok ekonomi sebagai modal usahanya, atau juga bisa disalurkan dalam kegiatan sosial seperti untuk pendidikan dan kesehatan. Penyaluran dana yang di terima oleh masyarakat desa harus sesuai dengan dokumen-dokumen yang dikirimkan ke pusat agar lebih mudah untuk mengontrolnya. Dalam hal ini warga desa di kecamatan mendapat peningkatan wadah dalam pembukuan, memanajemen data, dan yang lainnya terikat dengan upaya membangun manusia dan pengelolaan pembangunan di pedesaan.

Dalam menjalankan tugasnya, penyaluran dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat atau yang biasa disebut dengan BLM PNPM-MP dilakukan melalui strktur pembiayaan bersama antar Pemerintahan

Pusat dan Pemerintahan Daerah, seperti contoh yang berhasil dalam PPK III tahun 2005-2007 dan PNPM-PPK pada tahun 2007. Besarnya pembiayaan bersama sesuai dengan kemampuan daerah tersebut, yang sudah ada ketentuan peraturannya pada Peraturan Menteri Keuangan atau yang disebut dengan PMK Pada UU No. 73/PMK.02 tahun 2006 pada 30-08-2006.

Dengan adanya program PNPM-MP Pedesaan yang difokuskan pada percepatan penanganan masyarakat miskin serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dengan demikian kegiatan PNPM Mandiri ini mengambil pembiayaan dana bantuan yang sangat tinggi dari beberapa lembaga keuangan dan negara lain yang memberi bantuan. Dengan cara PNPM PPK dan PPK yang dijalankan sampai tahun 2007, PNPM MP telah mengumpulkan dana lebih dar 168,3 dolar AS yang berbentuk trust funds dan bantuan dari sejumlah negara lain dan lembaga yang memberi bantuan. Bantuan ini adalah bentuk pemberi dorongan dan memberi kepercayaan atas kejayaan program Pemberdayaan terbesar bagi masyarakat di indonesia.

Cakupan wilayah dari PNPM-MP selama proses pelaksanaannya PPK yang pertama ada PPK I, kedua ada PPK II, ketiga ada PPK III dan yang terakhir ada PNPM PPK yang telah terlaksana sejak tahun 1998 sampai tahun 2007, program pemberdayaan yang merupakan program terbesar di indonesia ini telah mengait hampir separuh lebih desa yang miskin di tanah air. Pelaksanaan PNPM-PPK pada tahun 2007 mamp menjangkau 26.724 desa di 1.837 kecamatan dan pada 32 provinsi. Sedangkan untuk tahun 2008 PNPM-MP mamp menjangkau 34.031 desa dari 2.230 kecamatan yang ada di 32 provinsi di indonesia. Untuk tahn 2009 mencapai jumlah 50.201 desa dari 3.908 kecamatan. Jumlah diatas termasuk desa yang di berikan dana dari program lain yang menempel pada PNPM-MP, seperti contoh PNPM Generasi Sehat dan Cerdas, selanjutnya ada PNPM Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias, selanjutnya ada PNPM Rencana Strategis Pembangunan

Kampung, selanjutnya ada PNPM Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif dan yang lainnya.

2. Jenis-jenis PNPM Mandiri

Program PNPM-MP yang dibuat oleh pemerintah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu *(Departemen Dalam Negeri Tahun, 2008):*

a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

PNPM-MP merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh program pemberdayaan masyarakat yang di gunakan dalam berupaya mempercepat penanganan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di pedesaan.

b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan

Program Penangglangan Kemiskinan Perkotaan atau biasa yang disebut dengan P2KP berdiri sejak tahun 1999 yang berdasar pada Surat Keputusan Menteri Pekerja Umum Nomor 33/KPTS/1999 yang berisi tentang susunan organisasi dan tata letak hubungan kerja program manajemen unit P2KP yang di lakukan oleh Ditjen Perumahan dan Pemukiman. Lalu program ini mengganti namanya menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sejak tahun 2008.

c. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal.

PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Daerah Tertinggal mempunyai tujuan untuk mempercepat proses pertumbuhan sosial ekonomi daerah khusus dan tertinggal dengan cara mengembangkan wadah Pemerintahan Daerah, masyarakat dan dari segi sektor swasta daam melaksanakan pengembangan di daerah tersebut.

3. Visi dan Misi dari PNPM Mandiri Pedesaan

Visi dari PNPM-MP bertujuan dalam mensejahterakan maupun masyarakat mandiri yang kurang mampu di desa. Kesejahteraan masyarakat bisa sebagai pemenuhan kebutuhan yang mendasar bagi warga. Selain itu kemandirian memiliki arti yaitu mampu merancangkan diri agar mampu mengembangkan sumber daya yang ada di lingkungan pedesaan, serta dapat melaksanakan pengelolaan sumber daya tersebut untuk kemudian mampu menangani kemiskinan.

Sedangkan untuk Misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan semua sistem lemabaganya.
b. Melembagakan sistem pembangunan pastisipatif.
c. Mengefektifkan fungsi serta peran pemerintahan lokal.
d. Meningkatkan kualitas serta kuantitas prasarana sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
e. Mengembangkan jaringan mitra dalam proses pembangunan.

4. Prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan

Dalam melakukan pelaksanaan dan prosesnya, program kegiatan ini mampu menampakkan kegiatan bagi masyarakat indonesia miskin di wilayah pedesaan. Program kegiatan ini mampu menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas sebagai berikut ini:

a. Memberikan fasilitas Pemberdayaan Masyarakat atau Lembaga Lokal.
b. Memberikan pendampingan.
c. Memberikan pelatihan.
d. Dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) untuk masyarakat. Jumlah dana yang di berikan yaitu sebesar Rp 750 juta-Rp 3 miliar setiap kecamatan, sesuai dengan jumlah penduduknya.

Prinsip-prinsip yang ada di PNPM-MP dikenal dengan sebutan SiKOMPAK. Hal ini selain memiliki arti yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dalam arti harafiah juga mampu mengajak masyarakat agar lebih kompak dalam mendukung upaya penanganan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di pedesaan. Dengan adanya SiKOMPAK ini memberi harapan supaya kemandirin di desa dapat terwujud. Demikianlah pembahasan mengenai Pengertian serta Fungsi pokok dari PNPM-MP.

Dalam melaksanakan program ini, PNPM Mandiri Pedesaan mendasarkan pada prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari:

a. Transparansi dan akuntabilitas

   Yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas adalah masyarakat harus memiliki akses yang mencukupi terhadap seluruh informasi danproses mengambil keputusan, dengan demikian pengolahan kegiatan dapat dilakukan secara tranparan/terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan dan dapat digugatkan baik secara moral, teknis, legal ataupun administratif.

b. Desentralisasi

   Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah wewenang pengolahan kegiatan pembangunan sektor maupun wilayah di berikan kepada pemerintahan daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitas.

c. Berpihak pada masyarakat miskin

   Yang dimaksud dengan berpihak pada masyarakat miskin adalah semua kegiatan yang dilakukan lebih mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat miskin dan anggota kelompok masyarakat yang krang beruntung.

d. Otonomi

Yang dimaksud dengan Otonomi adalah masyarakat akan di beri wewenang secara pribadi agar mampu berpartisipasi dalam menentukan maupun mengelola kegiatan pembangunan.

e. Keterlibatan masyarakat

Yang dimaksud dengan keterlibatan masyarakat adalah secara aktif maka masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam setiap proses kegiatan pengambilan keputusan dan secara gotong royong melakukak pembangunan.

f. Prioritas usulan

Yang dimaksud dengan prioritas usulan adalah masyarakat dan pemerintah wajib mengutamakan pemenuhan kebutuhan untuk mengentas kemiskinan, kegiatan yang bersifat mendesak dan dapat bermanfaat bagi banyak masyarakat, dengan pemberdayaan secara optimal.

g. Kesetaraan dan keadilan gender

Yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan gender adalah laki-laki maupun perempuan memiliki keseimbangan dalam menjalankan perannya dalam setiap tahapan pembangunan dan juga dalam menikmati manfaat dari kegiatan tersebut dengan adil.

h. Kolaborasi

Yang dimaksud dengan Kolaborasi adalah semua pihak yang terkait dalam penanganan kemiskinan di dorong agar dapat menciptakan kerjasama yang bersinergi antar pihak yang berkepentingan dalam menanggulangi kemiskinan.

i. Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah dalah seluruh kegiatan pengambilan keputsan harus mempertimbangkan beberapa kepentingan dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga di masa yang akan datang, dengan cara melestarikan lingkungan masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip yang lain dari PNPM Mandiri Pedesaan adalah sebagai berikut:

a. Berdasar pada pembangunan manusia/masyarakat

   Seluruh kegiatan PNPM-MP ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia agar lebih tinggi dan utuh.

b. Bersifat Demokratis

   Setiap keputusan pembangunan yang di ambil maka akan dilakukan secara musyawarah dan hak suara mufakat dengan tetap berdasarkan pada kepentingan masyarakat miskin.

5. Tujuan, PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM-MP memiliki tujuan yang bersifat umum yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan cara mendorong sifat kemandirian masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan dan pengolahan pembangunan.

Selain tujuan yang bersifat umum PNPM-MP juga memiliki tujuan yang bersifat khusus seperti berikut ini *(Aresta, 2013:33-34):*

a. Lebih meningkatkan partisipasi semua masyarakat , yang lebih khusus adalah masyarakat yang miskin dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan, serta pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan melestarikan pembangunan.

b. Melembagakan pengolahan pembangunan yang bersifat partisipatif dengan cara menberdayakan dan menggunakan sumber daya lokal.
c. Membesarkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memberikan sarana pengolahannya.
d. Memberikan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang di pentingkan oleh masyarakat.
e. Membuat lembaga pengelolaan dan bergulir.
f. Mendorong perkembangan Badan Kerjasama Antar Desa dalam melakukan pengolahan pembangunan masyarakat.
g. Melakukan perkembangan kerja sama antara pelaku yang berkepentingan dalm upaya menanggulangi kemiskinan di pedesaan.

6. Cara Kerja PNPM Mandiri Pedesaan

Pelaksanaan PNPM-MP dilakukan dengan berupaya untuk memberdayakan dan mengikut sertakan masyarakat di pedesaan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyebarkan informasi terkait dengan program ini dengan cara mendatangi langsung perkumpulan-perkumpulan perteman ataupun dengan cara memanfaatkan media komunikasi dan media sosal yang biasa masyarakat gunakan di beberapa tingkat pemerintahan.
b. Melakukan proses partisipasi Pemetaan Rumah Tangga Miskin atau yang biasa disebut dengan RTM dan pemetaan sosial. Masyarakat di ajak ikut untuk berpartisipasi bersama menentukan kriteria warga yang kurang mampu dan rumah tangga yang termasuk miskin. Selain itu masyarakat juga di beri sarana untuk membuat rancangan/peta sosial desa yang bertujuan agar lebih mengetahau kondisi yang sebenarnya di

desa, agar dapat membangun masa depan desa dan menentkan kegiatan yang di butuhkan di desa.

c. Perencanaan partisipasi ditingkatan desa/dusun, dan Kecamatan. Masyarakat desa dapa memilih Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang biasa disebut dengan KPMD yang didalamnya terdiri dari satu laki-laki dan satu lagi wanita, yang bertujuan untuk mendampingi sema proses sosialisasi dan melakukan perencanaan. KPMD juga meraih peningkatan jumlah untuk menjalankan seluruh tugas serta fungsi dalam mengatur pertemuan setiap kelompok yang mempunyai tjuan untuk melakukan seleksi potensi sumber daya alam dan manusia di pedesaan agar masa depan lebih cerah. Kemudian masyarakat juga mampu membahas kebutuhan dan yang paling penting adalah pembangunan desa secara bersama-sama dan melalui musyawarah agar dapat memilih pilihan jenis-jenis kegiatan pembangunan yang paling utama untuk diberikan dana. PNPM-MP juga memberikan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkatan kecamatan dan kabupaten yang bertujuan ntuk membantu upaya-upaya sosialisasi dan kegiatan yang berlangsung dan dibutuhkan masyarakat. Gagasan dari masyarakat bisa menjadi alat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang biasa di sebut dengan RPJMDes.

d. Proses Penyeleksian yang menjadi prioritas kegiatan di tingkatan desa maupun kecamatan. Masyarakat mampu melaksanakan musyawarah di tingkatan desa maupun kecamatan dengan tujuan untuk mencapai usulan kegiatan yang paling utama untuk di berikan dana. Musyawarah yang dilakukan ini bersifat transparan bagi seluruh anggota masyarakat agar ikut serta melakukan keputusan jenis kegiatan yang paling utama. Untuk mencapai keputusan akhir terkait

dengan kegiatan yang akan diberikan dana yang diambil pada pertemuan musyawarah antar Desa atau yang disebut dengan MAD di tingkatan kecamatan, yang kemudian mengahdirkan wakil dari setiap desa yang ada di kecamatan yang terkait. Dalam hal tersebut usulan dari warga yang belum diberikan dana, maka akan menjadi bahan evaluasi dalam Forum Satan Kerja Perangkat Daerah atau yang biasa disebut dengan SKPD.

e. Masyarakat melakukan kegiatannya sendiri. Melalui perkumpulan dalam musyawarah, masyarakat dapat memilih anggota yang mereka inginkan sendiri yan bertujuan untuk menjadi anggota dari Tim Pelaksana Kegiatan atau yang biasa disebut dengan TPK di masing-masing desa untuk mengolah proses pendaan pada program. Fasilitator PNPM-MP akan mendampngi TPK dalam menjalankan tugasnya yaitu merancang sarana dan prasarana, membuat anggaran kegiatan, proses verifikasi kualitas dan supervisi. Semua pekerja yang ikut serta di dalam proses pembangunan sarana dan prasarana tersebut bersumber dari masyarakat desa yang menerima manfaat.

f. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama kegiatan dilaksanakannya kegiatan, TPK wajib memberi laporan perkembangan kegiatan yang dilakukan paling minimal dua kali dalam setiap perkumpulan terbuka di desa, yaitu sebelum pencairan dana tahap berikutnya dan pada perkumpulan akhir, dimana TPK melakukan serah terima kegiatannya pada pihak desa, dan badan operasional serta pemeliharaan kegiatan.

7. Hasil PNPM Mandiri Pedesaan

a. Memperluas Kesempatan kerja dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru.

hampir 62,5 juta Hari Orang Kerja yang di satukan dengan cara melalui pekerjaan yang dilakukan dalam jangka singkat, yang telah melibatkan 5,5 juta pekerjanya berasal dari warga pedesaan dengan upah sesuai dengan UMR setempat.

Dengan pembukaan usaha dan jasa angkutan umum oleh warga maupn pihak-pihak yang bersangkutan menyusul membangun sarana umum seperti jalan, jembatan, dan lainnya yang baru dikerjakan oleh warga dengan dana yang berasal dari PNPM Mandiri Pedesaan.

Dari 1,57 lebih masyarakat desa, maupun penjual/pedagang dan pembuka usaha kecil, juka tidak terlepas dari pinjaman dan pastisipasi terhadap kegiatan Simpan Pinjam yang ada dalam PNPM Mandiri Pedesaan

b. Dampak yang sangat terlihat adalah kenaikan Anggaran Belanja Rumah Tangga di pedesaan.

Dari sebuah hasil studi di kecamatan PNPM-MP sangat berpengaruh dengan adanya peningkatan anggaran belanja rumah tangga yang besar jika dibandingkan dengan kecamatan yang tidak melakukan program kegiatan. Selain itu, kecamatan penerima bantuan dari program maka semakin lama akan semakin besar pengaruhnya terhadap meningkatnya Belanja Rumah tangga di pedesaan.

c. Program ini memiliki target yaitu warga miskin dan menyetarakan gender.

Dari beberapa studi ada dampak yang ditimbulkan yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi, PNPM-MP sudah terbukti berjaya dalam menentukan terget dan memberi bantuan pada kecamatan yang miskin di tanah air, dengan target keompok masyarakat yang miskin. Dengan begitu, PNPM-MP juga di nilai sukses dalam pemberdayaan para perempuan.

d. Peningkatan kapasitas, cara kerja lokal dan kegiatan lembaga pembentukan rancangan perencanaan dan pembiayaan yang partisipatif.

Warga di tanah air lebih dari 34.100 desa telah ikut serta dalam partispasi proses demokrasi, partispasi dalam perancangan dan pengambilan sebah keputusan yang terkait dengan alokasi pembiayaan bagi pertumbuhan publik di desa tersendiri. Ada sejumlah 62% peserta yang datang dalam musyawarah yang membahas tentang perencanaan PNPM-MP yang merupakan anggota masyarakat miskin yang ada di pedesaan, serta ada sejumlah 70% orang tenaga kerja dalam melakukan kegiatan membangun sarana dan prasarana PNPM-MP yang bersumber dari beberapa kelompok miskin.

Anggota kelompok Perempuan juga ikut berpartisipasi dalam mendatangi berbagai perkumpulan dan kegiatan PNPM-MP yang terus naik, sekitar antara 31-46%. Secara keseluruhan rata-rata dari swadaya adalah 17% dan mampu menciptakan variasi terbaru di berbagai provinsi. Sejumlah 82% warga lokal di tempat PPK yang saat ini bernama PNPM-MP menyebutkan bahwa program ini telah banyak mempunyai kemampuan untuk berorganisasi dan meningkatkan kapasitas diri yang menyertai dalam terlaksananya kegiatan. Selain itu, sejumlah 72% UPK yang ada di kecamatan lokasi PNPM-MP mempunyai cara kerja yang sangat baik dan memadai, dan juga berpotensi agar lebih berkembang.

Komitmen pemerintahan yang semakin tinggi serta kontribusinya mampu mencapai 40% di setiap kabupaten pada PPK II, PPK III, dan juga PNPM-PPK, yang bertujuan menyediakan pembiayaan bersama dalam melaksanakan program. Seluruh kabupaten dalam PPK III dan PNPM-PPK

tersedia Dana yang berasal dari Anggaran daerah untuk melaksanakan program.

Akuntabilitas pemerintahan serta peran masyarakat lebih kuat, Konsultan dan juga jurnalis di berbagai provinsi PNPM-MP bertindak sebagai pemantau guna untuk memantau pelaksanaan PNPM-MP secara mandiri. Program ini juga telah mendirikan mekanisme yang mungkin meredakan permasalahan. Hal ini tidak terlepas dari berhasilnya kegiatan pelaksanaan program di tempat konflik dan tempat bencana.

e. Semakin rendahnya tingkat korupsi.

Pemeriksaan mandiri terhadap PPK yang dilaksanakan ole Moores Rowland Menemukan penyimpangan program desa yang kurang dari 1% dari semua jumlah dana yang sudah disalrkan. Yang pada akhirnya, sejak perguliran yang dilaksanakan sejak tahn 1998 sampai saat ini, penyimbangan dana dalam program yang mnjunjung tinggi semangat dan keterbukaan serta akuntabilitas cukup rendah, sekitar 0,18% dari semua jumlah dana yang telah tersalurkan.

f. Lebih meningkatkan akses ke pasar, pusat perkotaan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan serta sumber air yang bersih lebih dari 56% desa yang miskin di seluruh tanah air.

PNPM-MP juga telah memberikan dana kepada lebih dari 171.446 program sarana dan prasarana di desa lokasi program di seluruh tanah air. Ada beberapa daftar investasi PNPM-MP yang melalaui PPK dan PNPM-PPK yang pertama ada 32.572 jalan yang berhasil dibangun dan ditingkatkan, yang kedua ada 8.755 jembatan yang dibangun dan di perbaiki, yang ketiga ada 10.510 sistem pengairan sawah yang telah berhasil dibangun, yang ke empat ada 9.940 fasilitas air bersih dan 4.589 MCK yang sudah dibangn, yang kelima ada sarana pendidikan yang telah dibangun dan diperbaiki yang berjumlah 6.411 sekolah dan

penyediaan alat tulis dan kebutuhan pendukng lainnya dalam proses belajar mengajar serta memberikan beasiswa pendidikian kepada 117.270 perorangan dan mendanai kegiatan di bidang pendidikan lainnya, yang terakhir ada di bidang kesehatan dimana telah membangun dan memperbaiki 3.611 sarana dan pos kesehatan serta memberikan dana 968 jenis kegiatan pada bidang kesehatan yang lain.

g. Tingkat pengembalian investasi yang tinggi.

Menurut evaluasi ekonomi yang dilakukan secara mandiri jumlah pengembaliannya sekitar 39-68%. Pengambilan keuntungan yang paling bermakna ialah pembentukan kegiatan ekonomi menggnakan prasarana yang telah dibangun oleh PNPM-MP.

h. Menghemat pembiayaan dalam jumlah yang signifikan.

Prasarana di pedesaan yang sudah di bangun dengan program PNPM-MP juga sangat menghemat dalam mengeluarkan biaya. Yang memiliki rata-rata sekitar 56% lebih hemat dari pekerjaan yang sama jenis di bangun oleh pemerintahan maupun kontraktor. Hal ini di ketahui 94% prasarana yang sudah dibangn memiliki nilai yang berkualitas sangat baik jika dilihat secara teknis.

8. Landasan dan Peraturan PNPM Mandiri

Program PNPM-MP mempunyai dasar hukum dalm melaksanakan penanganan kemiskinan yang mengarah kepada landasan konstitusional dalam Undang-undang Dasa 1945 yang terkait dengan amandemennya, yang mana kesejahteraan sosial menjadi judul yang khusus Bab XIV yang memuat pasal 33 yang berisi tentang Sistem Perekonomian dan Pasa 34 yang berisi tentang Kepedulian Negara Terhadap Masyarakat Miskin.

Landasan idil Pancasila dan peraturan Perundang-undangan yang berlak pada PNPM-MP adalah sebagai berikut:

a. UU No.11 Tahun 2009 yang berisi Tentang Kesejahteraan Sosial.
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 2009 Yang berisi Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 yang berisi Tentang Percepatan Penangglangan Kemiskinan.

Yang mana dalam peratran ini mengatur tentang program kegiatan penanggulangan warga miskin, yang tercatat dalam Pasal 5 ayat (1) seperti berikut ini:

a. Anggota kelompok yang menerima bantuan sosial terpadu berbasis keluarga mempnyai tujuan untuk melakukan pemenuhan dasar, mengurangi beban kehidupan, dan memperbaiki kualitas masyarakat miskin.
b. Anggota kelompok Program penanggulangan kemiskinan bertump pemberdayaan masyarakat, yang mempunyai tujuan agar pengembangan potensi dan mengokohkan kapasitas anggota masyarakat miskin untuk terlibat di dalam pembangunan yang berdasar pada prinsip pemberdayaan masyarakat.
c. Anggota kelompok program penganngulngan kemiskinan yang bertumpu untuk memberdayakan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang mempnyai tujuan agar memberikan jalan dan pengatan ekonomi bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.
d. Program yang lainnya baik sevara lamgsmg mapun tidak langsung dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat miskin.

Sedangkan landasan khusus PNPM-MP pelaksanaan menanggulangi warga miskin seperti keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007

Mengenai Pedoman umum PNPM Mandiri Pedesaan. Berikut peraturan Khusus perundang-undangan terkait yaitu:

a. Sistem pemerintahan

Peraturan perundang-undangan dasar yang digunakan pada sistem pemerintahan pada pedoman PNPM-MP yaitu sebagai berikut:

1). UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah.

2). Peraturan pemerintahan No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

3). Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang kelurahan.

4). Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 Mengenai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

b. Sistem Perencanaan

Peraturan perundangan-undangan dasar pada sistem perencanaan yang terkait yaitu sebagai berikut:

1). UU No. 25 Tahun 2004 Mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan nasional atau yang biasa disebut dengan SPPN.

2). UU No. 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan dalam jangka panjang Naional tahun 2005 sampai dengan 2025.

3). Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 mengenai rencana pembangnan jangka menengah atau yang biasa disebut dengan RPJM nasional pada tahun 2004 sampai dengan 2009.

4). Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 2006 mengenai tata cara mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

5). Peraturan Pemerintahan No. 40 Tahun 2007 mengenai tata cara penyusunan rencana Pembangunan nasional.

6). Peraturan instruksi presiden No. 9 Tahun 2000 mengenai pengurus utama gender dalam pembangunan nasional.

c. Sistem Keuangan Negara

Peraturan perundang-undangan dasar Sistem keuangan negara mengenai PNPM Mandiri yaitu sebagai berikut:

1). UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara (Lembaga Negara republik Indonesia tahun 2003 No. 47, dan di tambah Lemabaran negara republik Indonesia No. 4286);

2). UU No. 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharraan Negara (lembaran negara republik indonesiaa No. 4455);

3). UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antar pemerintahan pusat dengan daerah (lembaran negara republik indonesia Tahun 2004 No. 126, di tambah dengan lembaran negara republik indonesia No. 1138);

4). Peraturan pemerintahan No. 57 Tahun 2005 tentang hibah/pemberian kepada daerah (lembaran negra republik indonesia Tahun 2005 No. 139, di tambah dengan lembaran negara republik indonesia No. 4577);

5). Peraturan pemerintahan No. 2 Tahun 2006 mengenai tata cara pemberian pinjaman atau pemberian hibah dan penerusan pinjaman luar negeri (lembaran negara republik indonesia Tahun 2006 No. 4597);

6). Keputusan yang di ambil presiden No. 80 Tahun 2003 mengenai pedoman dilaksanakannya barang dan jasa pemerintahan.

7). Peraturan mentri PPN No. 005/MPPN/06/2006 mengenai tata cara perencanaan dan pengajuan usulaan dan memberikan nilai kegiatan yang telah diberikan dana dari pinjaman luar negri.

8). Peraturan mentri keuangan No. 52/PNK.010/2006 mengenai tata cara pemberian hibah kepada daerah.

9). Peraturan mentri dalam negri No. 13 Tahn 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

d. Kebjakan penanggulangan kemiskinan .

C. Pembiayaan Pinjaman Bergulir

1. Pengertian Pinjaman Bergulir

Pengertian dana bergulir adalah dana yang di berikan dari lembaga kerja badan pelayanan umum untuk digunakan dalam kegiatan pemberian modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha dan berdiri di bawa pengawasan dari lembaga negara.

Sedangkan pengertian pinjaman bergulir di dalam KBBI di istilahkan dengan kredit. Kredit adalah pemberian pinjaman sejumlah uang yang dilakukan oleh sejumlah orang baik pada individu maupun kepada lembaga yang sudah disepakati dan mengembalikan uangnya dilaksanakan dengan cara tempo atau angsuran. Sedangkan untuk pinjaman bergulir yang di dalam konteksnya berada pada PNPM Mandiri adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga keswadayaan masyarakat atau yang biasa di sebt dengan LKM melalui Unit Pengelola Kegiatan yang bertujuan untuk memberi modal usaha kepada masyarakat miskin dengan cara membuat kelompok dan cara pengembaliannya dengan menggunakan angsuran. Kegiatan pinjaman bergulir ini diberikan kepada masyarakat miskin dan bertujuan untuk mendapatkan hasil pendapatan serta biasanya tidak mempunyai jalan untuk meminjam ke pinjaman yang lain, sebab itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan usaha yang bersifat mikro.

2. Tujuan Pinjaman Bergulir

Kegiatan pinjaman bergulir dalam program PNPM-MP memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas pelayanan keuangan pada masyarakat miskin dengan pinjaman bergulir yang berbasis pada pasar dengan cara kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan, biasanya tidak mempunyai jalan untuk meminjam pada pinjaman yang lain. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan mendukung perkembangan perekonomian dan usaha yang bersifat mikro. Selain itu juga memberi pelajaran untuk masyarakat dalam hal pengelolaan pinjaman serta tata cara penggunaanya secara baik dan benar.

Walaupun seperti itu, PNPM-MP merupakan lembaga keuangan yang bersifat non mikro serta tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan yang bersifat mikro. Sedangkan lembaga keuangan mikro bukan hanya memberikan pinjaman saja, tetapi banyak jasa keuangan yang lain dan perlu disediakan. Peran dari PNPM-MP yaitu hanya mendirikan dasar penyelesaian masalah yang berlanjut untuk jasa kegiatan pinjaman maupun yang bukan kegiatan pinjaman pada tingkatan desa. PNPM-MP telah digunakan untuk tahap konsolodasi dengan lembaga keuangan mikro. Oleh karena itu, di dalam tahapan itu memerlukan penciptaan Unit Pengelola Kegiatan yang kuat dan tegas, secara opersaionalnya terpisah dengan LKM. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusanyang bertujuan untuk menentukan masa depan Unit Pengelola Kegiatan.

Kegiatan pinjaman bergulir melaksanakan tugasnya pada tingkat masyarakat secara sistematis. Yang diawali dengan usulan dari warga dan berbentuk proposal lalu proposal itu di evaluasi oleh pengawas dan dilaksanakan verifikasi proposal untuk di nilai dari segi kelayakannya. Setelah proposal di nyatakan baik dan lengkap agar di berikan dana pada tahap selanjutnya oleh pengawas untuk diberikan dana melalui Unit Pengelola Kegiatan agar dapat dilakukan pencairan dana kepada para peminjam.

Kegiatan pinjaman bergulir dalam perjalanannya dalam PNPM-MP sudah berjalan kurang lebih delapan tahun di Sumatera Barat, dalam perjalanannya ada yang berhasil dan tidak sedikit juga yang telah dinyatakan masih belum berhasil. Hal yang menyebabkan kegiatan ini tidak berhasil tidak terlepas dari faktor persoalan baik dari masalah masyarakatnya, masalah keuangannya, maupun pengembalian dari masyarakat yang tidak sesuai dengan rencana yang ada dalam kelompok yang tidak berjalan selaras dengan aturan yang sudah disepakati tetapi tidak dijalankan sesai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan bagi kegiatan yang berhasil di dasari oleh kesadaran masyarakat untuk mngembalikan dan yang sudah di pinjam sesua dengan aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Untuk gambaran bagaimana cara untuk mencapai tujuannya kegiatan pinjaman bergulir di masyarakat ada sejumlah langkah-langkah yang harus ditempuh. Menurut penlis harus di terapkan bebrapa peraturan dalam kegiatan pinjaman berglir di masyarakat yang sudah berdiri sejak tahun 2007 sampai saat ini pengembaliannya harus seuai dengan aturan yang sudah di sepakati setiap bulannya.

3. Strategi Untuk Pembiayaan Bergulir

Ada beberapa cara yang digunakan dalam rangka untuk mencapai tujuan dalam kegiatan pinjaman bergulir seperti berikut ini:

a. Yang pertama ada patuh kepada pedomann Pelaksanaannya.

Sedangkan pedoman adalah aturan yang bersifat umum dan aturan yang bersifat khusus yang bertujuan dalam mengatur tentang cara untuk menjalankan program pinjaman bergulir. Di dalam pedoman juga sudah di beri penjelasan secara detail cara dan tahapan yang di lewati untk melaksanakan program pinjaman bergulir ini. Selain itu juga program pinjaman bergulir mempunyai sasaran yang paling utama dalam pelaksanaanya yaitu rumah tangga miskin dan warga yang mempunyai pendapatan rendah di

lingkungan desa, yang lebih khusus adalah masyarakat miskin yang sudah ada dalam daftar warga miskin.

Ada beberapa indikator yang dijelaskan didalam pedoman pinjaman bergulir agar mencapai target program ini yang pertama ada peminjam bersumber dari warga miskin yang sudah di identifikasi dan sudah masuk didalam daftar, yang kedua ada minimal 30 persen yang meminjam adalah warga perempuan, yang ketiga ada peminjam sudah masuk dalam kelompok swadaya masyarakat yang beranggotakan paling minimal lima orang, dan yang terakhir ada akses bagi yang meminjam bagi KSM dan peminjam melalui cara kerja pengembalian dananya baik dan sudah menjamin berlanjutnya baik melalui dana Bnatuan Langsung Masyarakat atapn melalui dana dari hasil kerjasama dengan kebijakan aturan pinjaman yang jelas.

Ada beberapa ketentuan penerima pinjaman yang harus sesuai pada aturan pelaksaan menjadi pegangan bagi BKM untuk melaksanakan kegiatannya. BKM juga harus fokus dengan adanya ketentuan tersebut, sehingga saat ada masalah yang tidak tercantum didalam pedoman BKM maka harus melakukan bimbingan kepada pihak PNPM-MP agar mendapatkan jalan keluar terhadap masalah yang sedang di hadapi. Dengan begitu maka diharapkan dalam program ini tidak ada lagi aturan yang disalahgunakan yang tidak selaras dengan pedoman aplikasi lapangan.

Pelanggaran pada pedoman yang dilaksanakannya mungkin dapat terjadi masalah yang lain di lapangan. Saat sudah terjadi masalah dilapangan, BKM yang menjalankan sesuai pada aturan diluar pedoman, maka akan timbul masalah yang baru dan harus dicari caranya agar dapat ditutupi pproses dariaturan tersebut. Dalam menyelesaikan masalahnya, tidak terlepas dari penyerapan energi. Dibuatnya pedoman adalah untuk mengatur cara dan rancangan pelaksanaan yang bertujuan untuk menghindar dari

masalah yang mungkin akan timbul di lapangan dengan cara melakukan kegiatan pinjaman bergulir yang sesuai dengan aturan. Aturan ini merupakan ha yang harus dipatuhi agar tercapai keberhasilan dama menjalankan kegiatan.

b. Yang kedua ada sosialisasi dalam kegiatan pinjaman bergulir.

Keberhasilan yang diperoleh oleh suatu kegiatan disebabkan oleh suatu faktor yaitu adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus. Dengan hal tersebut sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus diberi harapan agar kegiatan ini dapat dipahami oleh masyarakat, dengan begitu akan ada gejalanya yaitu masyarakat dapat ikut serta dalam menyukseskan kegiatan yang sudah ada di rencana, dalam hal kegiatan program pinjaman bergulir. Bukan hanya itu kegiatan sosialisasi juga bermaksud guna menyampaikan program serta melakukan diskusi manfaat apa saja yang akan di dapat dalam kegiatan pinjaman bergulir bagi kelompok masyarakat. Sedangkan dalam pengertian yang lain, sosialisasi merupakan tata cara pengelolaan pinjaman bergulir supaya lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Dalam proses sosialisasi juga dapat diartikan sebagai pembuka pintu gerbang perkumpulan yang akan diberdayakan supaya pinjaman bergulir dapat dilaksanakan dengan baik pada lingkungan masyarakat.

Bukan hanya sosialisasi, agar masyarakat miskin lainnya juga tertarik maka dilaksanakansuatu kegiatan promosi produk dari KSM yang berasal dari hasil kegiatan pinjaman bergulir. Promosi juga seringkali dikaitkan dengan pemasaran, tapi pada hakekatnya promosi memiliki artian yang sangat luas. Sehingga promosi dapat berarti sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membujuk/mempengaruhi warga agar tetap menggunakan barang atau jasa yang telah dihasilkan. Terkait dengan pinjaman berglir, aktivitas promosi yang ditj merupakan suatu proses pemberitahuan

dan pengaruh kepada masyarakat agar tetap menggunakan jasa yang ada oleh Unit Pengelola Kegiatan.

Salah satunya dengan adanya media sosialisasi yang digunakan yaitu dengan menggunakan papan informasi PNPM Mandiri yang ada pada tingkat desa. Bukan hanya itu saja media yang digunakan juga dengan pemandaatan pertemuan yang diberikan sarana oleh BKM. Dalam melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir sangat sering dilakukan evaluasi pada dampak dari program pinjaman bergulir dengan begitu kegiatan sosialisasi memberi harapan agar kegiatan pinjaman bergulir makin dipahami oleh masyarakat.

c. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pencairan dana pinjaman bergulir.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu cara yang dilaksanakan dalam rangka memberi prinsip kepercayaan pada warga. Dengan adanya kepercayaan yang sudah diber maka warga yang sudah dipinjami akan mengembalikan dana yang dipinjam. Transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan dengan cara mengumpulkan peminjam saat akan menerima dana bergulir, baik yang bersumber dari dana bantuan pemerintah ataupun bantuan yang lain.

Dikumpulkannya peminjam sebelum penerimaan dana bertujuan untuk menjalin kontrak moral antara peminjam dengan lembaga pengelola pinjaman. Dengan adanya proses ini dilaksanakan dengan rangka mensosialisasikan peratuan yang ada dalam proses pinjaman bergulir, tapi pada proses dikumpulkannya peminjam ini lebih mengarah kepada penyadaran kepada anggota peminjam agar bertanggung jawab pada kegiatan pinjaman bergulir. Sedangkan pinjaman bergulir adalah dana pemerintah yang diberikan dalam rangka menanggulangi adanya kemiskinan, dana ini kemudian sampai pada masyarakat dan diberi nama dana abadi

pemberdayaan dengan begitu penerima pinjaman juga harus mengembalikannya untuk proses perguliran pada penerima miskin yang lain.

d. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi.

Di dalam konsep monitoring dan evaluasi memiliki arti yang berbeda, tetapi dua-duanya perlu unsur dan alat yang sama, seperti adanya target dari program yang jelas, adanya target dan juga indikator, serta data yang perlu ditetapkan pada awal perencanaan, begitu juga indikator dan target utama. Monitoring juga memudahkan kita dalam mengamati secara berkala trend dan masalah, bila perlu melaksanakan penyesuaian dalam rancangan pengaplikasian atau proses mengelolanya secara tepat waktu.

Terkait dengan sistem monitoring yang kuat, evaluasi juga tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil dari program, tetapi dapat memberikan tempat informasi terkait kapan, mengapa, serta bagaimana mengimplementasikan program yang jauh dari rencana awal dan lalu menyiapkan usulan untuk mengatasi permasalahannya dengan cara monitoring dan evaluasi agar dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Monitoring serta evaluasi sangat penting dalam melakukan upaya agar berinovasi dan mempraktekannya dengan baik, untuk diinformasikan serta bermanfaat untuk pihak dan daerah yang lain, selain itu juga dapat dijadikan dasar untuk merayakan suatu keberhasilan. Selain itu, monitoring dan evaluasi adalah sarana peran serta peminjam kegiatan yang sangat baik bila dilaksanakan dengan cara yang benar.

Dalam hal pinjaman bergulir monitoring dilaksanakan oleh BKM dalam rangka melihat pemanfaatan dari pinjaman bergulir pada tingkatan masyarakat desa. Selain pemanfaatan dana, monitoring juga dapat dilaksanakan dalam rangka melihat kejelasan usahanya. Saat pinjaman bergulir sudah pada target untuk melaksanakan usahanya maka BKM memantau dari segi yang lain

seperti sampai mana usaha yang sudah dilaksanakan sudah berhasil dan dapat berkembang dengan begitu masyarakat miskin dapat disejahterakan dalam menanggulangi kemiskinan. Upaya monitoring dapat dimanfaatkan dengan rangka memunculkan rasa empati BKM juga pada peminjam sehingga dengan adanya proses ini warga yang melakukan pinjaman merasa ikut serta dalam program. Hal inilah yang sangat penting dalam menanggulangi kemiskinan pada saat warga sudah merasa mempunyai program maka semakin jelas bahwa menanggulangi kemiskinan dapat berhasil.

Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan tiap bulan dan dapat menjadi agenda yang harus bagi kegiatan lembaga. Dengan begitu adanya kegiatan rutin evaluasi dan monitoring ini memberi harapan bagi BKM agar semakin aktif dalam memberi bantuan kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan sehingga BKM Makin pintar dalam menganalisis setiap temuan yang sudah didapatkan dari program tersebut.

e. Yang kelima ada kesepakatan aturan di dalam kelompok.

Di setiap kelompok individu yang mempunyai kesamaan baik berupa fisik, jenis ataupun kesamaan kepentingan, dengan begitu bisa membuat kelompok. Ataupun secara sengaja seorang masyarakat, yang merasa memiliki kesamaan dengan salah satu kelompok yang sudah terbentuk maka individu tersebut dapat bergabung dalam kelompok tersebut. Hal ini menimbulkan setiap individu yang menjadi bagian salah satu kelompok bisa terikat karena adanya peraturan dalam kelompok itu yang dapat memberikan pengaruh pola keakrabaan individ tersebut di dalam kelompok ataupun diluar kelompok.

Di dalam buk pedoman bahwa peminjam dari pinjaman bergulir orientasinya adalah kelompok, yang mana kelompok ini didasari kepada suatu ketetapan bahwasannya dengan pembentukan

kelompok efektivitas dari pemberdayaan masyarakat makin efisien. Yang dimaksud adalah kita melaksanakan pengembalian orientasi yang lebih berfokus pada ketua kelompok karena anggota kelompok sudah memiliki kesepakatan untuk melakukan cara menanggulangi kemiskinan. Dalam pengikatan kekuatan anggota dalam kelompok yang memiliki latar belakang yang beda dan juga usaha yang beda tentu ada kesepakatan aturan secara bersama-sama, hal ini biasanya di tuliskan dalam komitmen bersama dalam membangun kelompok. Dengan adanya aturan bersama maka disepakati cara dan pertemuan untuk mengembangkan kelompok masyarakat.

f. Yang keenam ada reward dan punishment.

Yang dimaksud dengan sistem reward dan punishment adalah salah satu cara yang penting dalam meningkatkan cara kerja suatu kelompok. Salah satunya yang berpengaruh yaitu pemberian dana kompensasi kepada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pemberian dana kompensasi dapat berupa salah satu pemenuhan kebutuhan fisik, yang mempengaruhi motivasi pada setiap giliran perilaku anatara sesama anggota kelompok. Oleh sebab itu manajemen yang sangat penting dan bertujuan untuk mpeningkatan motivasi kelompok agar meraih prestasi yang paling baik.

Pemberian kompensasi dapat berupa penghargaan yang sangat tepat dalam artian memenuhi syarat yang adil dan layak merupakan prinsip yang penting didalam sistem manajemen kompensasi. Selain itu penghargaan yang bertujuan agar seorang menjadi makin giat dalam berusaha meningkatkan prestasi yang sudah dicapai.

Sedangkan punishment dapat berarti sebagai hukuman yang diberikan kepada pelanggar. Pemberian penghargaan yang berbentuk punishment tidak bisa dilaksanakan tanpa alasan yang bersifat rasional, oleh sebab itu kelompok harus mempunyai proses reward dan punishment yang tegas. Proses pemberian reward dan

punishment mengaitkan beberapa variabel antara lain motivasi, cara kerja, tingkat kepuasan, keadilan serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang disepakati dalam kelompok. Dengan sistem reward dan punishment adalah dua bentuk cara dalam memotivasi seseorang agar melaksanakan kebaikan dan menguatkan prestasinya.

Dalam kegiatan pinjaman bergulir, reward dilaksanakan melalu cara memberikan penghargaan untuk kelompok yang mampu mengembalikan dan tepat waktu, penghargaan yang diberikan kepada kelompok berupa apresiasi baik secara lisan seperti pujian ataupun apresiasi lainnya, yaitu pada kelompok yang sudah lancar dalam pengembalian dana ditambahkan dengan modal yang sesuai dengan interval yang dibolehkan oleh PNPM-MP.

Selain itu punishment juga dapat di berikan pada kelompok berbentuk tidak meminjamkan lagi dana bergulir ketikaa modal di awal tidak dikembalikan. Aspek lain dalam punishment yang diberikan oleh BKM pada kelompok yang tidak melakukan pengembalian dama adalah anggota kelompok yang tidak melakukan pengembalian diusulkan kepda pihak lainnya agar memperoleh modal dari badan peminjam yang lain. Di ibaratkan sama halnya dengan BI cheking yang ada pada perbankan. Metode ini juga sangat baik sehingga tdak dapat satupun kelompok yang berani bermain dengan tidak melakukan pengembalian pinjaman yang sudah dipinjamkan.

D. Pengembangan Ekonomi

1. Pengertian Pengembangan Ekonomi

Pengembangan menrut Ardito Bhinadi adalah suatu proses yang mempunyai sifat menyeluruh yaitu proses yang bersifat aktif antara pemberi fasilitas masyarakat yang diberdayakan dengan cara

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemudahan, dan peluang agar mncapai tujuan sumber daya yang unggul dalam penigkatan kesejahteraan masyarakat *(Bhinadi, 2017:5).*

Selain itu pengertian pengembangan ekonomi menurut Wahjudin Sumpeno adalah cara yang dilaksanakan untuk menyempurnakan suatu rancangan yang bertujuan agar rancangan tersebut dapat dikembangkan secara mandiri. Program yang dirancang harus mengikut sertakan masyarakat dan melibatkan beberapa pihak yaitu lembaga pemerintah, lembaga penelitian, pergruan tinggi, dan pihak-pihak yang lain, hal ini dilakukan secara terus menerus *(Ramadhan, 2018:3).* LSM juga mempunyai tujuan cara kerja dalam melaksanakan perubahan sosial dengan menarik kesadaran warga menggunakan tatanan organisasi dan juga metode yang dilaksanakan bersama.

Tidak sedikit kriteria yang dilaksanakan sebagai pengukur dalam memberi nilai kesejahteraan perekonomian yang pada contohnya adalah pareto criteria yang diungkapkan oleh Vilfredo Pareto yang dimaksudnya adalah perubahan bisa dikatakan baik ataupun layak ketika dalam perubahannya berisi paling ewndah satu pihak yang merasa beruntung dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan.

Ekonomi dapat menjadi tujuan yang utama dari kebijakan dan pertumbuhan ekonomi yang dianggap metode penyedia lapangan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat. Pada hakekatnya, pengembangan lebih mengacu terhadap cara untuk menumbuhkan keahlian seseorang ataupun lembaga dalam meraih kekuatan diri yang memiliki tujuan untuk menguatkan kemandirian. Sedangkan ekonomi sendiri bersmber dari bahasa yunani yaitu oikos dan nomos yang artinya rumah tangga dan aturan rumah tangga.

Sehingga ekonomi dapat berarti sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengolah sumber daya yang ada guna untuk pemenuhan kebutuhan. Bersumber dari penyampaian diatas tentang pengertian pengembangan ekonomi dapat ditarik kesimpulan bahwa

perkembangan ekonomi adalah rangkaian aktivitas dalam bidang ekonomi dengan membuat kerja sama antara masyarakat dalam mengolah sumber daya secara terus menerus.

Sedangkan ekonomi masyarakat adalah semua kegiatan ekonomi dan cara masyarakat agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Dengan begitu maka dapa ditarik kesimpulan bahwa pengembangan ekonomi adalah salah satu cara masyarakat secara mandiri ataupun hasil dari faktor luar sehingga dapat terpenuhi kebutuhan setiap harinya.

2. Tujuan Pengembangan Ekonomi

Supaya terus berkembang maka harus mempunyai alat untuk menegakkan aturan dengan cara dipertahankan peraturannya, membuat terciptanya tenaga kerja yang trampil, dan mengembangkan setiap individu itu untuk masa depan serta untuk mencari jalan keluar yang sesuai dengan sumber dayanya. Dengan begitu butuh pembuatan prinsip yang mendasar dalam sebuah pengembangannya antara lain:

a. Lebih mengutamakan masyarakatnya.
b. Membuat korelasi diantara masyarakat dan lembaga pengembangnya.
c. Mengoptimalkan pemakaian sumber daya secara terus menerus.
d. Mengurangi ketergantungan masyarakat pada pihak luar.
e. Menaikkan tingkat keberlanjutan program.

Dengan adanya prinsip itu memberi harapan pengembang ekonomi yang dilaksanakan dapat berkembang secara rata serta memberi kekuatan kepada masing-masing individu yang dianggap lemah kondisi ekonominya dengan memberi beberapa jalan keluar supaya membawa masyarakat dari masalah-masalah yang dihadapi.

a. Tujuan pengembangan ekonomi.

Pengembangan ekonomi menurut suharto adalah sebuah proses dan tujuan. Proses dalam pengembangan ekonomi adalah

rangkaian aktivitas yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan agar digunakan sebagai salah satu indikator berhasilnya pengembangan ekonomi untuk sebuah proses. Berhasilnya program ini berfokus pada hasil kegiatan yang ingin dicapai yaitu masyarakat yang mamp diberdayakan, mempunyai pengetahuan, keuletan dan kekuasaan dalam pemenuhan kehidupan yang memiliki sifat fisik, ekonomi dan sosial serta bisa menjadi masyarakat yang lebih mandiri dalam melakukan segala kegiatan.

Tujuan pengembangan ekonomi menurut Wrihatnolo adalah terciptanya masyarakat yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. Masyarakat yang maju dapat dilihat dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang tidak bergantung pada pihak eksternal, masyarakat yang bersifat mandiri juga dilihat dari kemahiran dalam pengidentifikasian masalah yang terjadi dan mampu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, masyarakat yang sejahtera juga dilihat dengan pemenuhan semua kebutuhan masyarakat.

Selain itu Mukerji juga menambahkan tentang tujuan pengembangan yaitu membangun tinjauan yang berprogres, kemandirian, ikut serta dalam tujuan dan kerjasama pada diri masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok.

Mardikanto memaparkan pada proses pengembangan wajib diperhatikan secara akurat dalam penciptaan iklim yang bisa mengembangkan serta menguatkan potensi masyarakat dan juga masyarakat lemah diberikan perlindungan baik secara pribadi maupun kelompok.

Dengan adanya penjelasan tersebut maka terdapat tujuan pengembangan ekonomi mampu disimpulkan bahwa adanya tujuan dari pengembangan ekonomi adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri dan bisa melakukan pengidentifikasian

serta penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi khususnya pada bisang ekonomi dalam rangka pencapaian kemandirian.

b. Model Pengembangan Ekonomi

Dalam buku Edi Suharto Jack Rothman menjelaskan tiga model dalam pelaksanaan pengembangan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

1). Pengembangan masyarakat Lokal

Metode pemberdayaan adalah salah satu metode praktek yang mengikut sertakan partisipasi aktif dan berinisiatif dari masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada. Dalam program ini ditujukan agar menjadikan kemajuan dalam bidang sosial ekonomi masyarakat.

2). Perencanaan Sosial

Metode ini menitik beratkan pada bagaimana cara penetapan tindakan dalam pemecahan masalah sosial yang sudah terjadi kepada masyarakat antara lain pengangguran, kemiskinan, kenakalan pada remaja dan yang lainnya. Metode ini dilakukan untuk pengawasan dan mencapai tujuan bersama dengan cara perencanaan yang baik.

3). Aksi Sosial

Metode ini lebih berfokus pada adanya kesetaraan kekuasaan serta sumber daya yang ada. Metode ini diberikan pada masyarakat yang masih kurang mampu dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Metode ini mempunyai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya pengucilan oleh kelompok tertentu.

Pendapat dari Mardi Yatmi Hutomo dalam menjalankan pengembangan ekonomi di bagi menjadi dua metode yaitu sebagai berikut:

1). Persiapan pribadi masyarakat agar menjadi pribadi yang mempunyai rasa ingin berwirausaha. Persiapan yang dilaksanakan dengan cara pembekalan pengetahuan serta pelatihan untuk masyarakat secara keseluruhan tentang cara berwirausaha dalam semua aspek dan memberi pinjaman modal bagi masyarakat yang dapat di salurkan dari lembaga keuangan.

2). Pemberantasan kemiskinan dengan cara peningkatan bidang pendidikan. Pengembangan yang dilaksanakan yait dengan cara pemberian beasiswa dan sarana maupun prasarana pendidikan yang paling utama bagi anak-anak yang masih kurang mamou. Hal ini bisa membantu meringnkan beban yang ditanggung oleh orangtua dan bisa meningkatkan kembalii semangat untuk belajar para siswa.

Cara lain yang bisa dilakukan dalam pengembangan ekonomi yang berdedikasi pada pengentasan kemiskinan adalah dengan cara pendekatan kewirausahaan sosial. Hal ini bukan merupakan hal yang baru karena kewirausahaan sosial sudah berdiri cukup lama sampai sekarang dan mengalami peningkatan terus menerus. Hal ini dibuktikan dengan di dirikannya Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia atau yang biasa disebut dengan AKSI pada tahun 2009. Kewirausahaan sosial mampu memberikan manfaat untuk pembangunan usaha sebagai salah satu cara dalam mengahadapi masalah sosial ekonomi, lingkungan, pendidikan dan masalah lain yang ada.

Dalam bukunya Nicholls menerangkan bahwa kewirausahaan sosial didukung oleh sejumlah faktor yaitu dengan

adanya organisasi orang yang berinovatif dan aktivis sosial yang luas jaringannya. Kewirausahaan sosial digabungkan dalam sejumlah konsep bisnis, amal dan juga cara pergerakan sosial yang memiliki tujuan untuk membangun pemecahan masalah tentang permasalahan sosial secara terus menerus serta menciptakan susunan nilai sosial. Kewirausahaan sosial memiliki cara kerja yaitu dengan pendefinisian masalah sosial yang sudah terjadi lalu membuat dan mengolah usaha sosial dalam mencapai perubahan. Pengolahan ushaa itu bisa dicapai dengan peningkatan potensi dalam perluasan jaringan sosial yang sudah dilakukan.

3. Faktor-faktor Keberhasilan Pengembangan Ekonomi

Sejumlah faktor juga dapat berpengaruh dalam berhasilnya sebah pengembangan ekonomi, antara lain dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi antara lain adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, kewirausahaan dan keahlian. Faktor ekonomi ini dapat mendorong tersedianya bahan baku dalam pengelolaan menjadi produk yang memiliki kualitas.

Selanjutnya, pada faktor non ekonomi antara lain adalah sosial budaya, kelembagaan, kondisi politik dan sistem yang berlaku pada masyarakat. Meskipun tidak memiliki hubungan dengan sumber daya keahlian, faktor non ekonomi juga sangat bisa memiliki pengaruh pada pengembangan ekonomi. Yang terakhir juga adanya faktor pendukung dan ada juga faktor penghambat pengembangan ekonomi. Faktor penghambat tersebut adalah situasi alam, susahnya permodalan, sedikitnya tenaga kerja, faktor alam, situasi politik di dalam negeri serta kondisi ekonomi dunia.

4. **Pengembangan Ekonomi dalam Islam**

Agama islam merupakan agama yang selalu mengikuti perubahan dan berkembangnya zaman, maknanya masalah apapun yang terjadii itu bisa dikoordinasika dan tidak bersinggungan dengan aturan islam.

Apalagi pada zaman ini, zaman terus berkembang hingga hal tersebut berakibat pada tuntunan bagi umat muslim untuk menentukan status hukumnya, karena biasanya masalah yang terjadi tidak dijelaskan secara rinci.

UPK PNPM Mandiri pedesaan merupakan kegiatan yang didalam praktek simpan pinjamnya dapat diartikan sebagai al-qardh (mengambil keuntungan). Didalam hadist juga disebutkan bahwa transaksi simpan pinjam atau utang piutang merupakan salah satu akad yang melibatkan dua orang atau lebih yang mengarah pada prinsip pinjam meminjam yang didalamnya bukan bertujuan mendapat laba dari orang yang dipinjami. Karena pada dasarnya orang yang meminjami pahalanya lebih besar daripada shadaqah karena sudah membantu orang yang lebih membutuhkan. Sejak zaman Rasulullah SAW juga sudah ada akad Al-qardh bahkan Rasulullah SAW melakukan transaksi tersebut. Dalam fiqh klasik al-qardh di kelompokkan dalam akad ta'awuni atau yang biasa disebut dengan tolong menolong, sebab dalam UPK PNPM Mandiri Pedesaan dana yang diberikan untuk menolong warga yang membutuhkan atau warga yang miskin.

Tujuan yang mendasar dari program pinjman bergulir Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Kemranjen sangat baik, antara lain adalah dengan cara pemberdayaan warga yang kurang mampu dengan pemberian pinjaman modal untuk digunakan dala kegiatan usahanya supaya dapat mengurangi masalah serta pemenuhan kebutuhan hidupnya setiap hari. Yang menjadi dasar adalah warga yang kurang mampu wajib diberi bantuan supaya tidak terjadi penurunan kualitas kehidupan.

Sikap tolong-menolong dalam Agama islam memberi perhatian dan pertimbangan dalam berbuat kebaikan sesuai dengan syariat islam. Dibawah ini peran Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP dalam ekonomi islam terhadap perkembangan perekonomian di Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

a. Peranan Pemerintah Dalam Islam.

Dalam islam pemerintah diberi amanah dalam menjalankan perannya dengan cara pemberian jaminan supaya kehidupan masyarakat dapat terus berkembang, hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintahan dengan diberi tugas serta tanggung jawab sebagai perantara untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pemerintah sangan penting karena berperan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Allah SWT juga telah memerintahkan umat manusia agar terus mendirikan keadilan serta perbuatan yang baik yang ditanamkan dalam diri umat muslim baik individu maupun kelompok termasuk didalamnya ada pemerintahan. Pemerintahan islam tidak terlepas dari tugas dan kewajiban dan perintah dari Allah SWT.

Sebagai negara yang baik pasti mempunyai aturan dan kegiatan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan, dengan seriusnya pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan dimulai dengan PNPM-MP yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan memberi pelayanan pinjaman modal usaha dengan mudah yang mampu memberi harapan masyarakat dalam membuka maupun pengembangan usaha dengan tujuan peningkatan pendapatan keluarga yang kurang mampu dalam penanggulangannya. Walaupun PNPM-MP sudah selesai sejak tahun 2014, tetapi aset simpan pinjamnya di Kecamatan Kemranjen tetap aktif yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP sampai saat ini.

b. Mekanisme Simpan Pinjam Bergulir Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Kemranjen dalam tinjauan islam.

Tujuan diberikannya pinjaman modal dari PNPM-MP yang pada dasarnya adalah untuk penanggulangan kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan dan mengembangkan usaha masyarakat yang masih kurang mampu.

Dalam melaksanakan kebaikan, manusia hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT, dan tidak memiliki tujuan untuk keuntungan saja. Menurut nalar dari sisi tujuannya pinjaman UPK PNPM-MP Kecamatan Kemranjen terdapat riba sebab adanya tambahan yang sudah ditetapkan di awal. Riba merupakan penetapan bnga atau melebihkan jumlah pinjaman pokok yang dibebankan pada peminjam.

Dengan begitu, walaupun tujuan dari program UPK PNPM-MP Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas ini sangat mulia yaitu untuk menolong mengembangkan ekonomi masyarakatnya dengan tujuan peningkatan penghasilan warga dengan cara memberikan pinjaman modal usaha untuk dalam membuat maupun mengembangkan usahanya, tetapi dalam tinjauan islam metode yang digunakan bersifat haram karena mengandung riba.

E. Landasan Teologis

1. UPK PNPM Mandiri Pedesaan

UPK PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang dijadikan sebagai wadah sarana kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonominya. UPK PNPM Mandiri memiliki tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi dan mengatasi kemiskinan dalam masyarakat, UPK PNPM-MP juga merupakan salah satu lembaga keuangan program pemberdayaan yang terbesar di indonesia.

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Adapun tentang masyarakat yang berdaya guna dalam kehidupannya, Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤)
تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥)

Artinya: "Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah Membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit, (pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhan-nya. Dan Allah Membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat."(QS. Ibrahim; 24-25).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa UPK PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima modal usaha tanpa adanya jaminan. Sebagai masyarakat desa yang masih kurang terhadap perkembangan komunikasi menjadikan pola pikir mereka masih tertinggal dan masih belum paham dengan program-program yang ditawarkan lembaga lain. Dalam kegiatannya masyarakat dengan UPK PNPM Mandiri Pedesaan juga hanya mengandalkan kepercayaan masing-masing pihak dalam menjalankan programnya agar terus berjalan dengan baik.

2. Peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan

Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan pada setiap Kecamatan, sudah banyak membantu masyarakat dalam mencukupi perekonomiannya bahkan dapat mensejahterakan masyarakat miskin dengan bantuan modal usaha dari pinjaman bergulir oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan pada keseharian warga Bahkan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri secara tidak langsung telah membuka lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi penganguran. Dengan pinjaman modal yang diberikan membuat masyarakat lebih terdorong untuk membuka dan menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh.

Tak ayal, perintah tolong-menolong dalam agama ini kerap direpresentasikan dalam aksi kepedulian. Tak sedikit misalnya, di Indonesia, hadirnya lembaga-lembaga filantropi juga diusung oleh

semangat kepedulian dan sikap tolong-menolong yang tinggi yang terkandung dalam ayat dibawah ini:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat."

Jadi, Dari permasalahan ekonomi yang ada di desa Karanggintung yaitu kurangnya modal usaha untuk masyarakat dalam mengembangkan ekonominya UPK PNPM Mandiri Pedesaan memberikan solusi dengan cara mengadakan program pinjaman bergulir tanpa agunan. Dengan adanya pinjaman bergulir tanpa agunan meringankan masyarakat yang tidak mempunyai jaminan untuk melakukan pinjaman. Peran UPK PNPM Mandiri juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Dari pinjaman modal tersebut usaha yang dijalankan oleh masyarakat mampu berkembang, sebagai contoh usaha gula jawa dan warung sembako.

3. Pinjaman Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut ini:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui," (QS. Al Baqarah [2]: 280).

Jadi, di daerah pedesaan seperti di Desa Karanggintung masih banyak sekali keterbatasan dalam mengembangkan bisnisnya antara lain adalah masalah permodalan. Keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat terkadang masih belum bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya hal tersebut pemerintahan desa bekerja sama dengan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha masyarakat. Program pembiayaan pinjaman bergulir ini sangat membantu dalam menambah modal usaha dan mengembangkan usaha masyarakatnya. Sehingga perekonomian di Desa Karanggintung mengalami perkembangan yang cukup baik daripada sebelumnya.

4. Mekanisme pinjaman bergulir

Tujuan diberikannya pinjaman modal dari PNPM-MP yang pada dasarnya adalah untuk penanggulangan kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan dan mengembangkan usaha masyarakat yang masih kurang mampu. Dalam melaksanakan kebaikan, manusia hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT, dan tidak memiliki tujuan untuk keuntungan saja. Menurut nalar dari sisi tujuannya pinjaman UPK PNPM-MP Kecamatan Kemranjen terdapat riba sebab adanya tambahan yang sudah ditetapkan di awal. Riba merupakan penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pokok yang dibebankan pada peminjam. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا
يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ
وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ
أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (berutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu," (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Jadi, Dengan begitu, walaupun tujuan dari program UPK PNPM-MP Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas ini sangat mulia yaitu untuk menolong mengembangkan ekonomi masyarakatnya dengan tujuan peningkatan penghasilan warga dengan cara memberikan pinjaman modal usaha untuk dalam membuat maupun mengembangkan usahanya, tetapi dalam tinjauan islam metode yang digunakan bersifat haram karena mengandung riba.

5. Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi menurut Wahjudin Sumpeno adalah cara yang dilaksanakan untuk menyempurnakan suatu rancangan yang bertujuan agar rancangan tersebut dapat dikembangkan secara mandiri. Program yang dirancang harus mengikut sertakan masyarakat dan melibatkan beberapa pihak yaitu lembaga pemerintah, lembaga penelitian, pergruan tinggi, dan pihak-pihak yang lain, hal ini dilakukan secara terus menerus. Ekonomi dapat menjadi tujuan yang utama dari kebijakan dan pertumbuhan ekonomi yang dianggap metode penyedia lapangan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut ini:

وَلاَتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

Artinya: "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya." (Q.S. Al-Isra'/17: 29).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya UPK PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan dapat memacu masyarakat untuk membuka usahanya dengan baik sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupa masyarakat. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan memberikan bantuan modal usaha melalui pembiayaan untuk meningkatkan penghasilan.

6. Pengembangan Ekonomi dalam islam

Pengembangan ekonomi dalam Agama islam juga sangat dianjurkan untuk kita semua supaya berusha dan bekerja guna mendapat rezeki dari Allah SWT. sebab rezeki itu tidak bisa didapatkan tanpa adanya usaha yang dilakukan. Agama islam telah memberi pelajaran kepada umat manusia bahwasannya Allah SWT tidak akan merubah kehidupan umatnya sebelum umatnya yang akan terus berusaha. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut ini:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

Artinya: "Pada hari ini, kamu telah menyempurnakan untuk kamu agamamu dan telah memiliki Kucukupkan bagiamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam telah jadi agamamu." (QS Al-Maidah (5):3)

Jadi, pengembangan ekonomi dalam islam menerapkan Sikap tolong-menolong, kebersamaan antar tetangga, membangun sarana prasana untuk masyarakat, infaq dan sadaqah untuk masjid dan warga yang kurang mampu serta dalam Agama islam memberi perhatian dan pertimbangan dalam berbuat kebaikan sesuai dengan syariat islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

rasa ingin tahu manusia terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan memperlajari secara cermat serta memformulasikan hipotesis sehingga Penelitian adalah penyaluran diperoleh pencapaian kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya *(Siregar, 2013).* Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian *(Bungin, 2007: 5).* Penelitian kualitatif ini suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terjadi dilapangan *(Suryabrata, 2005: 18).*

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Penelitian ini menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan terhadap pembiayaan pinjaman bergulir untuk meningkatan ekonomi masyarakat, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan kata. Artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen pribadi.

Adapun jenis-jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung atau penilitian lapangan yang disebut juga (field research), penelitian ini di lakukan dengan cara langsung terjun di lingkungan

masyarakat, lembaga atau organisasi, atau pemerintahan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang bersifat kualitatif dilakukan secara rapi dan intensif, peneliti secara langsung terjun di lapangan untuk mendapatkan data-data, mencatat dengan hati-hati tentang data yang didapat langsung, melakukan analisis langsung terhadap dokumen didapatkan dilapangan, serta membuat laporan secara rinci. Penelitian yang dilakukan penulis berada di lingkungan masyarakat Desa Karanggintung, Kemranjen, Banyumas dan dilakukan di UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini peneliti ingin megulang kembali data terkait peran dan pengelolaan pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan terhadap perekonomian masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi Penelitian

Penempatan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian penelitian diadakan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamtan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Alasan peneliti tertarik memilih Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri karena ini merupakan satu satunya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang terdapat di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, sehingga peneliti tertarik untuk melihat peran UPK serta kegiatan pembiayaan/pinjaman bergulir tanpa agunan yang disalurkan kepada masyarakat.

Sedangkan alasan peneliti memilih Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen karena masyarakatnya yang produktif dalam pengambilan pembiayaan/pinjaman bergulir, penyaluran pembiayaan ini kebanyakan diambil oleh ibu-ibu yang mempunyai usaha kecil-kecilan dan usaha produksi rumah tangga yang membutuhkan modal untuk keberlangsungan usaha mereka, sehingga ibu-ibu ini berinisiatif membuat kelompok-kelompok untuk pengambilan pembiayaan/pinjaman bergulir yang di

salurkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai modal usaha. penelitian dilakukan dengan pertimbangan waktu, lokasi, tenaga dan biaya.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut ini merupakan penjelasan dari sumber pengumpulan data:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan secara langsung dengan objek yang digunakan peneliti. Sumber primer yang paling utama adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Sumber data primer bisa berbentuk buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara kepada narasumber secara langsung.

Dalam penelitian ini peneliti dapat mencari Data primer dengan cara dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan ketua atau wakil ketua UPK, masyarakat, serta pemerintah setempat. untuk membenarkan fakta yang terkait dengan peran dan pengelolaan pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kemranjen, Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Sumber data sekunder yaitu sumber yang bisa berasal dari orang lain maupun dokumen. Data sekunder merupakan data pendukung data primer. Peniliti mendapatkan data sekunder yang bersumber dari jurnal dan buku, serta dokumen lain yang mendukung data primer. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan media yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan modal kerja awal pendirian Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri brosur pembiayaan,

laporan perkembangan penyaluran pembiayaan, struktur organisasi dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang valid dan kebenarannya bersifat objektif, rasional, dan dapat di pertanggung jawabkan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan, dimana pertanyaannya dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan dari pihak yang di wawancarai *(Abdurrahmat, hal 105).* Ada dua jenis teknik wawancara yang dilakukan untuk digunakan dalam penelitian yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur adalah dilaksanakan mengalir dengan tetap fokus kepada penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kemranjen, masyarakat yang terlibat dan aparat desa.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses. Dimana terdapat salah satu proses yang penting adalah proses pengamatan atau analisis. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan, serta pencatatan poin penting terhadap keadaan atau perilaku objek dalam penelitian *(Abdurrahmat, hal 26)*. Peneliti akan melakukan observasi (pengamatan) terhadap proses kegiatan UPK serta keberlangsungan program pembiayaan bergulir di Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang memuat penjelasan dan pemikiran tentang kejadian yang di hadapi peneliti. Ada beberapa hal yang terjadi yang dialami peneliti baik sampel data untuk masyarakat mengenai dampak yang terjadi terhadap perekonomian masyarakat setelah mendapatkan pinjaman modal untuk usaha. Metode ini merupakan salah satu metode pelengkap untuk melakukan penelitian. Dokumenter secara langsung dilakukan pada UPK PNPM Mandiri Pedesaan dan masyarakat yang terlibat.

E. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan peneliti terkumpul selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yang interaktif yang dimuai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif. Yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model miles dan Huberman, yang tahapannya berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pemabstraksian dan pentransformasi data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal penelitian penulis melakukan kerangka konseptual, permasalahan, dan pendekatan pengumpulan data yang

diperoleh. Selama pengumpulan data, penulis membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis, yang tidak terpisah fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interprestasi bisa ditarik kesimpulan.

Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang valid. Ketika peneliti menyaksikan keberadaan data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informasi lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui. Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dengan pihak pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Masyarakat, serta Pemerintah Setempat. Peneliti akan melakukan pengecekan ulang, membuang yang tidak perlu, untuk memperoleh hasil yang mudah dimengerti.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya jika diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Data yang telah dilakukan pengecekan tersebut akan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.

Proses selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, alur, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai dari suatu kegiatan dari konfirugasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Setelah proses pengumpulan data, reduksi data, model data, hingga akhirnya menentukan kesimpulan. Kesimpulan ditarik setelah peneliti mendapatkan pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kesimpulan yang dapat menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan pada narasumber.

Langkah terkahir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

F. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian dalam kualitatif, instrumennya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi data yaitu mengumpulkan data dari berbagai metode dan dengan cara menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesaui dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh, yaitu keterangan yang didapat dari sumber-sumber data telah sama, maka data yang didapatkan lebih kredibel.

Sugiyono membedakan empat macam triangulasi, diantaranya dengan memanfaatkan sumber, artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Jadi, setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian data hasil penelitian itu dihubungkan sehingga saling melengkapi.

UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Di Desa Karanggintung adalah desa yang terletak di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, sedangkan letak geografis Desa Karanggintung ada di dataran tinggi atau pegunungan. Di Desa Karanggintung terdapat 6 RW dan 27 RT yang didalamnya terdapat 567 jumlah penduduk.

1. Batas Wilayah dan Akses

   Desa Karanggintung terletak di ujung timur Kabupaten Banyumas dan berbatasan dengan Desa Kemawi disebelah utara, Desa Ketanda disebelah timur, Desa Karangsalam disebelah barat, dan Desa Petarangan disebelah selatan. Akses untuk menuju desa Karanggintung biasanya melalui jalan gendis mas.

2. Wilayah Administratif dan Penduduk

   Desa Karanggintung memiliki wisata alam yang cukup indah dan membuat udara di Desa Karanggintung terasa sejuk dan segar. Secara geografis Desa Karanggintung berada di dataran tinggi/pegunungan yang banyak ditumbuhi dengan pohon kelapa dan sevagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai penderes. Budaya atau kesenian yang masih lestari antara lain ada Ebeg, Gamelan, Takiran, Kenthongan dan Dolanan Tradisional. Di Desa Karanggintung juga mempunyai beberapa wisata alam yang sangat indah diantaranya adalah Bukit Pangonan Indah, Embung Tapak Bima, Makam dan Petilasan, Taman buatan Agro Tunggul Mas (ATM) DAN Ebok Mix Farm.

3. Sarana Pendidikan

   Berikut ini beberapa fasilitas pendidikan yang ada pada Desa Karanggintung yaitu:

   a. SD N 1 Karanggintung

b. SD N 2 Karanggintung
c. MI AL-Hidayah Karanggintung
d. 2 TK Pertiwi
e. 2 POS PAUD
f. TPQ At-Taqwa

B. Sejarah Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP

Dalam melaksanakan pembangunan dalam semua bidang, seluruh kemampuan serta potensi wajib untuk diambil manfaatnya secara baik dan diikuti dengan kebijakan serta cara guna memberi bantuan dan peningkatan kemampan yang besar bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Maka, dalam partisipasi pada prosedur pembangunan, antara lain sebagai contoh adalah dengan penguatan modal deengan media kebijaksanaan kredit yang lebih besar agar mudah dan dapat memadai, oleh karena itu dapat mencadi pendorong ratanya pembangunan serta hasilnya.

Manusia yang pada hakikatnya adalah makhluk sosial maka tidak pernah terlepas dari kemauan untuk pemenuhan semua kebutuhan, baik warga konsumtif ataupun produktif. Kebutuhan tersebut harus terus ada peningkatan dari massa ke massa, sedangkan kemampuan dalam pemenuhannya memiliki keterbatasan. Dengan munculnya perasaan secara finansial membuat masyarakat mempunyai pikiran dalam berusaha mendapat pertolongan modal dari yang lain dan bersumber dari sejumlah sumber, baik menggunakan lembaga bank ataupun non bank.

Kegiatan PNPM Mandiri beoperasi dan ditetapkan pada 30 April 2007 dan berakhir dan mengalami pemberhentian pada tahun 2014 oleh presiden Joko Widodo karena beberapa alasan dan isu yang kurang efektif. Akan tetapi program PNPM Mandiri beroperasi kembali pada tahun 2015 dengan menjadi Badan Usaha Milik Desa dan diolah secara mandiri oleh pemerintah desa, antara lain yaitu Unit Pengelola Kegiatan atau yang biasa disebut dengan UPK yang merupakan program lanjutan dari PNPM Mandiri Pedesaan yang sudah diberhentikan oleh pemerintahan.

Unit Pengelola Kegiatan di Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas bertujuan untuk menolong mayarakat yang mempunyai penghasilan yang kurang, baik untuk kegiatan konsumsi maupun produksi UMKM. Unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, bukan lembaga bank atau yang biasa disebut dengan non bank dan menjadi cara lain bagi warga Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas untuk mendapat pinjaman modal dengan cepat. Tujuan utama yang lain pada UPK di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas adalah untuk menolong warga yang memiliki penghasilan yang rendah dan menengah kebawah dengan cara kegiatan berupa pinjaman bergulir.

C. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir

UPK sebagai sebuah Unit kerja BKAD pada tingkat kecamatan dalam pelaksanaan program yang memegang amanat dari MAD. Adapun produk dari Unit Pengelola Kegiatan yaitu mengolah keungan dan melayani pengajuan pinjaman oleh warga dengan cara membuat kelompok masyarakat. Pengolahan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan baik SPP maupun UEP memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memudahkan masyarakat ataupun kelompok dalam mendapatkan modal untuk usahanya.
2. Melestarikan dan mengembangkan pinjaman bergulir sesuai degan tujuan dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan.
3. Meningkatkan sarana pengolahan program pinjaman bergulir pada tingkat desa.
4. Mempersiapkan program lembaga Unit Pengelola Kegiatan yang bertugas dalam mengolah pinjaman bergulir yang berfokus pada program yang terus berkelanjutan, memiliki sifat yang transparan dan akuntabel.

5. Meningkatkan layanan untuk RTM dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui pemberian modal untuk usaha terhadap anggota kelompok yang mengajukan pinjaman.

Pengelolaan Dana Bergulir adalah cara untuk menjaga kualitas dari pinjaman yang disalurkan oleh Unit Pengelola Kegiatan untuk anggota kelompok yang mengajukan pinjaman yang didampingi oleh pihak kecamatan. Segala proses pembiayaan pinjaman bergulir tang sudah disepakati oleh seluruh pihak yang ada dalam proses pengelolaan bertujuan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk itu maka proses pembiayaan pinjaman bergulir harus mempunyai susunan pedoman dan tata cara menyalurkan pembiayaan dengan SOP yang sudah disahkan oleh MAD yang bersatu dalam bagian AD/ART BKAD.

Adapun sasaran dari Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP kecamatan Kemranjen antara lain adalah:

1. Jenis-jenis kelompok
   a. Kelompok Simpan Pinjam atau yang disingkat KSP merupakan kegiatan pada kelompok yang mengelola simpanan serta pinjaman dengan memprioritaskan kelompok yang didalamnya beranggotakan Rumah Tangga Miskin.
   b. Kelompok Usaha Bersama yang disingkat KUB merupakan anggota kelompok yang memiliki usaha yang diolah secara bersama-sama oleh anggotanya, dan memprioritaskan kelompok yang didalmnya beranggotakan Rumah Tangga Miskin.
   c. Kelompok Aneka Usaha atau yang disingkat KAU merupakan kelompok RTM yang memiliki kegiatan usaha sesuai dengan usaha masing-masing dari anggotanya.
2. Fungsi kelompok

   Dalam pelayanan pemanfaatan pinjaman bergulir memiliki fungsi kelompok sebagai berikut:

a. Kelompok Penyalur merupakan anggota kelompok yang bertugas dalam penyaluran pinjaman bergulir dari Unit Pengelola Kegiatan kepada anggota yang mengajukan pinjaman dengan syarat yang sudah ditentukan oleh Unit Pengelola Kegiatan.
b. Kelompok Pengelola merupakan kelompok yang bertugas dalam pengelolaan pembiayaan pinjaman bergulir dari Unit Pengelola Kegiatan yang dilakukan secara mandiri dengan ketetapan dari kelompok atas dasar musyawarah/kesepakatan antara kelompok dan anggota/ pemanfaat.

3. Aturan pendanaan

Berikut ini beberapa aturan pendanaan dalam UPK PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:

a. Dana Perguliran UEP hanya dimanfaatkan dalam membantu kegiatan UEP dan SPP, dan Dana Perguliran SPP hanya dimanfaatkan dalam pembiayaan kegiatan SPP.
b. Tidak ada pinjaman yang diberikan yang bersifat mandiri
c. Kelompok yang diberikan dana antara lain adalah : Kelompok Simpan Pinjam (KSP), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Aneka Usaha (KAU).
d. Kelompok yang mengajukan pinjaman bergulir adalah kelompok yang mampu mengembangkan usahanya.
e. Pendanaan dilaksanakan sesuai dengan kelompok yang bersangkutan.
f. Dengan perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan dan anggota kelompok yang diketahui Kepala Desa / Kelurahan bersangkutan.
g. Hasil musyawarah dari penyaluran dana yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Tim Verifikasi Perguliran, Ketua UPK dan disetujui oleh BKAD.

h. Dalam proses verifikasi maka kelompok dimasukkan dalam daftar tunggu kelompok yang mengajukan pinjaman bergulir dan ditentukan dengan adanya berita acara.

Berikut ini merupakan ketentuan dan persyaratan bagi peminjaman bergulir di UPK PNPM-MP Kecamatan Kemranjen:

1. Pinjaman diberikan kepada kelompok yang sudah jelas maksud dan tujuannya serta kemampuannya dalam membayar angsuran tiap jatuh tempo.
2. Setiap anggota kelompok yang mengajukan pinjaman bergulir harus memiliki usaha baik dalam bidang perdagangan, jasa bahkan kerajinan dan pada bidang yang lain.
3. Anggota kelompok berasal dari desa dimana kelompok berada di Kecamatan Kemranjen
4. Jenis Kelompok merupakan Kelompok SPP yang beranggotakan khusus bagi perempuan sebagai berikut :
   a. Kelompok sudah berdiri minimal dalam waktu satu tahun.
   b. Jumlah minimal anggota adalah 7 orang sedangkan paling maksimal adalah 30 orang dan didalmnya berisi pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan juga bendahara.
   c. 60 % dari jumlah anggota yang mengajukan pinjaman memiliki usaha pada bidang tertentu.
   d. Bagi Kelompok Simpan Pinjam, anggota kelompoknya memiliki jumlah dan jenis tabungan yang beragam antara lain tabungan pokok, tabungan wajib, tabungan sukarela dan juga tabungan yang lainnya.
   e. Didalam kelompok harus mempunya pencatatan administrasi dan pembukuan yang dilaksanakan dengan tertib dan teratur.
   f. Kelompok memiliki aturan yang jelas dan harus ditaati oleh seluruh anggota kelompok maupun pengurusnya.
   g. Pengolahan kelompok dilaksanakan dengan cara yang terbuka.

h. Kelompok dalam pengolahan pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan diperbolehkan merubah aturan dalam kredit misalnya besaran jasa, jatuh tempo, cara mengangsur dan yang lainnya sesuai dengan kesepakatan seluruh anggotanya.

i. Kelompok yang sudah menyelesaikan pembiayaan tersebut dapat mengajukan pinjaman kembali dengan syarat sebagai berikut:

Jika memiliki catatan yang baik dan tidak menunggak, maka kelompok tersebut dapat mengajukan pinjaman kembali dengan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya;

Jika mempunyai catatan tunggakan sampai dengan dua kali maka dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya;

Jika mempunyai catatan tunggakan lebih dari dua kali maka kelompok dapat mengajukan pinjaman maksimal 75 % dari pinjaman sebelumnya

j. Pinjaman untuk pemanfaat SPP adalah maksimal Rp. 10.000.000.00,- (bagi yang lebih 3 kali pinjam dan belum pernah ada tunggakan angsuran).

Berikut ini adalah skema kredit dalam UPK PNPM-MP Kecamatan Kemranjen adalah :

1. Jasa (bunga) pinjaman yang ditetapkan

Besar kecilnya jasa dalam pinjaman bergulir sudah disepakati berdasarkan bunga yang ada di pasaran pada lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Kemranjen Pada tahun ini ditentukan sebagai berikut:

a. Kelompok Pengelola

Dari Unit Pengelola Kegiatan kepada Kelompok sebesar 1,1 persen perbulan tetap. Sementara Jasa dari Kelompok kepada anggotanya atas kesepakatan bersama.

b. Kelompok penyalur

Dari Unit Pengelola Kegiatan kepada Kelompok, sebesar 1,1 persen perbulan tetap. Sementara itu besar jasa dari kelompok kepada anggota jumlahnya sama dengan tingkat bunga dari Unit Pengelola Kegiatan.

2. Jangka waktu pinjaman

   Jangka waktu pinjaman minimal 12 bulan atau 1 tahun.

3. Sistem angsuran

   Angsuran terdiri dari jasa pinjaman dan pokok pinjaman.

4. Jaminan atas pinjaman yang diterima

   Dasar dari proses pinjaman bergulir ini tidak menggunakan jaminan, jaminan dalam proses ini hanyalah kepercayaan, namun dalam pengurangan resiko yang terjadi maka jaminan dapat berupa sebagai berikut :

   a. Kemampuan setiap anggota kelompok dalam mengajukan pinjaman.
   b. Jaminan tunjuk, yang terdapat dalam surat pernyataan dari pengurus kelompok dan anggota kelompok, jika terjadi wanprestasi atas pinjaman yang diterima maka peminjam (kelompok dan anggota) harus mau menyerahkan harta benda yang ada dilingkungannya baik yang sudah berwujud maupun yang akan berwujud.
   c. Untuk pinjaman dalam kondisi khusus kemungkinan dapat menggunakan jaminan yang berbentuk fisik misalnya seperti sertifikat tanah, BPKB dan lain sebagainya.

Penghargaan dan hukuman/sanksi yang ada pada UPK PNPM Mandiri pedesaan Kecamatan Kemranjen adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kelompok yang lancar dalam angsuran pengembalian pinjaman akan diberikan Reward / IPTW setelah lunas pinjamannya sebesar 10 % dari Jasa Pinjaman di UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen,

2. Untuk kelompok yang masih macet dalam angsuran, maka akan diberikan sanksi seperti berikut ini :
   a. Reward / IPTW akan hilang dan akan berubah menjadi pemasukan yang lain untuk operasional Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen,
   b. Apabila dalam pembayaran angsuran menunggak dan dalam kategori Macet maka lingkungan Rukun Warga (RW) dimana kelompok bersangkutan berada tidak akan diprioritaskan dalam pendanaan yang bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen sampai dengan kewajibannya terlunasi dan terselesaikan.

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana pinjaman bergulir pada UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen adalah:

1. Melalui musyawarah di desa maka anggota kelompok bisa melakukan pengajuan jumlah pinjaman baik secara tertulis maupun langsung menyebutkan kepada pengurusnya,
2. Apabila sudah disepakati oleh Pengurusnya, maka Pengurus Kelompok akan merangkum semua pengajuan anggotanya, selanjutnya mengisi form. Proposal Pinjaman dari UPK yang diketahui oleh Koordinator Kelompok Deşa dan Kepala Desa/ Kelurahan,
3. Pengurus UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen akan mengolah pengajuan proposal tersebut melalui beberapa tahapan, jika berkas masih belum lengkap maka proposal akan dikembalikan agar bisa dilengkapi kembali dan apabila sudah memenuhi syarat maka dicatat dalam buku Register Pinjaman,
4. Sekretaris meneliti ulang dan mengklasifikasi antara pinjaman baru dan pinjaman lama bagi pinjaman lama maka Kartu Pinjaman yang telah dimutakhirkan oleh Sekretari dijadikan bagian dari proposal / ajuan pinjaman sehingga dapat dievaluasi kelancaran angsurannya,

5. Proposal / ajuan pinjaman baik pinjaman baru maupun lama diajukan kepada Ketua UPK untuk menentukan langkah — langkah selanjutnya,
6. Sekretaris membuat penjadwalan dan pemberitahuan akan dilakukannya pengunjungan anggota kelompok secara langsung guna melaksanakan Analisis Pinjaman anggota layak atau tidak dengan media Formulir Analisis Pinjaman 1 untuk Kelompok Simpan Pinjam Pengelola dan Formulir Analisis Pinjaman 2 untuk kelompok UEP Penyalur.
7. Tim Verifikasi setelah dilaksanakannya study tersebut, selanjutnya menyusun rekomendasi atas analisa pinjaman serta hasil kunjungan lapangan tersebut dan disampaikan kepada Ketua UPK untuk dilakukan pembahasan bersama Tim Pendanaan Perguliran,
8. Apabila proposal / ajuan pinjaman kelompok dinyatakan LAYAK maka Sehetaris membuat pemberitahuan kepada kelompok bersangkutan perihal pencairan / realisasi perguliran pinjaman serta Surat Peıjanjian Pinjaman ; dan apabila dinyatakan TIDAK LAYAK maka dibuat surat pemberitahuan perihal ketidak layakan pirjaman kepada kelompok yang bersangkutan,
9. Bendahara dengan dibantu Kasier merekap plafon pinjaman yang akan direalisasikan dan membuat / menyiapkan Kartu Pinjaman serta berkoordinasi dengan Bank,
10. Pengurus Kelompok berkoordinasi dengan anggota / calon peminjam tentang waktu dan tempat pencairan ; Pengurus Kelompok pada hari pencairan dan sebelum dilakukan pencairan mengambil dana perguliran di kantor UPK
11. Pengelola UPK beserta Koordinator Kelompok Desa/ Kelurahan mendampingi, menyaksikan dan memastikan pencairan dana pinjaman / perguliran direalisasikan dan diterimakan kepada peminjam yang tersebut dalam surat perjanjian.

D. Struktur Organisasi UPK PNPM Mandiri

Organisasi adalah salah satu unsur terpenting dalam mengimpun orang untuk melaksanakan kerjasama dan untuk tercapainya tujuan bersama. Maka dengan begitu bisa disimpulkan bahwa anggota sebuah kelompok adalah usaha yang dilaksanakan secara bersama atas azas kekeluargaan dan berjalan pada semua bidang untuk mensejahterakan dengan cara mengumpulkan modal, penyaluran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan semua anggota.

Sama dengan Unit Pegelola Kegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, perlu adanya pembuatan susunan organisasi secara jelas sebagai salah satu proses dalam persiapan prosedur, faktor dan struktur organisasi. Dengan begitu organisasa lebih mudah melakukan rencana yang sudah ditetapkan. UPK PNPM-MP Kecamatan Kemranjen juga perlu kejelasann dalam melakukan pengikatan bisnis antara tugas dan pertanggung jawaban dari unsur yang sudah ada, yang mana semua unsur tersebut wajib ada pada sebuah organisasi dengan baik.

Dalam pembuatan struktur, Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Kemranjen perlu memperhatikan kedudukan yang baik dalam pengisian jabatan yang sesuai dengan mampu atau tidaknya individu tersebut. Adapun struktur dari Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Kemranjen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kepengurusan UPK PNPM Mandiri Kecamatan Kemranjen

Tabel 2.

No	Jabatan	Nama personalia	Tugas dan wewenang
1.	Ketua	Ibu Rosita Ambarwati	Sebagai Penanggung Jawab keluar dan kedalam
2.	Sekretaris	Bapak Sarwan	Sebagai penanggung jawab administrasi
3.	Bendahara	Bapak Tri Hartanto	Bertugas pada bidang Keuangan

4.	Tim verifikasi	Ibu Uswatun H dan Ibu Atik V	Bertugas untuk menyusun Rencana Pinjaman Tahunan UPK

Ketua BKAD : Bapak Sabar Santoso

E. Fungsi Pengurus UPK secara umum

Secara umum, Lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara umum memiliki tugas sebagai berikut:

1. Bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap setiap anggota kelompok peminjam.
2. Bertugas untuk melakukan sosialisasi dan penerapan terhadap prinsip-prinsip PNPM-MP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM-MP bersama dengan anggota pelaku lainnya.
3. Bertugas untuk membuat perencanaan keuangan dan membuat rencana kerja yang selaras dengan kepentingn program yang disampaikan oleh BKAD/MAD.
4. Bertugas untuk melakukan pelaporan dan administrasi setiap ada transaksi baik berupa transaksi keuangan maupun transaksi non-keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan program yang dijalankan.
5. Bertugas untuk membuat peraturan pinjaman bergulir yang sesuai dengan mekanisme dan prinsip dari PNPM Mandiri Pedesaan oleh BKAD/MAD untuk kemudian di sahkan dan menegakkan peraturan tersebut dalam setiap pelaksanaan yang bertujuan untuk melestarikan dan bergulir.
6. Bertugas untuk melakukan fasilitasi dengan anggota lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-MP.
7. Bertugas untuk menyiapkan dukungan secara teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak lain dengan pengembangan potensi yang ada di wilayah.

8. Bertugas untuk melakukan pengokohan kelompok peminjam dalam berbagai proses seperti kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, serta untuk memfasilitasi pengembanga usaha masyarakat atau kelompok.
9. Bertugas untuk membantu dalah hal pengembangan jumlah anggota program melalui beberapa cara yaitu dengan pelatihan, bimbingan di lapangan, dan pendampingan setiap ada kegiatan PNPM-MP.
10. Bertugas untuk mendorong transparansi dalam pengolahan keuangan, pengolahan pinjaman, pengembangan program dan informasi-informasi terkait lainnya melalui sarana papan informasi dan penyampaian secara langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.
11. Bertugas untuk membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada anggota di desa yang terkait langsung satu minggu sebelum dilakukan pelaksanaan.
12. Bertugas untuk melakukan bimbingan secara teknis dan pemerksiaan administrasi secara langsung dan yang terakhir pelaporan anggota desa.
13. Bertugas untuk melakukan evaluasi serta pemeriksaan yang dilakukan secara langsung Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penggunaan Dana yang dibuat oleh pihak desa yang dilakukan setiap tahun dalam proses PNPM-MP yang sesuai dengan ketetapan yang ada.

Lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara umum memiliki tanggung jawab antara lain adalah:

1. Memiliki tanggung jawab terhadap pengelolan kegiatan dana bergulir.
2. Memiliki tanggung jawab pada semua kegiatan pengolahan dana pada PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di kecamatan.
3. Memiliki tanggung jawab pada kegiatan pengolahan administrasi serta semua laporan transaksi kegiatan pada PNPM Mandiri Pedesaan.

4. Memiliki tanggung jawab pada kegiatan pengolahan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik kegiatan pengelolaan dalam bidang keuangan ataupun kegiatan pengelolaan yang bersifat non-keuangan.

Dalam melaksanakan kewajiban harian dikhususkan dalam mengolah keuangan, maka seluruh pengurus Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan memiliki wewenang seperti berikut ini :

Ketua UPK

1. Mengkordinasikan pelaksanan program bidang keuangan yang telah disepakati oleh MAD dan keputusan BKAD.
2. Mengambil/mencairkan keuangan yang disimpan di bank
3. Mengendalikan Organisasi secara menyeluruh
4. Memimpin rapat-rapat pertemuan UPK
5. Mewakili UPK dalam pertemuan dengan pihak-pihak terkait
6. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan mendorong peningkatan prestasi kerja UPK
7. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan para pelaku BKAD maupun instansi terkait Menyusun dan merencanakan program kerja UPK bersama sekretaris dan Bendahara.
8. Memberikan persetujuan atau menolak atas usulan pengajuan pengggunaan dana oleh bendahara.
9. Melakukan pemeriksaan RPD dan LPD.
10. Memberikan laporan pertanggung jawaban akhir tahun kepada BKAD
11. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan mendorong peningkatan prestasi kerja
12. Menandatangani laporan, menandatangani surat perjanjian kredit, pencairan dari bank, pembukaan rekening, pencairan ke kelompok dan tanda bukti penerirnaan angsuran.
13. Melakukan pembinaan kelompok peminjam dana bergulir
14. Mensosialisasikan program dana bergulir kepada masyarakat

Bendahara UPK

1. Menyusun laporan portanggung jawaban akhir tahun bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris.
2. Menyimpan dan memegang semua rekening bank dana UPK
3. Memegang dan menyimpan kas atas perintah/persetujuan Ketua
4. Menyetorkan dan mengambil uang di bank atas perintah Ketua
5. Menandatangani kwitansi atas persetujuan Ketua
6. Bersama—sama Ketua dan Sekretaris meyusun program kerja UPK
7. Membuat kelengkapan administrasi keuangan UPK
8. Menutup kas setiap hari kerja
9. Menyimpan/menyetorkan keuangan UPK ke bank dan mengarsipkan slip setoran bank
10. Membuat pembukuan dan laporan keuangan UPK
11. Menerima angsuran kelompok
12. Bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan angsuran.
13. Menyetorkan dan mengambil uang di bank atas perintah Ketua
14. Melakukan pembinaan kelompok peminjarn dana bergulir
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajer atau juru buku.
16. Mensosialisasikan program dana bergulir kepada masyarakat
17. Mengelola administrasi keuangan

Sekretaris UPK

1. Membantu ketua dalam menyiapkan administrasi untuk mengkordinasikan pelaksanan program UPK yang telah digariskan oleh MAD dan keputusan BKAD.
2. Mewakili tugas-tugas ketua jika ketua berhalangan
3. Mencatat iventaris unit pengelola kegiatan dan lembaga pendukung Iainnya.
4. Pengarsipan/pendokumentasian secara tertib semua administrasi

5. Membuat pembukuan dan pelaporan kegiatan perguliran
6. Memastikan validnya laporan
7. Mebuat dan menyimpan berkas perguliran
8. Mengelola administrasi keuangan dan pelaporan kegiatan dana bergulir Bertanggungjawab mengelola buku kas dan bank SPP/UEP, kartu pinjaman/kredit SPP/UEP beserta bukti—bukti transaksi, laporan keuangan dan analisa laporan keuangan.
9. Mensosialisasikan program dana bergulir kepada masyarakat
10. Menyusun Laporan Pertanggung jawaban akhir tahun, bersama bendahara dan ketua

Staf Lapangan

1. Tugas utama menagih anggota yang memiliki pinaman dan belum membayar angsuran sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.
2. Menyetorkan dan mengambil uang di bank atas perintah ketua.
3. Melakukan pembinaan kelompok peminjam dana bergulir.
4. Mensosialisasikan program dana bergulir kepada masyarakat.
5. Membantu menyusun laporan Pertanggung jawaban akhir tahun, bersama ketua, bendahara, sekertaris.

F. Tugas-tugas Pokok Pengurus UPK PNPM

1. Membantu merencanakan pengolahan keuangan BKAD.
2. Melaksanakan manajemen pengelolaan kegiatan dana pinjman bergulir.
3. Menjalankan manajamen pengolahan pembiayaan dana program.
4. Membuat laporan keuangan dan kegiatan secara rutin setiap bulan yang disampaikan pada BKAD.
5. Jika ada dana program,mka membuat laporan keuangan dan kegiatan secara rutin setiap bulan yang disampaikan kepada lembaga terkait pemberi program.

6. Memberikan informasi dan pelayanan pembiayaan pada bidang lain di BKAD.
7. Setiap kelompok diberi layanan informasi untuk usahanya.
8. Melakukan sosialisasi mengenai pinjaman bergulir pada masyarakat.
9. Melakukan pengelolaan angsuran dari anggota peminjam.
10. Membina seluruh anggota kelompok yang mengajukan pinjaman.
11. Menagih anggota yang mengajukan pinjaman yang sudah melewati jatuh tempo dalam angsuran yang sudah di sepakati.
12. Mencatat inventaris UPK dan lembaga lain yang mendukungnya.
13. Membuat susunan dan bertanggung jawab dalam bidang keuangan kepada BKAD melalui MAD.

G. Pembahasan Penelitian

Sebelum menjelaskan hasil dari penelitian ini, maka sebelum itu peneliti menyampaikan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan, yaitu diawali dengan menyampaikan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) kepada BKAD. Kemudian setelah mendapat persetjuan maka selanjutnya disampaikan peneliti akan melakukan observasi dan wawancara ke lapangan untuk mendapatkan data. Setelah mendapat izin untuk melakukan penelitian, peneliti menemui ibu Rosita Ambarwati selaku pemimpin Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Keamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dan kemudian dapat melakukan kegiatan penelitian.

1. Peranan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

Dengan program Pemberdayaan yang dilaksanakan pada masyarakat salah satu program UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen, tetapi tetap wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berfokus pada cara untuk menyadarkan

masyarakat agar lebih pintar dan dapat melakukan komunikasi antara anggota dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Maka dari itu, ketika pengelola dari pihak eksternal, baik berupa lembaga pemerintahan ataupun non-pemerintahan, program pemberdayaan sebagai cara agar tetap terlaksana pada kelompok tertentu. Apabila pengelola pemberdayaan pihak yang berasal dari luar anggota, maka aktivitas memberdayakan masyarakat akan diikutkan dengan cara terminasi, dan apabila pengelola proses memberdayakan masyarakat bersumber dari pihak anggota dan juga akan ditunjukkan pada aktivitas memberdayakan masyarakat yang berlangsung terus menerus.

Program Pemberdayaan cara yang dilaksanakan dalam peningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik dan maju, selain itu memiliki tujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini memiliki persamaan dengan apa yang diperankan oleh Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Kemranjen, yang mana peran utama dari UPK PNPM Mandiri Kecamatan Kemranjen yaitu memberdayakan masyarakat di desa, dengan cara peningkatan kualitas hidup dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan cara yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan dalam hal memberdayakan masyarakat melalui pemberian dana untuk modal usaha dengan cara program pinjaman bergulir.

Di dalam pelaksanaan program pinjaman bergulir oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan maka warga akan terus dipantau oleh pihak kelurahan sebagai pemberi sarana. Tetapi , UPK PNPM-MP sendiri membuat program lembaga lokal dan memuat masyarakatnya untuk mengolah dan menjadi pengurus dalam membantu peran dari pemberi sarana kelurahan dalam pendampingan di berbagai kegiatan UPK PNPM Mandiri Pedesaan, yang didalamnya termasuk pengurus Unit Pengelola Kegiatan. Kader merupakan masyarakat yang dengan ikhlas menolong proses perkembangan yang tersusun dalam masyarakat *(Adi, 2008: 279 dalam Perwata, 2012: 35).*

Setelah dilakukannya wawancara bersama dengan Ibu Rosita Ambarwati selaku Ketua UPK Kecamatan Kemranjen, memaparkan bahwa UPK Kecamatan Kemranjen selain menjalankan aktivitas kegiatan menyalurkan pembiayaan pinjaman bergulir kepada warga yang bertjuan untuk menolong dalam pemberian modal usaha kecil. Dengan adanya dana pinjaman bergulir untuk modal usaha tersebut, maka keuntungan akan diberikan kembali untuk masyarakat dengan berbentuk program kegiatan untuk memberdayakan masyarakat yang telah menjadi peran utama bagi UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Dimulai pada tahun 2014-2022 UPK Kecamatan Kemranjen memulai dengan melakukan pemanfaatan dana pinjaman yang didapatkan dengan cara membagi hasilnya dari program pinjaman bergulir, dengan begitu dana dimanfaatkan untuk menolong masyarakat miskin dan kurang mampu. Dana bagi hasil dari tahun 2014-2022 dimanfaatkan untuk kegiatan memberdayakan masyarakat, dan disalurkan dengan berbentuk dibangunnya rumah untuk kaum dhuafa dan memberi dana perbaikan rumah yang sudah tidak layak untuk dihuni. Dan dana bagi hasil pada tahun 2017, disalurkan untuk memberi sumbangan berupa infaq dan santunan kepada masyarakat miskin.

Pengalokasian uang yang bersumber dari Bantuan Langsung Mandiri untuk kelompok SPP yang ditujukkan untuk membantu modal usaha pada bisnis yang dilakukan perempuan supaya warga dapat melakukan peningkatan pembuatan produksi dalam bidang ekonomi. Selain itu, pengalokakasian dana bantuan untuk modal usaha difokuskan pada warga yang kurang mampu dan memiliki bisanis atau usaha.

Salah satu produk yang ada pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM MP adalah kelompok SPP yang ada di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dimana aktivitas dalam kegiatannya yaitu sebagai pemberi modal usaha untuk anggota kelompok SPP yang memiliki bisnis kecil. Kelompok SPP di pedesaan mempunyai tujuan

yang bersifat umum yaitu untuk pembangunan kemampuan anggotanya , lalu metode pemberian dana untuk yang usaha kecil, terpenuhinya dana sosial untuk kebutuhan warga, penguatan lembaga keuangan kelompok SPP, membantu mengurangi RTM dan diciptakannya lowongan pekerjaan bagi pengangguran yang ada di desa. Untuk tujan yang bersifat khusus pada kegiatan SPP yaitu untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan pemberian dana usaha maupun, pemberian kesempatan bagi kaum perempuan dalam peningkatan perekonomi rumah tangga melalui pemberian dana untuk modal usaha, dan membantu dalam menguatkan lembaga SPP pada kaum wanita.

Dengan adanya wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan pinjaman bergulir kepada anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK PNPM Mandiri Kecamatan Kemranjen Kabupaten banyumas, yaitu Kamiyah, Suripah, Kaswen, dan Martini yang memaparkan hasilnya yaitu pemberian modal usaha melalui pinjaman bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kemranjen sangat berperan penting dalam menolong masyarakat serta anggotanya dalam memenuhi kebutuhan untuk usahanya. Sebagai contoh Suripah yang memiliki usaha membuat gula jawa, adanya bantuan modal untuk usahanya, Suripah dapat meningkatkan kualitas usahanya dengan lebih baik. Suripah memanfaatkan pinjaman bergulir untuk dibelikan alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan gula jawa dan untuk modal awal.

Sama halnya dengan ibu Martini yang memiliki usaha pada bidang yang sama dengan Suripah yaitu pembuatan gula jawa. Dengan adanya bantuan pinjaman bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kemranjen ibu martini sangat terbantu, modal tersebut membuat ibu martini dapat menjalankan usahanya itu dengan baik. Ibu martini juga dapat membayar angsuran dengan tepat waktu dan dapat membantu meringankan beban suaminya dalam membayar biaya sekolah untuk anaknya.

Sementara itu Ibu kamiyah yang memiliki bisnis yaitu jual beli bibit buah dan sebagai petani. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kemranjen, dimanfaatkan oleh ibu kamiyah untuk pembelian bibit kepada juragan atau kulak. Sehingga pembeli bibit tersebut sampai ke luar pulau jawa. Ibu Kamiyah juga sangat terbantu dengan adanya Bantuan modal yang diberikan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan dalam mencapai kesuksesan bisnisnya.

Yang selanjutnya ada ibu Kaswen dimana merupakan anggota dari kelompok SPP yang mengajukan pinjaman bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen. Ibu kaswen sendiri mengajukan pinjaman kepada UPK PNPM Mandiri Pedesaan juga untuk menambahkan modal usahanya yaitu warung sembako. Yang mana bisnisnya yaitu berjualan di warung kecil dan sebagai pedagang sembako. Bantuan modal yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen dipergunakan untuk penambahan barang-barang yang diperlukan dalam usahanya. Supaya bnatuan modal tersebut dapat diputar keuntungannya agar bisa membayar angsuran tepat waktu dan dapat merenovasi warungnya agar lebih nyaman.

Ibu Kasirah juga memiliki bisnis kecil yaitu dengan menitipkan kerupuk yang berasal dari singkong pada warung-warung, senjutnya juga ada ibu rodiyah yang memiliki usaha dalam pembuatan kue basah untuk dijual kembali di warung ataupun dipasar pagi. Mereka menyatakan bahwa pinjaman bergulir yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Bnayumas memang dapat mempermudah mereka dalam memenuhi modal untuk bisnisnya. Dengan begitu juga dapat menyisihkan uang dari keuntungan usahanya untuk membayar angsuran dengan tepat waktu serta mampu membeli barang yang diinginkan jadi tidak akan memberatkan beban para suami.

Dengan adanya penjelasan diatas dapat ditinjau Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen memiliki peran yang sangat berarti dalam memberdayakan masyarakatnya. Hal tersebut ditinjau dari sebelum adanya Unit Pengelola Kegiatan dan sesudah adanya Unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan Kemranjen, sebelum adanya UPK masyarakat desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen yang lebih khusus untuk anggota SPP yang mempunyai bisnis kecil-kecilan yang kadang mengalami masalah dalam pendaan untuk pengembangan bisnisnya. Walaupun demikian pada Kecamatan Kemranjen ada beberapa lembaga seperti bank tetapi masyarakat enggan mengajukan pinjaman dana kepada lembaga tersebut, alasannya karena mereka memiliki ketakutan jika tidak bisa membayarnya dan kurangnya pengetahuan tentan cara untuk mengajukan pinjaman, alasan mereka memilih UPK juga karena persyaratan yang mudah dan tanpa adanya jaminan. Tetapi, program kegiatan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang memang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat serta melakukan sosialisasi sebelum pemberian dana pinjaman.

Sehingga anggota Simpan Pinjam perempuan mampu memahami tentang tata cara mengajukan pinjaman bergulir, selain itu juga untuk hal pengajuan pinjaman bergulir ini dengan cara mengelompokan invidu bukan hanya perindividu sehingga para anggota wanita lebih tertarik dalam mengajukan pinjaman, sebab apabila ada masalah tentang penunggakan angsuran maka masalah tersebut akan ditanggung bersama satu kelompok tersebut bukan perindividu. Setelah adanya penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pengajuan pinjaman bergulir yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen sudah banyak memberi bantuan kepada masyarakat dalam menambah modal usahanya. Dan juga melakukan peningkatan ekonomi warga agar lebih baik daripada

sebelumnya, dan adanya program SPP pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

UPK PNPM Mandiri Kecamatan kemranjen bukan hanya mendapat tanggapan yang baik dari warga serta anggota pinjaman bergulir, bahkan mendapat kritikan yang konstruktif. Hasil wawancara dengan Ibu Rosita Ambarwati menyatakan bahwa dengan diadakannya lembaga Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan pada setiap Kecamatan, sudah banyak membantu masyarakat dalam mencukupi perekonomiannya bahkan dapat mensejahterake masyarakat miskin dengan bantuan modal usaha dari pinjaman bergulir oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan pada keseharian warga Bahkan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri secara tidak langsung telah membuka lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi penganguran. Dengan pinjaman modal yang diberikan membuat masyarakat lebih terdorong untuk membuka dan menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas telah melakukan perannya sebagaimana yang telah direncanakan dan diprogramkan oleh pemerintah, yaitu untuk memberdayakan masyarakat yang miskin dan masyarakat pedesaan, serta mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan.

2. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

Simpan dalam KBBI yaitu disimpan yang artinya menyimpan barang ataupun sesuatu pada tempat yang aman dengan tujuan agar tidak dirusak atau bahkan hilang dan yang lainnya. Simpanan merupakan barang atau sesuatu yang disimpan bisa dalam bentuk uang, maupun barang dan yang lain sebagainya *(Depdiknas, 2008).* Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 mengenai Koperasi Simpan Pinjam merupakan sejumlah dana yang disimpan oleh para

anggota pada pihak koperasi, dengan adanya perolehan jasa sesuai dengan kesepakatan bersama anatara anggota dan koperasi.

Pinjam memiliki arti meminjam yaitu memakai barang, uang dan yang lainnya dan merupakan barang orang lain dalam jangka yang ditentukan, apabila sudah mecapai batas jangkanya maka harus dilakukan pengembalian. Pinjaman merupakan apa yang dipinjam bisa berupa barang, maupun uang dan yang lain sebagainya (*Depdiknas, 2008).*

Sedangkan menurut UU Nomor 17 tahun 2012 mengenai Koperasi Simpan pinjam adalah dengan disediakannya dana oleh koperasi simpan pinjam pada anggotanya yang berlaku sebagai peminjam yang berdasar pada sebuah perjanjian, yang diwajibkan bagi peminjam untuk membayar agsurannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan membayar jasanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Program SPP ini merupakan aktivitas diberikannya modal bagi kelompok SPP yang memiliki aktivitas menyimpan dan meminjam. Dan memiliki Tujuan yang bersifat umum dalam pengembangan kemampuan aktivitas menyimpan dan meminjam pada anggota simpan pinjam perempuan di pedesaan, akses pemberian dana pada usaha skala kecil, serta terpenuhinya kebutuhan dana sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mesejahterakan masyarakat miskin dan diciptakannya lapangan kerja bagi masyarakat. Sedangkan tujuan yang bersifat khusus pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini adalah memenuhi kebutuhan dengan proses yang cepat dengan pemberian dana untuk modal usaha, memperluas kesempatan bagi kaum perempuan dalam peningkatan ekonomi rumah tangga melalui pemberian pinjaman modal untuk usaha, serta penguatan pada kelompok SPP di desa. *(Dirjenpemdes, 2014).*

Yang dimaksud dengan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) adalah upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam membantu

memberdayakan perempuan, yang memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan cara memberdayakan kelompok dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir, yang memiliki tujuan untuk mempermudah akses dengan pinjaman tanpa jaminan, serta memili aturan sendiri, membantu masyarakat miskin, dan masyarakat langsung diikut sertakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan tersebut. Pemberdayaan perempuan ini dilakukan dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Perempuan atau yang biasa disebut dengan MDKP dan simpan pinjam khusus bagi perempuan yang disingkat dengan SPP.

Di Desa Karanggintung para warga perempuan memiliki niatan pertama kali dalam membuat kelompok karena mereka mempunyai kesamaan yaitu membutuhkan modal untuk usahanya oleh karena itu mereka membuat kelompok SPP yang kemudian mengajukan pinjman bergulir pada UPK PNPM Mandiri Pedesaan. Mereka mengetahui tentang program pembiayaan pinjaman bergulir dari sosialisasi yang diadakan UPK dan juga dari anggota kelompok yang sudah ada sejak lama. Jadi, dengan hal tersebut para anggota baru berinisiatif untuk membuat kelompok baru dengan anggota kelompok minimal 7 orang yang sudah termasuk pengurus kelompok itu sendiri. Memang untuk pinjaman modal yang paling awal masih sekitar Rp 2.000.000 tetapi seiring berjalannya waktu dan pembayaran angsuran secara tepat waktu maka pada tahun berikutnya pengajuan pinjaman bisa di tambahkan lagi sesuai dengan kesepakatan bersama pengurus UPK. Biasanya jumlah pertambahan pinjaman berkisar kelipatan dari pinjaman awalnya. Adapun gambar prosedur kelompok dan tabel data anggota kelompok SPP desa karanggintung Kecamatan Kemranjen adalah sebagai berikut:

Prosedur Pembentukan Kelompok

Gambar 1.

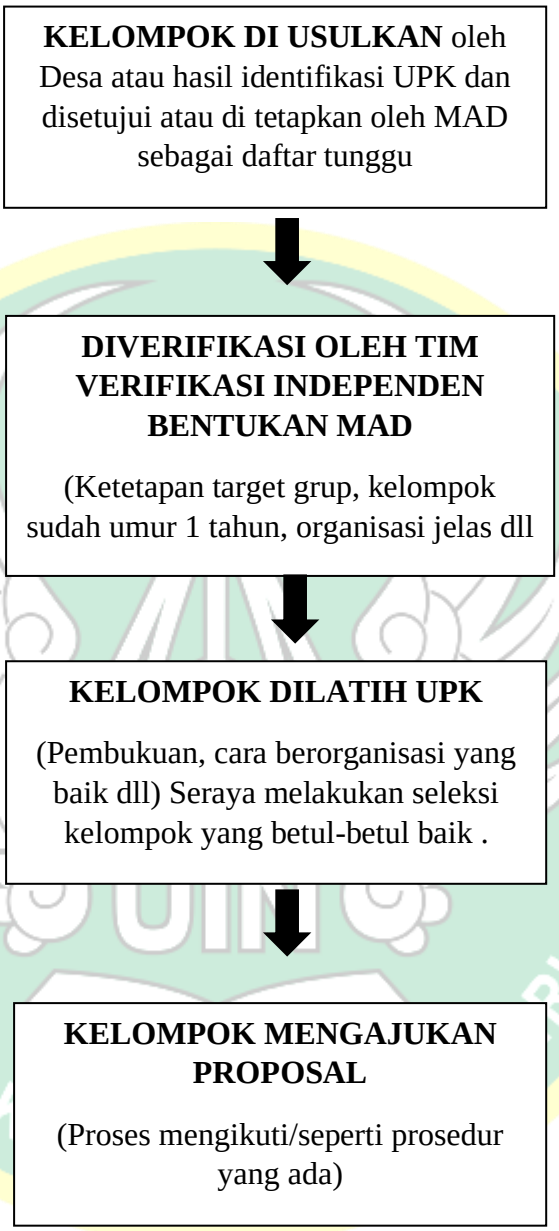

Tabel 3.

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Desa Karanggintung

No.	Nama Kelomok	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Jumlah Pinjaman
1.	Manggis	Ibu Kamiyah	11 orang	Rp.97.000.000
2.	Siwalen	Ibu Nur Fanida	12 orang	Rp.111.000.000
3.	Amanah	Ibu Masamah	10 orang	Rp.88.000.000
4.	Maju Jaya	Ibu Sri Hartati	10 orang	Rp.83.000.000
5.	Adil Makmur	Ibu Supriyatun	10 orang	Rp.83.000.000
6.	Mawar Merah	Ibu Sulastri	7 orang	Rp.40.000.000
7.	Ardi Lancar S	Ibu Widiyarti	12 orang	Rp.137.000.000

3. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Pinjaman Bergulir untuk Anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang berjalan dalam kegiatan usaha pemberian modal usaha, dengan menggunakan tabungan dari para anggota dijalankan melalui teknik yang memudahkan, biaya yang murah, proses yang cepat, dan tepat yang memiliki fokus untuk menghasilkan produk usaha dan mensejahterakan masyarakat. Modal yang dihasilkan untuk koperasi simpan pinjam adalah dari hasil bisnis yang didalamnya berisi cadangan dan sumber yang lain dan merupakan tabungan dari anggotanya. Tabungan itu yang antara lain seperti dibawah ini: *(Anis Nurhanafi, 2014: 42).*

a. Yang pertama ada Simpanan pokok yang merupakan tabungan yang pada saat awal angsuran diberikan pada anggotanya dan menjadi tabungan yang bersifat permanen.
b. Yang kedua ada Simpanan wajib yang merupakan tabungan yang bisa digunakan kapanpun dalam tenggang waktu yang ditentukan.
c. Yang ketiga ada Simpanan sukarela yang merupakan tabungan yang diperoleh dari pihak luar koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rosita Ambarwati selaku Ketua UPK Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas ada

beberapa kesamaan antara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dengan koperasi simpan pinjam. Persamaan dari keduanya ada pada sisi diberikannya penambahan modal usaha, yang mana diberikannya tambahan modal usaha pada Unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan Kemranjen selain hasil dari keuntungan berusaha, cadangan dan sumber yang lain, selain itu juga ada pada simpanan dari setiap anggota. Misalnya yang sudah dijelaskan tadi yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan suka rela.

Dengan adanya hal tersebut yang memiliki tujuan pada pembiayaan pinjaman bergulir pada program UPK PNPM MP adalah tersedianya akses pelayanan keuangan untuk rumah tangga miskin dengan pinjaman bergulir untuk usaha mikro yang bertumpu pada pasar dengan kegiatan yang bisa menambah pendapatan, dan pada biasanya tidak bisa melakukan pinjaman pada lembaga keuangan yang lain. Hal ini Dilakukan agar dapat melakukan perbaikan perekonomian masyarakat serta program yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomi dan bisnis kecil masyarakat. Selain itu juga memberi pembelajaran bagi masyarakat dalam hal pengelolaan pinjaman bergulir serta penggunaanya secara baik dan benar.

Ada beberapa proses kegiatan penyaluran pembiayaan pada UPK PNPM-MP di Kecamatan Kemranjen yang dilaksanakan dengan melalui cara-cara sebagai berikut ini:

a. Yang pertama ada pembentukan kelompok SPP.

   Pengurus Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas memberi pembinaan kepada anggota kelompok mengenai kebutuhan modal seperti penggunaan untuk usaha. Untuk sebuah kelompok yang sudah berdiri lama dan mempunyai keinginan untuk mengajukan pinjaman kembali, maka akan ada proses verifikasian terhadap kebutuhan kelompok tersebut

dan adanya penambahan modal oleh tim verifikasi yang ada di UPK Kecamatan Kemranjen. Lalu Tim Verifikasi UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas akan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya tunggakan yang pernah dilakukan oleh kelompok lama yang akan mengajukan pinjaman kembali.

b. Dalam Pembentukan kelompok anggota Simpan Pinjam Perempuan, ada beberapa syarat antara lain adalah:

1). Sebuah Kelompok yang sudah berjalan selama satu tahun.

2). Jumlah Anggota paling sedikit 7 orang dengan pengurus dan paling banyak berjumlah 30 orang.

3). Harus memiliki peraturan secara tertulis pada setiap kelompok dan memiliki peraturan untuk pengurus kelompok secara tertulis.

4). Memiliki peraturan pengolahan dana tabungan yang berisi macam dana tabungan yang diolah, dan yang lainnya.

5). Memiliki peraturan pengolahan pinjaman bergulir yang berisi syarat-syarat dalam pembiayaan pinjaman bergulir, jumlah pembiayaan pinjaman bergulir, jangka waktu pembayaran/jatuh tempo dan yang lainnya.

6). Pengurus kelompok SPP diwajibkan mengadakan pertemuan kelompok setiap bulannya untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha anggota kelompok tersebut.

7). Kelompok SPP harus membuat catatan setiap hasil pertemuan kelompok dan diadministrasikan supaya lebih jelas.

8). penyelenggaraan administrasi dan pencatatan hasil pertemuan dilakukan dengan cara yang tertib. Dalam pembuatan kelompok, ada biaya yang wajib dibayarkan, antara lain adalah ada beban iuran untuk keperluan dalam proses penyusunan proposal yang harus ditanggung oleh kelompok SPP, biaya materai dan biaya yang lain dalam proses pembiayaan akan dibebankan dari pihak

peminjam, dan biaya yang dikeluarkan dalam transportasi serta pembelian barang sesuai dengan pengajuan pembiayan juga ditanggung oleh kelompok.

c. Tahapan diajukannya pembiayaan pinjaman bergulir

Sesudah kelompok simpan pinjam perempuan dibentuk, maka selanjutnya anggota kelompok bisa melakukan pengajuan proposal untuk pinjaman dana pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen. Contoh pengajuan proposal pembiayaan pinjaman bergulir pada UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen adalah seperti dibawah ini:

1). Yang pertama ada Surat permohonan yang terdapat tanda tangan dari ketua serta penyebutan pada surat kuasa yang sudah disepakati bersama.

2) yang kedua di Dalam surat permohonan sudah dilampirkan dan penyebutan banyaknya pinjaman yang diajukan, tujuan dalam penggunaan dana tersebut, perjanjian waktu pengembalian, serta penyebutan kesediaan pinjaman dalam penerimaan hukuman sanksi yang sudah ditentukan.

3) yang ketiga ada form yang berisi tentang rencana usaha anggota dan juga rencana kegiatan anggota kelompok.

4) yang ke empat ada Surat Tanggung Rentang serta Lampiran.

5) Dan yang terakhir ada syarat lainnya yang ditentukan dengan kebutuhan dalam kegiatan pembiayaan pinjaman bergulir.

d. Tahap verifikasi data serta proses seleksi.

Sebelum pencairan dana pinjaman maka setiap proposal kelompok simpan pinjam perempuan diajukan untuk usaha, maka tim verifikasi pada UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen akan melaksanakan analisis pada layak atau tidaknya usaha bisnis serta pengajan pinjamannya dengan melalui pertemuan secara langsung dengan anggota yang akan mengajukan pembiayaan pinjaman bergulir. Hal tersebut dilaksanakan supaya dana yang diberikan tepat

sasaran dan kegiatan pinjaman bergulir dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan aturan yang sudah ditetapkan. Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi syarat kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman bergulir dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen.

e. Proses pencairan dana

Pada proses diberikannya dana kepada setiap anggota kelompok yang sudah mengajukan proposal pinjaman bergulir, maka pengurs Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen melakukan proses Pembiayaan pinjaman berglir hanya diberikan kepada anggota kelompok SPP dengan memanfaatkan RTM. Dalam pembiayaan tidak boleh dilakukan oleh perorangan. Semua kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di wilayah Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas mempunyai hak untuk pengajuan pinjaman bergulir pada kelompok yang sudah lama terbentuk ataupun kelompok yang baru dibentuk. Pada anggota yang sudah lama dan yang masih baru masing-masing dari kelompok tersebut sudah terbebas dari angsuran pinjaman bergulir maka kelompok tersebut sudah bisa mengajukan kembali pinjaman dan dinyatakan laya.

Pada UPK PNPM Mandiri Pedesaan Mekanisme untuk melakukan transaksi pinjaman bergulir untuk anggota SPP adalah Pinjaman modal awal sebagai anggota di beri dana sebesar Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu cicilan 12 bulan atau 1 tahun dan setoran per bulan sebesar Rp. 200.000, jika sudah melewati satu tahun dengan baik maka anggota kelompok dapat mengajukan modal pinjaman dengan jumlah kelipatannya secara bertahap. Misalnya pada satu tahun lalu sudah meminjam sebesar Rp. 2.000.000 maka tahun berikutnya bisa mengajukan dana pinjaman sebesar Rp. 4.000.000.

Dalam dana tersebut juga terdapat tabungan renteng dan tabungan pokok yang dimiliki oleh setiap anggota. Syarat awal pembentukan kelompok ini minimal 7 orang, syarat lainnya yang dibutuhkan adalah KK (Kartu Keluarga), KTP si suami (ahli waris) dan istri serta tanda tangan yang bersangkutan. Pinjaman ini diberikan kepada masyarakat untuk modal usaha tanpa adanya agunan atau pinjaman yang memberatkan peminjam. Dengan adanya pinjaman modal tersebut memudahkan anggota kelompok untuk lebih mengembangkan usahanya lagi guna mensejahterakan perekonomian masyarakat Desa Karanggintung.

Setiap kelompok mendapatkan biaya penyaluran dana paling tinggi sejumlah Rp 150.000.000 sedangkan yag paling rendah adalah sejumlah Rp 10.000.000. Dalam proses pinjaman bergulir yang diberikan kepada individu maka pengurus kelompok SPP yang akan membagikan per individu besaran nominalnya sesuai dengan yang di ajukan dan sesuai dengan kesanggupan membayar angsurannya dan kebutuhan per individu tersebut. Sedangkan dalam Unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas pada tahun terdapat sekitar 200 kelompok dan pada masing-masing kelompok biasanya terdiri dari 10 orang bahkan lebih.

Skema Mekanisme Perguliran pinjaman.

Gambar 2.

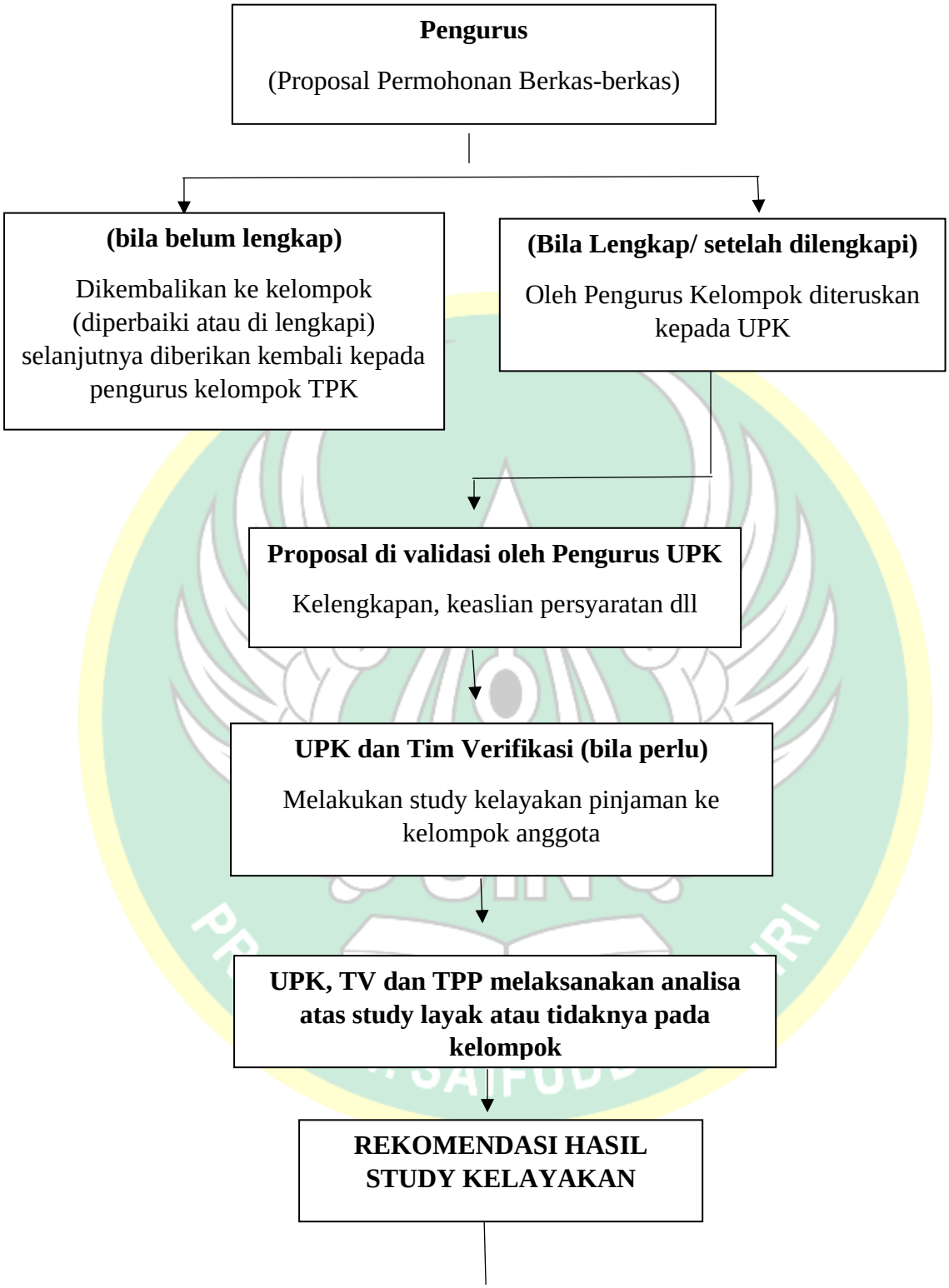
Pengurus
(Proposal Permohonan Berkas-berkas)
(bila belum lengkap)
Dikembalikan ke kelompok (diperbaiki atau di lengkapi) selanjutnya diberikan kembali kepada pengurus kelompok TPK
(Bila Lengkap/ setelah dilengkapi)
Oleh Pengurus Kelompok diteruskan kepada UPK
Proposal di validasi oleh Pengurus UPK
Kelengkapan, keaslian persyaratan dll
UPK dan Tim Verifikasi (bila perlu)
Melakukan study kelayakan pinjaman ke kelompok anggota
UPK, TV dan TPP melaksanakan analisa atas study layak atau tidaknya pada kelompok
REKOMENDASI HASIL STUDY KELAYAKAN

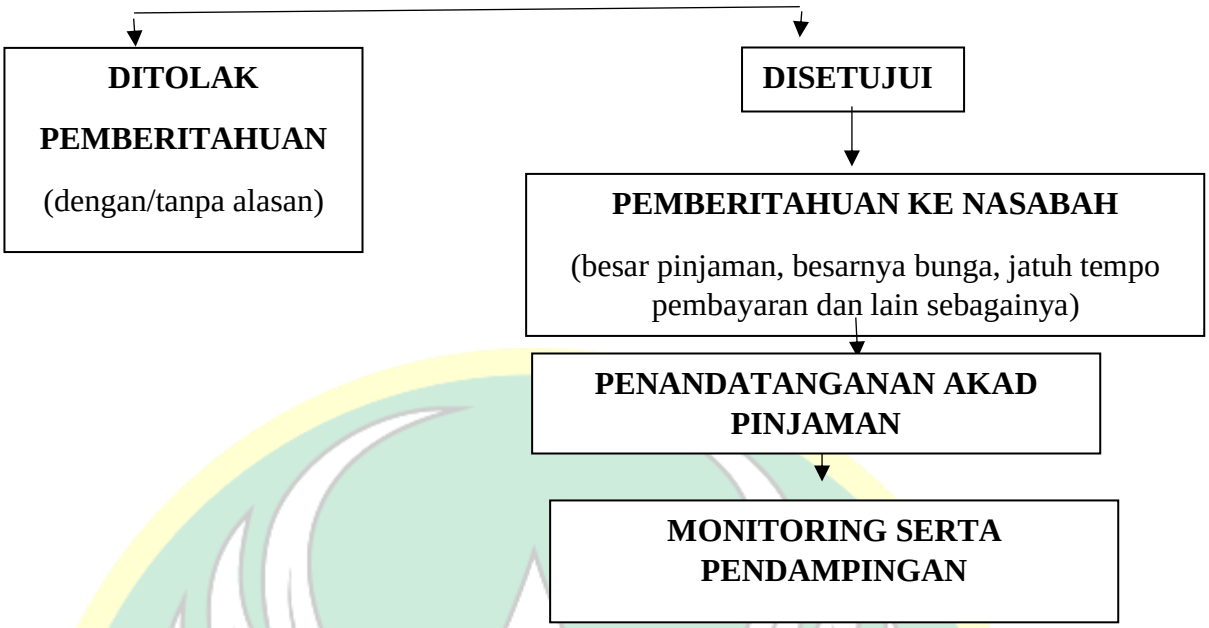

4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Pinjaman Bermasalah

Strategi memiliki definisi yang merupakan beberapa fokus tujuan serta rancangan cara menanggulangi masalah, dimana cara untuk mencapainya akan memberi salah satu keutamaan yang bersifat kompetitif *(Maulistina, 2017:75).* Sebuah program yang memberi pinjaman modal memberi harapan dimana pembiayan ini terus bergerak baik, peminjam patuh pada aturan-aturan yang sudah disepakati dan mendapat perjanjian serta melakukan pembayaran lunas pada saat waktunya. Dalam tempo yang didalamnya berisi waktu pembayaran angsuran yang sudah ditentukan maka peminjam biasanya akan mengalami masalah dalam membayar angsurannya dan dapat mengakibatkan rugi pada lembaga yang memberi pembiayaan dana.

Untuk semua lembaga keungan, pembiayaan yang memiliki masalah bukan hal yang asing lagi, yaitu bahwa selurh lembaga keuangan mengalami hal tersebut. Sebab,permasalahan pada saat ini merupakan bagaimana cara mengadapi permasalah itu dan mencegah dilaksankan supaya pembayaran angsuran yang memiliki masalah dapat terhindar.

Tidak sedikit sebuah lembaga yang bubar karena tidak dapat memecahkan permasalahan dengan cara yang baik. Upaya untuk menyelesaikannya dapat dilaksanakan oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dalam pnyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan cara sebagai berikut:

1. Cara menagih pinjaman dilakukan dengan cara yang lebih intensif maupun melaksanakan pendekatan pada anggota kelompok dan melakukan peningkatan anggota kelompok bahwa pembayaran pembiayaan pinjaman bergulir akan masuk waktu jatuh tempo.
2. Dengan memberikan SP Terhadap anggota kelompok yang melakukan pinjaman jika dalam waktu lima sampai sepuluh hari anggota kelompok masih tidak melakukan pembayaran maka pihak dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen akan memberi surat peringatan atau yang biasa disebut dengan SP I. kemudian jika mengalami keterlambatan melewati waktu sebelas sampai dua puluh hari, maka akan diberikan Surat Peringatan II begitu juga seterusnya. Jika lebih dari dua puluh hari ataupun lebih sampi sebulan lebih peminjam masih tidak membayar pembiayaannya maka dari pihak UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen akan memberi Surat Peringatan III untuk melunasi tanggungan pembiayaannya.
3. Pengaturan jadwal ulang, berdasar pada PBI Nomor 13/9/PBI tahun 2011 merupakan merubah kembali jadwal pembayaran tanggungan peminjam atau waktu jatuh tempo. Jika menurut nasabah pembiayaan yang memiliki masalah tidak bisa membayarnya tepat waktu, dengan ketentuan tidak bisa melakukan penambahan jumlah tagihan yang tersisa, dengan memperpanjangan waktu pembayaran harus disesuaikan dengan kesepakatan semua pihak. Hal tersebut menjadi cara yang dilaksanakan oleh pihak UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen dengan cara pemberian keringanan berupa pengubahan jatuh tempo pembayaran. Sebagai contoh

memperpanjang jatuh tempo dari enam bulan menjadi satu tahun. Dengan adanya cara tersebut tentu saja jumlah tagihan juga semakin mengecil seiiring dengan ditambahnya jumlah tanggungan. Dengan begitu peminjam yang telat melakukan pembiayaan dalam membayar angsuran maka peminjam dapat memiliki waktu jatuh tempo yang lebih lama dalam pengembalian dana yang masih terdapat kemacetan angsuran.

4. Pengaturan syarat-syarat ulang yang mengarah kepada PBI Nomor 13/9PBI tahun 2011 adalah dengan cara dikurangi jadwal jatuh tempo, menambah jumlah pembayaran yang ditentukan, merubah jatuh tempo, serta memberikan pengurangan. Pihak Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dalam pelaksanaan menyelamatkan dana pinjam dengan melalui perubahan pada bagian-bagiannya maupun keseluruhan syarat-syarat pada pinjaman dana yang tidak memiliki batas melainkan hanya merubah jadwal dana pinjaman, waktu jatuh tempo, serta syarat-syarat yang lain selama tidak mengubah total rubahnya dana maksimal dalam pembiayaan.
5. dilakukannya musyawarah bersama semua kelompok yang memiliki masalah untuk pembahasan penyebab masalah dana angsuran yang macet.
6. Dilakukannya mufakat dengan pihak desa yang didalamnya terdapat sebuah kelompok yang memiliki masalah yang kemudian akan dibahas bagaimana cara menyelesaikan dana yang macet pada salah satu kelompok.
7. Menyita barang jaminan dana pinjaman tersebut untuk melunasi pembiayaan yang memiliki masalah.
8. Apabila angsuran tidak dapat menutup pinjaman yang masih belum terlunasi dan masih memiliki masalah maka pengurus Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak ahli

waris yang terkat serta mendapatkan mufakat dalam penyelesaian angsuran pinjaman sampai lunas.

9. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen tidak akan memberi dana pinjaman lagi pada kelompok SPP yang mempunyai masalah, walaupun telah mengajukan pinjaman berulang kali sebagai sebuah ancaman bagi kelompok yang lain agar tidak melakukan hal yang serupa.

Apabila kelompok yang masih memiliki masalah dalam keadaan mempunyai itikad baik maka masalah tersebut mendapat penyeleselesaian dengan cara kekeluargaan. Pihak UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen akan terus mendukung anggota kelompok pembiayaannya agar mampu berdiri lagi dan memenuhi kewajibannya. Namun, jika anggota kelompok yang memiliki masalah dalam keadaan unwell (tidak ada itikad baik), maka pihak UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen akan langsung menyelesaikan permasalahan tersebut menggnakan jalur hukum.

5. Analisis Mekanisme Pembiayaan Pinjaman Bergulir Menurut Tinjauan Islam

UPK PNPM Mandiri Pedesaan merupakan kegiatan yang didalam praktek simpan pinjamnya dapat diartikan sebagai al-qardh atau mengambil keuntungan. Didalam hadits juga disebutkan bahwa transaksi simpan pinjam atau utang piutang merupakan salah satu akad yang melibatkan dua orang atau lebih yang megarah pada prinsip pinjam meminjam yang didalamnya bukan bertujuan mendapat laba dari orang yang dipinjami. Karena pada dasarnya orang yang meminjami pahalanya lebih besar daripada shadaqah karena sudah membantu orang yang lebih membutuhkan. Sejak zaman Rasulullah SAW juga sudah ada akad Al-qardh bahkan Rasallullah SAW melakukan transaksi tersebut. Dalam fiqh klasik Al-qardh di kelompokkan dalam akad ta'awuni atau

yang biasa disebut dengan tolong menolong, sebab dalam UPK PNPM Mandiri dana yang diberikan untuk menolong warga yang membutukan atau warga yang miskin.

Tujuan yang mendasar dari program pinjman bergulir Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Kemranjen sangat baik, antara lain adalah dengan cara pemberdayaan warga yang kurang mampu dengan pemberian pinjaman modal untuk digunakan dala kegiatan usahanya supaya dapat mengurangi masalah serta pemenuhan kebutuhan hidupnya setiap hari. Yang menjadi dasar adalah warga yang kurang mampu wajib diberi bantuan supaya tidak terjadi penurunan kualitas kehidupan. Sikap tolong-menolong, kebersamaan antara para tetangga dalam Agama islam memberi perhatian dan pertimbangan dalam berbuat kebaikan sesuai dengan syariat islam. Dibawah ini peran Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP dalam ekonomi islam terhadap perkembangan perekonomian di Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Dimulai pada tahun 2014-2022 UPK Kecamatan Kemranjen memulai dengan melakukan pemanfaatan dana pinjaman yang didapatkan dengan cara membagi hasilnya dari program pinjaman bergulir, dengan begitu dana dimanfaatkan untuk menolong masyarakat miskin dan kurang mampu. Dana bagi hasil dari tahun 2014-2022 dimanfaatkan untuk kegiatan memberdayakan masyarakat, dan disalurkan dengan berbentuk dibangunnya rumah untuk kaum dhuafa dan memberi dana perbaikan rumah yang sudah tidak layak untuk dihuni. Dan dana bagi hasil pada tahun 2017, disalurkan untuk memberi sumbangan berupa infaq dan santunan kepada masyarakat miskin.

Tujuan diberikannya pinjaman modal dari PNPM-MP yang pada dasarnya adalah untuk penanggulangan kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan dan mengembangkan usaha masyarakat yang masih kurang mampu. Dalam melaksanakan kebaikan, manusia hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT, dan tidak memiliki tujuan untuk

keuntungan saja. Menurut nalar dari sisi tujuannya pinjaman UPK PNPM-MP Kecamatan Kemranjen terdapat riba sebab adanya tambahan yang sudah ditetapkan di awal. Riba merupakan penetapan bnga atau melebihkan jumlah pinjaman pokok yang dibebankan pada peminjam.

Dengan begitu, walaupun tujuan dari program UPK PNPM-MP Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas ini sangat mulia yaitu untuk menolong mengembangkan ekonomi masyarakatnya dengan tujuan peningkatan penghasilan warga dengan cara memberikan pinjaman modal usaha untuk dalam membuat maupun mengembangkan usahanya, tetapi dalam tinjauan islam metode yang digunakan bersifat haram karena mengandung riba.

6. Peran Pembiayaan pinjaman bergulir dalam Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi pembiayaan secara umum dalam ekonomi masyarakat adalah mampu meningkatkan kegunaan dari modal pinjaman yang diberikan, peningkatan pemberdayaan atas nilai guna suatu barang, peningkatan peredaran jalannya keuangan, memberi rasa ingin usaha masyarakat, pembiayaan untuk alat penstabil perekonomian, sebagai sarana dalam cara peningkatan pendapatan nasional sebagai cara untuk berhubungan dalam hal ekonomi dengan negara lain *(Veihzal, 2010:712).* Manfaat dari pembiayaan juga bukan hanya untuk lembaga perbankan dan nasabah, melainkan juga memberi manfaat bagi pemerintahan serta masyarakat luas.

Yang paling utama bagi warga desa yang memiliki perekonomian menengah kebawah dan mempunyai nilai penghasilan dibawah standar, pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, yang berarti bahwa masyarakat juga tidak memiliki tempat dalam bidang perekonomian, diberikannya bantuan dana juga membuat mereka melaksanakan jalan perekonomian serta dapat melakukan peningkatan penhasilan ekonomi. Penyediaan

pembiayaan untuk keberhasilan bisnis, yang berarti untk mengembangkan dana dan dibutuhkannya tambahan dana untuk modal. Dengan tambahan modal ini juga dapat diraih melalui pelaksanaan program pembiayaan pinjaman bergulir, yang mana pihak surplus dananya bisa menjadi penyaluran dana kepada warga yang masih kekurangan dana.

Peningkatan pembuatan produk, yang berarti modal dana bisa memberi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki bisnis supaya dapat memberi peningkatan daya produktivitasnya. Sebab usaha produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya dan yang mencukupi. Dalam membuka lapangan pekerjaan yang baru berarti bahwa dengan pembukaan sektor usaha melalui pertambahan dana pembiayan. Maka sektor usaha ini akan membutuhkan tenaga kerja, hal tersebut berarti penambahan atau pembukaan lapangan pekerjaan yang baru. Pembiayaan memiliki peran yang penting dalam upaya memberdayakan masyarakat yang paling utama adalah pemberdayaan pada masyarakat menengah ke bawah guna untuk peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat *(Nawawi, 2011:110).*

7. Faktor Pendukung dan Penghambat UPK PNPM Mandiri

1. Faktor pendukung UPK PNPM Mandiri Pedesaan adalah berjalannya pembiayaan pinjaman bergulir di Kecamatan Kemranjen Khususnya di Desa Karanggintung. Dari seluruh anggota SPP, UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen dapat mengembangkan serta mempertahankan citra yang baik setiap tahun. Jadi, UPK PNPM Mandiri Pedesaan dan kelompok SPP di Desa Karanggintung mampu bekerjasama dengan baik. Keunggulan dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan adalah memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan modal untuk usahanya.

2. Faktor penghambat UPK PNPM Mandiri Pedesaan adalah banyaknya pesaing UPK yang di dalam prosedur pembiayaannya meniru UPK PNPM Mandiri Pedesaan. Jadi, masyarakat terkecoh dengan nama dan prosedur yang hampir sama dengan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan pada UPK PNPM Mandiri Pedesaan dan masyarakat Desa Karanggintung, Kecamatan Kemranjen, maka telah diperoleh hasil dari penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. UPK PNPM Kecamatan sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari sebelum adanya UPK dan sesudah adanya UPK di Kecamatan Kemranjen, sebelum adanya UPK masyarakat desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen khususnya kaum perempuan yang memiliki usaha mikro sering mengalami usaha yang macet karena kurangnya modal yang dimiliki untuk pengembangan usahanya. Meskipun di Kecamatan Kemranjen ada lembaga keuangan seperti bank namun mereka enggan mengambil pembiayaan atau pinjaman pada lembaga tersebut, karena merasa takut tidak mampu membayar dan tidak mengetahui bagaimana cara pengambilan pembiayaan. Namun, lembaga PNPM MP atau UPK yang memang di khususkan untuk memberdayaan masyarakat melakukan sosialisasi sebelum memberikan pembiayaan.

   Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan pada setiap Kecamatan, sudah banyak membantu masyarakat dalam mencukupi perekonomiannya bahkan dapat mensejahterakan masyarakat miskin dengan bantuan modal usaha dari pinjaman bergulir oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan pada keseharian warga Bahkan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri secara tidak langsung telah membuka lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi penganguran. Dengan pinjaman modal yang diberikan membuat masyarakat lebih terdorong untuk membuka dan menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh.

Jadi, Dari permasalahan ekonomi yang ada di desa Karanggintung yaitu kurangnya modal usaha untuk masyarakat dalam mengembangkan ekonominya UPK PNPM Mandiri Pedesaan memberikan solusi dengan cara mengadakan program pinjaman bergulir tanpa agunan. Dengan adanya pinjaman bergulir tanpa agunan meringankan masyarakat yang tidak mempunyai jaminan untuk melakukan pinjaman. Peran UPK PNPM Mandiri juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Dari pinjaman modal tersebut usaha yang dijalankan oleh masyarakat mampu berkembang, sebagai contoh usaha gula jawa, ketika mendapatakan dana dari pinjaman bergulir maka dapat digunakan untuk membeli alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya, selanjutnya ada warung sembako ketika diberikan dana pinjaman bergulir maka dapat digunakan untuk menambah modal dalam membeli barang-barang yang akan dijual di warung seperti sembako dan barang yang lainnya, selain itu juga ada yang berusaha dengan membuat kerupuk dari singkong yang awalnya masih diproduksi dalam skala kecil dan hanya dijual dari rumah saja lalu dengan adanya pinjaman bergulir dana tersebut dapat dijadikan modal untuk membeli bahan baku lebih banyak lagi sehingga memproduksi krupuk dengan skala besar dan bisa dititipkan ke warung-warung dan mamp memenuhi permintaan konsumen.

2. Menurut Analisis ekonomi islam adalah UPK PNPM Mandiri Pedesaan merupakan kegiatan yang didalam praktek simpan pinjamnya dapat diartikan sebagai al-qardh atau mengambil keuntungan. Didalam hadits juga disebutkan bahwa transaksi simpan pinjam atau utang piutang merupakan salah satu akad yang melibatkan dua orang atau lebih yang megarah pada prinsip pinjam meminjam yang didalamnya bukan bertujuan mendapat laba dari orang yang dipinjami. Karena pada dasarnya orang yang meminjami pahalanya lebih besar daripada

shadaqah karena sudah membantu orang yang lebih membutuhkan. Sejak zaman Rasulullah SAW juga sudah ada akad Al-qardh bahkan Rasallullah SAW melakukan transaksi tersebut. Dalam fiqh klasik Al-qardh di kelompokkan dalam akad ta'awuni atau yang biasa disebut dengan tolong menolong, sebab dalam UPK PNPM Mandiri dana yang diberikan untuk menolong warga yang membutukan atau warga yang miskin.

Menurut nalar dari sisi tujuannya pinjaman UPK PNPM-MP Kecamatan Kemranjen terdapat riba sebab adanya tambahan yang sudah ditetapkan di awal. Riba merupakan penetapan bnga atau melebihkan jumlah pinjaman pokok yang dibebankan pada peminjam. Dengan begitu, walaupun tujuan dari program UPK PNPM-MP Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas ini sangat mulia yaitu untuk menolong mengembangkan ekonomi masyarakatnya dengan tujuan peningkatan penghasilan warga dengan cara memberikan pinjaman modal usaha untuk dalam membuat maupun mengembangkan usahanya, tetapi dalam tinjauan islam metode yang digunakan bersifat haram karena mengandung riba.

B. Saran

Dengan adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan ini yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, maka setelah penulis melakukan penelitian ada beberapa rekomendasi yang penulis sarankan, yang bersifat kontruktif sebagai acuan bagi UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen agar kedepannya diharapkan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen lebih dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan serta lebih optimal lagi dalam meningkatkan ekonomi di Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, seperti:

1. Bagi anggota simpan pinjam hendaknya lebih ditingkatkan kesadaran akan pengembailan pinjaman dan pemberdayaan diri apalagi dengan adanya program simpan pinjam memudahkan kita untuk berdaya dan diberdayakan dan juga Bagi anggota kelompok agar dapat memanfaatkan dana pembiayaan UPK semaksimal mungkin, menggunakannya hanya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran usahanya.
2. Agar kedepannya UPK PNPM Mandiri Kecamatan Kemranjen lebih optimal lagi dalam pengelolaan agar semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat, serta lebih tepat waktu dalam pencairan dana pinjaman agar masyarakat dapat terus mengembangkan usahanya.
3. Untuk kedepannya, dana UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen agar dikelola dengan menggunakan mekanisme syariah, karena keseluruhan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen dan anggota simpan pinjam merupakan muslim dan agar terhindar dari dosa riba.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperluas cakupan lokasi penelitian untuk memperkuat penelitian yang dilakukan

Daftar Pustaka

Abdurrahmat Fathoni. Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta:Rineka Cipta, 2011

Aisyah, S, (2019). *Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah pada Penyaluran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya* (Doctoral dissertation, UIN Ar raniry).

Apriliana, (2017). Evaluasi Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat (Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. *Skripsi, Bandar lampung: Fak Ilmu Sosial dan Politik.*

Ardito Bhinadi, Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta) (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 5.

Ari Ganjar Herdiansah dan Randi,"*Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia"*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1 No. 1 Desember 2016, 52.

Chandra Kusuma Putra dkk, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6,3

Departemen Dalam Negeri Tahun 2008

Departemen Dalam Negeri. (2008). PTO PNPM-MP. Jakarta: Tim Koordinasi PNPM-MP.

Departemen Pendidikan Nasional. (2011). KBBI Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2014). PTO PNPM-MP. Jakarta: Tim Koordinasi PNPM-MP.

Febrilia Ika Aresta, Peranan Bantuan Modal "*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Banyuurip, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo",* Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, UNY, 2013), h. 33-34.

Jayadi, Yusup Sukman, (2017). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk Pengembangan Ekonomi Lokal. *Yogyakarta: Universitas Alma Ata.*

Khairi, M. (2019). *Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam meningkatkan perekonomian di Desa Pembuang Hulu* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Maulistina Laili, 2017. "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam".* Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Muhammad Ramadhan, Politik Ekonomi Islam dalam Narasi Pembangunan Nasional, (Yogyakarta: LKiS, 2018), 3.

Nasrin., Ermawati., & Hasanah, U. (2019). Efektivitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lakea II Kabupaten Buol. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 54-60.

Nawawi, Ismail, 2011. "*Perbankan Syari'ah*". Jakarta: Kencana.

Nurhalizah, S. (2019). *Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terhadap Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Ditinjau dalam Perspektif Islam)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Neger Alauddin Makassar).

Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: BPFE, 2010), h. 146 40

Pahruroji, (2016). A*nalisis Efektivitas Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan Desa Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).

Pasal 1 ayat 13, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) https://kotaku.pu.go.id/view/3685/kiat-sukses-pengelolaan-pinjaman-bergulir-di-pnpm-perkotaanMandiri.

Pratama, A. (2018). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui UPK PNPM Mandiri dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di

Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus: UPK PNPM Mandiri Kecamatan Baitussalam). *Skripsi, Banda Aceh: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Rahayu, T,I. (2017). Implikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Perubahan Perekonomian Masyarakat Perdesaan Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 6(1), 6-9.

Ratna Ekasari, Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi, (Malang: AE Publishing, 2020), 26. 21

Sinaga, Marlina. (2018). Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pnpm Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Skripsi: Uma Medan.

Tim Koordinasi PNPM-PPK, Petunjuk Teknis Operasional, Jakarta: 2007. H.6-8

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengenai *segala sesuatu yang ada di bank*.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, pasal 1 butir 23

Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang *pengertian lembaga keuangan*

Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, 2010. "*Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global".* Jakarta: Bumi Aksara.

Wati, R, (2019). *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Ar raniry).

Wati, L, (2019). *Peran PNPM-MP terhadap Perekonomian Masyarakat Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Skripsi, UIN Sutha Jambi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Singkatan Kata:

SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Desa
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
BKAD	: Badan Kerjasama Antar Desa
MAD/K	: Musyawarah Antar Desa/Kelurahan/Kampung
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
BKU	: Buku Kas Umum
FK	: Fasilitator Kecamatan
F-KAB	: Fasilitator Kabupaten
TPK	: Tim Pelaksana Kegiatan
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
LPD	: Laporan Penggunaan Dana
RPD	: Rencana Penggunaan Dana
MDKP	: Musyawarah Desa Khusus Perempuan
PJOK	: Penanggung Jawab Orerasional Kegiatan
PL	: Pendamping Lokal
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
RTM	: Rumah Tangga Miskin
UPK	: Unit Pengelola Kegiata

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

A. UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen:
   1. Bagaimana awal mula terbentuknya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen?
   2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perkembangan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen?
   3. Apa saja program-program yang telah dijalankan PNPM Mandiri Pedesaan?
   4. Berapa banyak anggota Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?
   5. Bagaimana prosedur keanggotaan Simpan Pinjam Perempuan?
   6. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Pinjaman Bergulir Untuk Anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
   7. Berapa batasan dana dan waktu pengembalian yang diberikan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen?
   8. Kendala apa yang sering terjadi dalam pelaksaan program UPK PNPM Mandiri Kecamatan Kemranjen?
   9. Bagaimana UPK PNPM Mandiri Kecamatan Kemranjen mengatasi kendala yang terjadi?
   10. Apa saja kontribusi/peran yang telah dilakuakan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?

B. Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas:
   1. Bagaimana pendapat ibu mengenai adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen?
   2. Setujuhkah ibu dengan adanya program simpan pinjam perempuan?
   3. Berapakah total pinjaman yang ibu terima dari dana bergulir UPK PNPM?
   4. Dana bergulir dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan bapak/ibu gunakan untuk apa?
   5. Apakah kendala yang ibu alami dengan anggota kelompok lainnya?
   6. Bagaiamana dampak secara langsung yang ibu rasakan setelah adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan?
   7. Apakah dalam melayani, UPK PNPM Mandiri bersikap ramah, sopan dan tidak memandang status sosial?

Lampiran 3

Hasil wawancara

Nama : Bapak Sabar Susanto, SPd

Jabatan : Ketua BKAD

Lokasi : Kantor Badan Kerjasama Antar Desa "Kemranjen"

Tanggal wawancara : 28 November 2022

No	Pertanyaan	Jawaban informan
1.	Bagaimana kerjasama antara BKAD dan UPK?	Karena pada mulanya BKAD sendiri memiliki hubungan dengan pihak desa dan mengetahui keluh kesah masyarakat mengenai pembiayaan. Dan dengan adanya penyaluran dana dari pemerintah maka kami salurkan untuk UPK dan dikelola dengan baik dengan tetap bernaung pada BKAD.
2.	Menurut bapak apakah program dari UPK sendiri berjalan dengan baik atau tidak?	Kalo menurut saya program dari UPK ini berjalan sangat baik setiap tahunnya dimana anggota kelompok semakin bertambah dan mampu mengembalikannya tepat waktu.
3.	Dampak apa sih yang diberikan BKAD dalam program UPK untuk masyarakat desa?	Salah satu dampaknya yaitu masyarakat mampu mengembangkan usaha yang berskala mikro dan mampu memutar kembali modal usaha yang diberikan oleh UPK sehingga perekonomian masyarakat lebih berkembang dengan tidak pusing lagi masalah permodalan.
4.	Menurut bapak program UPK berhasil atau tidak?	Iya, menurut saya sangat berhasil.

Nama informan : Ibu Rosita Ambarwati

Jabatan : Ketua UPK PNPM Mandiri

Lokasi : Kantor Unit Pengelola Kegiatan

Tanggal wawancara : 5 Desember 2022

No	Pedoman wawancara	Jawaban informan
1.	Bagaimana awal mula terbentuknya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen?	Awal mulanya UPK itu berasal dari program PNPM yang berganti menjadi UPK, tetapi walaupun berganti nama dalam proses kegiatan/pelaksanaannya

		masih sama yaitu memberikan pinjaman bergulir sebagai modal usaha masyarakat desa. Seiring berjalannya waktu modal usaha yang diberikan pemerintahan meningkat sehingga sayang jika program dari PNPM tidak dilanjutkan.
2.	Menurut Bapak/Ibu bagaimana perkembangan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen?	Dimulai pada tahn 2014 UPK Kecamatan Kemranjen cukup berkembang yaitu mulai melakukan peningkatan dalam memanfaatkan dana pinjaman yang di peroleh dengan cara bagi hasil dari pinjaman bergulir. Dengan dan bagi hasil tersebut mampu dimanfaatkan untuk memberdayakanmasyarakat miskin atau yang masih kurang mampu dalam perekonomian.
3.	Apa saja program-program yang telah dijalankan PNPM Mandiri Pedesaan?	UPK, SPP, dan BUMDES bersama
4.	Berapa banyak anggota Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?	Untuk di Desa Karanggintung sendiri terdapat 7 kelompok.
5.	Bagaimana prosedur keanggotaan Simpan Pinjam Perempuan?	Dalam membuat kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang paling penting terdapat minimal 7 orang dalam satu kelompok dimana di dalam kelompok tersebut terdapat ketua, sekertaris, dan juga bendahara. Setelah itu baru mengikuti prosedur dari UPK PNPM Mandiri.
6.	Bagaimana Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Pinjaman Bergulir Untuk Anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	Yang pertama ketua mengambil proposal di kantor UPK dan kemudian diisi oleh anggota kelompok yang ingin mengajukan pinjaman, dimana ada surat pernyataan ahli waris fc ktp, fc kk, fc rekening bersama, setelah semua proposal sudah diisi maka selanjutnya proposal di tanda tangani oleh kepala desa setelah itu diserahkan kepada pihakl UPK apakah pengisian proposal sudah benar, jika sudah benar maka tim verifikasi akan melakukan kegiatannya bersama anggota kelompok yang akan

		mengajukan pinjaman, jika proses verifikasi tidak ada kendala kemudian maka akan dilakukan pencairan pinjaman bergulir pada waktu yang sudah ditentukan.
7.	Berapa batasan dana dan waktu pengembalian yang diberikan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen?	Untuk minimal pinjaman yaitu sebesar Rp. 2.000.000 dan yang maksimal yaitu sebesar Rp. 15.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun.
8.	Kendala apa yang sering terjadi dalam pelaksaan program UPK PNPM Mandiri Kecamatan Kemranjen?	Banyaknya lembaga keuangan lain yang meniru mekanisme UPK. Sehingga masyarakat kadang menyamakan hal tersebut.
9.	Bagaimana UPK PNPM Mandiri Kecamatan Kemranjen mengatasi kendala yang terjadi?	Memberikan sosialisasi pada mayarakat melalui forum atau kumpulan di desa.
10.	Apa saja kontribusi/peran yang telah dilakuakan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?	Memberikan modal usaha untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro dengan begitu pereonomian masyarakat dapat mengalami perkembangan.

Nama informan : Ibu Atik

Jabatan : Tim Verifikasi

Lokasi : Kantor UPK PNPM Mandiri

Tanggal wawancara : 5 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kendala apa saja yang terjadi ketika proses verifikasi?	Terjadinya perselisihan pinjaman yang diajukan kadang masyarakat masih berpikir-pikir sehingga tidak pasti jumlahnya.

2.	Kapan proses verifikasi dilakukan bersama anggota SPP?	Setelah proses pengisian proposal dan sudah dianggap benar baru setelah itu diadakan perkumpulan dengan anggota kelompok SPP.

Nama informan : Ibu Martini

Anggota : SPP

Lokasi : Rumah ibu Martini

Tanggal wawancara : 6 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat ibu mengenai adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen?	Dengan adanya UPK usaha saya yang dulunya masih kekurangan modal hingga hasil usaha saya kurang maksimal saat ini sudah mulai membaik dan tidak bingung lagi masalah modal.
2.	Setujuhkah ibu dengan adanya program simpan pinjam perempuan?	Sangat setuju karena membantu saya dalam hal pendanaan.
3.	Berapakah total pinjaman yang ibu terima dari dana bergulir UPK PNPM?	Rp. 12.000.000
4.	Dana bergulir dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan bapak/ibu gunakan untuk apa?	Menambah modal untuk membeli peralatan dalam pembuatan gula jawa.
5.	Apakah kendala yang ibu alami dengan anggota kelompok lainnya?	Alhamdulillah dalam kelompok kami tidak ada masalah atar anggotanya.
6.	Bagaiamana dampak secara langsung yang ibu rasakan setelah adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan?	Saya bisa menyisihkan keuntungan dari penjualan gula jawa untuk memenuhi kebutuhan dan membantu suami saya.
7.	Apakah dalam melayani, UPK PNPM Mandiri bersikap ramah, sopan dan tidak memandang status sosial?	Pelayanan dari UPK sangatlah bagus, sangat sopan dan tidak membeda bedakan status sosial.

Nama informan : ibu Kamiyah

Anggota : SPP

Lokasi : Rumah ibu Kamiyah

Tanggal wawancara : 6 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat ibu mengenai adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen?	Sangat Membantu saya dalam menambah modal untuk mengembangkan dagangan saya dan juga dengan adanya program tersebut memberi kemudahan dalam melakukan pinjaman.
2.	Setujuhkah ibu dengan adanya program simpan pinjam perempuan?	Saangat setuju, karena sangat membantu.
3.	Berapakah total pinjaman yang ibu terima dari dana bergulir UPK PNPM?	Rp. 15. 000.000
4.	Dana bergulir dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan bapak/ibu gunakan untuk apa?	Untuk membeli bibit yang akan dijual kembali atau untuk kulakan.
5.	Apakah kendala yang ibu alami dengan anggota kelompok lainnya?	Dalam kelompok saya alhamdlilahnya tidak ada kendala semua aman-aman saja.
6.	Bagaiamana dampak secara langsung yang ibu rasakan setelah adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan?	Memperluas penjualan karena menyediakan lebih banyak lagi dagangan karena dibantu dalam modalnya.
7.	Apakah dalam melayani, UPK PNPM Mandiri bersikap ramah, sopan dan tidak memandang status sosial?	Ssangat baik dalam pelayanannya dan sama sekali tidak memandang status sosial anggotanya.

Nama informan : Ibu Suripah

Anggota : SPP

Lokasi : Rumah Ibu Suripah

Tanggal wawancara : 7 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat ibu mengenai adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen?	UPK membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dalam berusaha sehingga mampu memberi jalan dalam memberdayakan masyarakatnya.
2.	Setujuhkah ibu dengan adanya program simpan pinjam perempuan?	Sangat setuju.
3.	Berapakah total pinjaman yang ibu terima dari dana bergulir UPK PNPM?	Rp. 4.000.000
4.	Dana bergulir dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan bapak/ibu gunakan untuk apa?	Saya gunakan untuk menambah alat dalam pengambilan air nira atau legen.
5.	Apakah kendala yang ibu alami dengan anggota kelompok lainnya?	Tidak ada kendala sama sekali dalam kelompok saya.
6.	Bagaiamana dampak secara langsung yang ibu rasakan setelah adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan?	Mendapat bantuan dana yang dapat saya gunakan untuk berusaha.
7.	Apakah dalam melayani, UPK PNPM Mandiri bersikap ramah, sopan dan tidak memandang status sosial?	Pelayanannya sangat baik dan bahkan tidak memandang status sosial seseorang.

Nama informan : Ibu Kaswen

Anggota : SPP

Lokasi : Rumah Ibu Kaswen

Tanggal wawancara : 7 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat ibu mengenai adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Kemranjen?	Membantu masyarakat dalam hal permodalan usaha.
2.	Setujuhkah ibu dengan adanya program simpan pinjam perempuan?	Saya setuju dengan adanya program pinjaman bergulir karena memberi dampak positif bagi masyarakat.
3.	Berapakah total pinjaman yang ibu terima dari dana bergulir UPK PNPM?	Rp. 15.000.000
4.	Dana bergulir dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan bapak/ibu gunakan untuk apa?	Untuk membeli sembako dan dagangan untuk warung saya.
5.	Apakah kendala yang ibu alami dengan anggota kelompok lainnya?	Saya tidak menemukan kendala dalam kelompok saya alhamdulillah.
6.	Bagaiamana dampak secara langsung yang ibu rasakan setelah adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan?	Dapat menambah barang dagangan saya sehingga pembeli merasa senang karena kebutuhannya dapat terpenuhi
7.	Apakah dalam melayani, UPK PNPM Mandiri bersikap ramah, sopan dan tidak memandang status sosial?	Sangat ramah, sopan dan tidak memandang status sosial semua sama.

Lampiran 4

Dokumentasi wawancara

Wawancara dengan ketua BKAD bapak sabar

Wawancara dengan ketua UPK ibu Rosita

Resepsionis

Lokasi wawancara

Foto bersama dengan pengurus UPK

proses verifikasi

Foto narasumber anggota SPP

Proposal

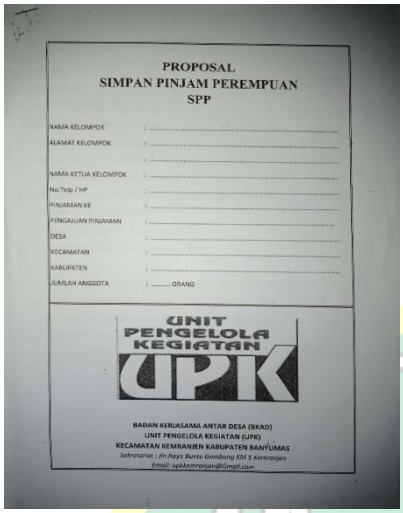

PROPOSAL
SIMPAN PINJAM PEREMPUAN
SPP

NAMA KELOMPOK : .....
ALAMAT KELOMPOK : .....
: .....
NAMA KETUA KELOMPOK : .....
No.Telp / HP : .....
PINJAMAN KE : .....
PENGAJUAN PINJAMAN : .....
DESA : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
JUMLAH ANGGOTA : ..... ORANG

UNIT PENGELOLA KEGIATAN UPK

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS
Sekretariat : Jln.Raya Bunta Gombong KM 5 Kemranjen
Email: upkkemranjen@Gmail.com

surat permohonan kredit

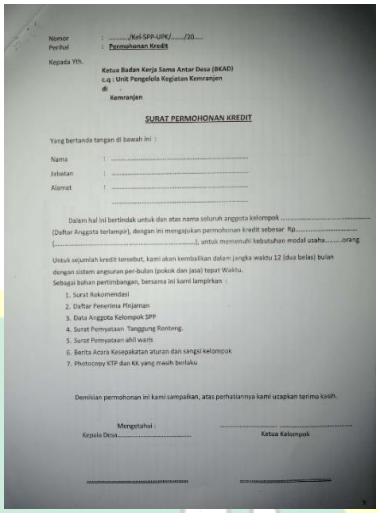

Nomor : ...../Kel-SPP-UPK/...../20.....
Perihal : Permohonan Kredit

Kepada Yth.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)
c.q : Unit Pengelola Kegiatan Kemranjen
di
Kemranjen

SURAT PERMOHONAN KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok .....
(Daftar Anggota terlampir), dengan ini mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.....
(.....), untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.....orang

Untuk sejumlah kredit tersebut, kami akan kembalikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan sistem angsuran per-bulan (pokok dan jasa) tepat Waktu.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Rekomendasi
2. Daftar Penerima Pinjaman
3. Data Anggota Kelompok SPP
4. Surat Pernyataan Tanggung Renteng.
5. Surat Pernyataan ahli waris
6. Berita Acara Kesepakatan aturan dan sangsi kelompok
7. Photocopy KTP dan KK yang masih berlaku

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa..... Ketua Kelompok

Kesepakatan dan sanksi

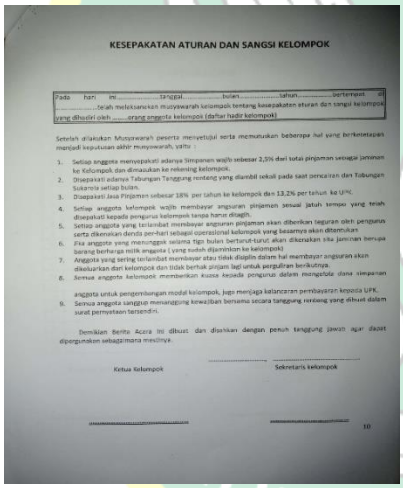

KESEPAKATAN ATURAN DAN SANGSI KELOMPOK

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di .....telah melaksanakan musyawarah kelompok tentang kesepakatan aturan dan sangsi kelompok yang dihadiri oleh ..... orang anggota kelompok (daftar hadir kelompok)

Setelah dilakukan Musyawarah peserta menyetujui serta memunculkan beberapa hal yang berkesepakan menjadi keputusan akhir musyawarah, yaitu :

1. Setiap anggota menyepakati adanya Simpanan wajib sebesar 2,5% dari total pinjaman sebagai jaminan ke Kelompok dan dimasukkan ke rekening kelompok.
2. Disepakati adanya Tabungan Tanggung renteng yang diambil sekali pada saat pencairan dan Tabungan Sukarela setiap bulan.
3. Disepakati Jasa Pinjaman sebesar 18% per tahun ke kelompok dan 13,2% per tahun ke UPK.
4. Setiap anggota kelompok wajib membayar angsuran pinjaman sesuai jatuh tempo yang telah disepakati kepada pengurus kelompok tanpa harus ditagih.
5. Setiap anggota yang terlambat membayar angsuran pinjaman akan diberikan teguran oleh pengurus serta dikenakan denda per-hari sebagai operasional kelompok yang besarnya akan ditentukan
6. Fisa anggota yang meninggal selama tiga bulan berturut-turut akan dikenakan sita jaminan berupa barang berharga milik anggota (yang sudah dijaminkan ke kelompok)
7. Anggota yang sering terlambat membayar atau tidak disiplin dalam hal membayar angsuran akan dikeluarkan dari kelompok dan tidak berhak pinjam lagi untuk pergiliran berikutnya.
8. Semua anggota kelompok memberikan kuasa kepada pengurus dalam mengelola dana simpanan anggota untuk pengembangan modal kelompok, juga menjaga kelancaran pembayaran kepada UPK.
9. Semua anggota sanggup menanggung kewajiban bersama secara tanggung renteng yang dituat dalam surat pernyataan tersendiri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Kelompok Sekretaris kelompok

10

surat perjanjian

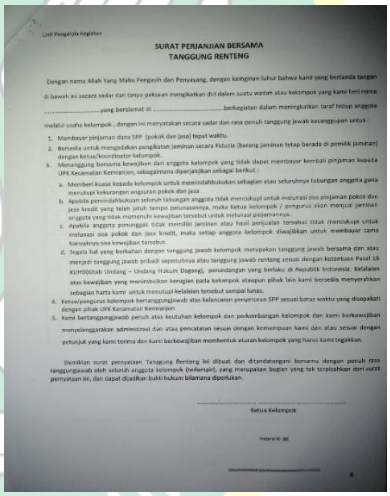

Unit Pengelola Kegiatan

SURAT PERJANJIAN BERSAMA
TANGGUNG RENTENG

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan keinginan luhur bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini secara sadar dan tanpa paksaan mengikatkan diri dalam suatu wadah atau kelompok yang kami beri nama .....yang beralamat di .....berkegiatan dalam meningkatkan taraf hidup anggota melalui usaha kelompok , dengan ini menyatakan secara sadar dan rasa penuh tanggung jawab kesanggupan untuk :

1. Membayar pinjaman dana SPP (pokok dan jasa) tepat waktu.
2. Bersedia untuk mengadakan pengikatan jaminan secara Fidusia (barang jaminan tetap berada di pemilik jaminan) dengan Ketua/koordinator kelompok.
3. Menanggung bersama kewajiban dari anggota kelompok yang tidak dapat membayar kembali pinjaman kepada UPK Kecamatan Kemranjen, sebagaimana dijaminkan sebagai berikut :
   a. Memberi kuasa kepada kelompok untuk memindahbukukan sebagian atau seluruhnya tabungan anggota guna menutupi kekurangan angsuran pokok dan jasa.
   b. Apabila pemindahbukuan selunuh tabungan anggota tidak mencukupi untuk melunasi sisa pinjaman pokok dan jasa kredit yang telah jatuh tempo pelunasannya, maka Ketua kelompok / pengurus akan menjual jaminan anggota yang tidak memenuhi kewajiban tersebut untuk melunasi pinjamannya.
   c. Apabila anggota meninggal tidak memiliki jaminan atau hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa pokok dan jasa kredit, maka setiap anggota kelompok diwajibkan untuk membayar sama barasnya sisa kewajiban tersebut.
   d. Segala hal yang berkaitan dengan tanggung jawab kelompok merupakan tanggung jawab bersama dan atau menjadi tanggung jawab pribadi sepenuhnya atau tanggung jawab renteng sesuai dengan ketentuan Pasal 18 KUHPerdata (Antang – Undang Hukum Dagang), perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Kelalaian atas kewajiban yang menimbulkan kerugian pada kelompok ataupun pihak lain kami bersedia menyerahkan sebagian harta kami untuk menutupi kelalaian tersebut sampai lunas.
4. Ketua/pengurus kelompok bertanggungjawab atas kelancaran penyetoran SPP sesuai batas waktu yang disepakati dengan pihak UPK Kecamatan Kemranjen
5. kami bertanggungjawab penuh atas kesulitan kelompok dan pelkembangan kelompok dan kami berkewajiban menyelenggarakan administrasi dan atas pencatatan sesuai dengan kemampuan kami dan atas sesuai dengan petunjuk yang kami terima dan kami berkewajiban membentuk aturan kelompok yang harus kami tegakkan.

Demikian surat pernyataan Tanggung Renteng ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh rasa tanggungjawab oleh seluruh anggota kelompok (terlampir), yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat pernyataan ini, dan dapat dijadikan bukti hukum bilamana diperlukan.

Ketua Kelompok

Syarat fotokopi

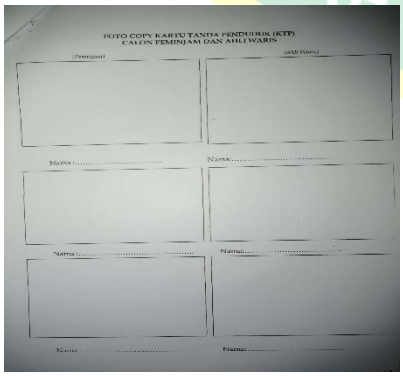

FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
CALON PEMINJAM DAN AHLI WARIS

(Peminjam) (AHLI Waris)

Nama :..... Nama:.....

Nama :..... Nama:.....

Nama:..... Nama:.....

pernyataan ahli waris

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Asiatul Mungawanah
2. NIM : 1817202137
3. Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 14 Februari 2000
4. Alamat Rumah : Karanggintung Kemranjen, Banyumas
5. Nama Ayah : Wasiman
6. Nama Ibu : Kamiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N 1 Karanggintung Banyumas
2. SMP/MTS : MTs Ma'arif NU 3 Kemranjen
3. SMA/MA : MAN 3 Banyumas

C. Pengalaman Organisasi

1. PMR MTs Ma'arif NU 3 Kemranjen
2. PMR MAN 3 Banyumas
3. Pramuka MAN 3 Banyumas

Purwokerto, 14 Februari 2023

Asiatul Mungawanah